



LAPORAN PENELITIAN ILMU DASAR  
TAHUN ANGGARAN 2005

**MIGRASI INTERNASIONAL TENAGA KERJA INDONESIA ASAL  
JAWA TIMUR STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN DAN  
KEGAGALAN TKI DI LUAR NEGERI**

Oleh:

**Drs. I B. Wirawan, SU.**  
**Dra. Tuti Budi Rahayu, M.Si.**  
**Siti Mas'udah, S.Sos.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005  
Nomor Urut : 10.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005

MIGRANT LABOR



LAPORAN PENELITIAN ILMU DASAR  
TAHUN ANGGARAN 2005

**MIGRASI INTERNASIONAL TENAGA KERJA INDONESIA ASAL  
JAWA TIMUR STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN DAN  
KEGAGALAN TKI DI LUAR NEGERI**

Oleh:

**Drs. I B. Wirawan, SU.  
Dra. Tuti Budi Rahayu, M.Si.  
Siti Mas'udah, S.Sos.**

KKB

KK-2

LP 101/08

wir

m

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005  
Nomor Urut : 10.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax (031) 5962066  
E-mail : infolemlit @ unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DASAR**

a. Judul Penelitian	: Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Timur ; Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan TKI di Luar Negeri
b. Macam Penelitian	: (v) Fundamental ( ) Terapan ( ) Pengembangan
c. Kategori Penelitian	: I / II / III
Kepala Proyek Penelitian	
a. Nama Lengkap	: Drs. I.B. Wirawan, SU
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. Pangkat/ Golongan dan NIP	: Lektor Kepala / Gol IV/b NIP. 130 701 136
d. Jabatan Sekarang	: Pembina Tk. I
e. Fakultas/Jurusan/Puslit	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi
f. Universitas/Inst./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang Diteliti	: Kependudukan (Antar Bidang)
Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan (Jatim)
Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: --
b. Alamat	: --
Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
Biaya yang Diperlukan	: Rp. 15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Surabaya, 28 Oktober 2005.

Ketua Peneliti,

*(Signature)*  
**Drs. I.B. Wirawan, SU**  
NIP. 130 701 136.

Mengetahui :  
Kepala FISIP  
Universitas Airlangga

*(Signature)*  
**Prof. Dr. Hotman Sjahrani, Drs.**  
NIP 130 701 134

Mengetahui :  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unair

*(Signature)*  
**Prof. Dr. H. Sarmanu, MS**  
NIP. 130 701 125

## RINGKASAN

### (TKI) MIGRASI INTERNASIONAL TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA TIMUR : STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TKI DI LUAR NEGERI

(I.B. Wirawan, Tuti Budi Rahayu , Siti Mas'udah, 2005, 119 halaman)\*

Permasalahan migrasi internasional yang dilakukan oleh penduduk pedesaan asal Jawa Timur yang kemudian lazim disebut TKI itu, diangkat sebagai bahan kajian, karena tidak hanya menarik untuk dikritisi, akan tetapi juga penting dikaji ; mengingat berbagai persoalan telah menimpa TKI antara lain, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi diskriminasi upah, tindakan eksploitasi, tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di negara asal dan negara tujuan. Bahwa, selama ini baik Pemerintah Indonesia (c.q. Ditjen Binapenta), maupun Lembaga Pengerah Jasa TKI dan APJATI serta lembaga-lembaga lain belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang menimpa TKI ini. Meskipun demikian, tidak sedikit TKI yang sukses bekerja di luar negeri yang ditunjukkan oleh besarnya remitan (remittances) yang mereka kirim ke daerah asalnya.

Melihat kenyataan tersebut, beberapa pihak menyatakan agar pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, sedangkan di pihak lain cukup banyak yang menilai bahwa, penghentian pengiriman TKI ke luar negeri bukanlah solusi yang memadai, disaat kondisi ketenaga kerjaan di dalam negeri, sarat dengan pengangguran.

Atas dasar latar belakang dan alasan sedemikian itu, penelitian ini dikerjakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan pokok tentang faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan TKI, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan TKI di luar negeri, serta seberapa jauh efek multiplier yang timbul di daerah asal sebagai akibat dari pengiriman TKI ke luar negeri. Sejalan dengan itu, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik yang risen (aktual) tentang berbagai faktor yang telah menyebabkan mengapa ada TKI yang berhasil dan mengapa ada yang gagal di luar negeri, serta bagaimana efek multiplier yang ditimbulkan oleh kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri, bagi daerah asal.

Walaupun terdapat banyak penjelasan teoritik tentang proses migrasi serta motif-motif orang melakukan perpindahan di tingkat individu, tetapi penelitian ini berangkat dari postulat teori Sosiologi Pilihan Rasional atau yang juga dikenal dengan "*Rational Action Theory*" dari Max Weber. Teori ini dipandang lebih sesuai untuk studi ini karena Sosiologi Pilihan Rasional menurut Heckathorn, memilih itu adalah sebagai tindakan yang rasional. Kendatipun demikian, hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi mikro klasik yang melihat pilihan rasional sekedar untuk memaksimalkan keuntungan atau pendapatan. (Ritzer dan Smart, eds., 2001: 274) Dalam pandangan sosiologi pilihan rasional, dorongan untuk bertindak lebih didasarkan pada tujuan-tujuan altruistik (*altruistic*) dan egoistik (*egoistic*) yang kompleks. Selain itu, sosiologi pilihan rasional juga memandang bahwa, rasionalitas itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Artinya, walaupun kala-kalanya suatu tindakan yang sudah diperhitungkan secara rasional – ternyata memiliki akibat yang tidak diharapkan, bahkan akibat tersebut sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya. Menurut Heckathorn, semua itu terjadi karena keterbatasan kognitif manusia di dalam memperoleh dan mengolah informasi (Ritzer dan Smart, eds., 2001 : 274). Dengan mengikuti analisis teori Pilihan Rasional tersebut di atas, maka migrasi TKI yang sukses maupun yang gagal di negara tujuan, sesungguhnya merupakan resiko dari pilihan rasional yang mereka ambil.

Penelitian yang memusatkan pada obyek Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur ini, telah memilih lokasi penelitian di desa Tanggul Turus dan Tanggul Welahan Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung; desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo dan desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ; serta desa Jayuhan dan desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pemilihan tiga kabupaten dan enam desa ini didasarkan pada tersedianya responden (*Availability sampling*), yakni TKI yang sedang pulang dari bekerja di luar negeri (*return migrant*). Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur, sedangkan jumlah responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini ada sebanyak 300 orang. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS untuk menghasilkan tabel-tabel frekuensi sekaligus sebagai alat bantu analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; mayoritas (55,3 %) TKI yang diteliti pernah bekerja antara 2-3 tahun, sedangkan lainnya pernah bekerja antara 4-10 tahun di luar negeri. Tujuan utama bekerja menjadi TKI di luar negeri sebagian terbesar (2,3 %) mengaku untuk meningkatkan taraf hidup dan pergi atas keinginan sendiri, dan dengan dukungan keluarganya.. Faktor penarik bagi sebagian besar (66,3 %) responden yang memutuskan menjadi TKI ke luar negeri adalah karena gaji yang ditawarkan di luar negeri sangat besar ; serta karena sukses migrant lama yang lebih dahulu menjadi TKI.. Sebagian besar (80,7 %) TKI dalam penelitian ini bermigrasi secara legal, yang ditandai oleh kepemilikan dokumen ke Emigrasian yang sah, baik yang diurus oleh pemerintah (52 %) maupun yang diurus oleh *Teikong* (28,3 %). Hanya sekitar 19,3 % TKI dalam penelitian ini yang mengaku beremigrasi secara ilegal yakni tanpa membawa dokumen keemigrasian yang sah, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Jumlah TKI yang tergolong sukses di luar negeri ada sebanyak 84 % (252 orang), sedangkan sisanya 16 % (48 orang) mengaku gagal bekerja di luar negeri. Dari 84 % yang merasa sukses bekerja di luar negeri antara lain; karena bidang pekerjaannya sangat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki saat di daerah asal (21 %), karena gaji atau upah yang besar (61 %); dan karena pembayaran gaji tepat waktu (18 %) Sementara itu, mereka yang gagal di luar negeri (16 %) mengaku karena : upah tidak pernah dibayar , memainkan *Teikong/Majikan* kemudian dideportasi sebelum menerima gaji ; dan gaji tidak dibayar untuk mengganti kerusakan barang milik majikan saat bekerja, terutama majikan yang tidak manusiawi .

Efek multiplier yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri, antara lain; tumbuhnya usaha-usaha jasa PJTKI di desa asal (Tulungagung, dan Wonorego); usaha bengkel sepeda motor, *Grai Hand Phone*, *Money Changer*, toko-toko yang menyediakan barang-barang elektronik dan bahan bangunan sampai ke tingkat desa. Tetapi di pihak lain, pola konsumsi keluarga TKI, berubah menjadi amat konsumtif.

*kata kunci = migrasi internasional ; Tenaga kerja Ind.*

Program Studi Sosiologi-FISIP, Unair; Kontrak Nomor : 036 SPPP/PT-PM/DP3M/IV/2005)

## SUMMARY

### INTERNATIONAL MIGRATION OF INDONESIAN WORKERS (TKI) FROM EAST JAVA : A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF SUCCESSFUL AND FAILURE OF TKI IN ABROAD

(I.B.Wirawan, Tuti Budi Rahayu, Siti Mas'udah, 2005 : 119 pages) \*

The problem of international migration that done by rural people from East Java, no usually called TKI (Indonesian Workers), is rise up as examination stuff, because it not only interesting for criticize, but also very important. It is because they burden any problems, such as they have not a strong bargaining position in facing wage discrimination, exploitation action, harsh action and Human Right violence in origin or destination countries. During this time, both the government of Indonesia (in this case Ditjen Binapenta Depnaker) and TKI's Service Institution, and APJATI, institutionally, in not protection toward any kind of Human Right violence faced by these TKI's. However, many of them also achieved a successful. This is proof by the big remittances that they send to their village origin.

By seeing this fact, some parties said that government should immediately stop delivering TKI's into abroad, while the other parties judge that it is not smart solution to stop it, especially when the condition of internal employment full with unemployment. Because of this background and reason, this research performed to find the answer of the subject matter of what factors that support the successful of TKI's, and what factors that make a failure for TKI's in abroad, and how far the multiplier effect that rise in village origin as a result of delivery TKI's into overseas. Generally, this research has an aim to find the empirical proves about various factors that causes why there is a successful TKI's and failure one, and what is the multiplier effect that rise in origin.

Even though, there are many theoretical explanations about the migration process with their motives in doing moving on the individual level, this research done from postulate of "Rational Action Theory" from Max Weber. This theory is viewed more appropriate for this study. According to Heckathorn, a choice is a rational action. However, this is different with the theory of classical micro economy that sees rational action just only to

maximize a profit or earning (Ritzer and Smart, eds., 2001 :274) In rational action theory the motive to act is more based on the altruistic and egoistic goals that complicated. Beside that, rational action theory also that rationality has its own limitations. It means that sometimes a rational action has unexpected result, and even that result not anticipated before. According to Heckathorn, all is happened because the limitation of human ratio in gaining and managing information (Ritzer and Smart, eds., 2001 : 274) By following the theory analysis of above Rational Action, so the successful and the failure TKI's in destination countries, really, is the risk from rational action that they taken. This research that focus on the Indonesian Workers from East Java , has to select research location in six villages of three Regencies (Tulung agung, Ponorogo and Pacitan) based on the *availability sampling* technic that was return migrant. Data gathered by using semi structured questionnaires , while the number of respondents that succeed to interviewed in this research are 300 persons TKI's . Data processing was done by using SPSS program of computer, to make frequencies tables and as an auxiliary tool for analysis.

This result research shows that majority of examined TKI's (55.3 %) have work 2 to 3 years, while the others work between four to more than 10 years in abroad. The purpose to work abroad, most part of them (62.3 %) was to increase their earning, either supporting come from their family or return migrant. Information to work abroad, half of them (59.7 %) is from return neighbors and relatives (17.6 %) that gain successful in overseas. Most of TKI's (80.7 %) on this research migrate legally that known by the ownership of emigration documents, either managed by PT PJTKI (52 %) or managed by their Teikong (28.3 %). Only 19.3 % TKI's in this research confess migrated illegally, they not bring a legal document, and they work as house servant.

The number of successful TKI's abroad is 84 % (252 persons); while the rest is 16 % (48 persons) confess fail to work in abroad. The factors that causes they reach successful are their work field is appropriate with their expertise (21 %), because of big wages (61 %), and because of on time wages payment (18 %). While for those who fail in abroad, confess that they never pay (20 %), deceived by *Teikong*/employer then deportation before accept the wages (35 %), and wage is loss because change the employer's broken things, when they work especially on the rough employers (23 %)

multiplier effect that rise as a result of delivery TKI's into overseas are the growth of TKI service in village origin , (Tulungagung and Ponorogo) ; motor workshop service, mobile phone outlet, money changer, and shops that provide electronic product and materials. Moreover, on the other hand, there is a change pattern of consumption on TKI's family, that is, they more consumptives. This is feel strongly on the villages that succeed to delivered TKI's abroad.

- Sociology Department, Faculty of Social and Political Sciencess, Airlangga – University ; Contract Number : 036 SPPP/PT-PM/DP3M/IV/2005.

MIGRASI INTERNASIONAL TENAGA KERJA INDONESIA  
ASAL JAWA TIMUR;STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TKI  
DI LUAR NEGERI \*)

I.B.Wirawan, Tuti Budi Rahayu dan Siti Mas'udah \*\*)

**ABSTRAK**

Meskipun banyak berita yang memilukan tentang TKI dalam dekade terakhir, tetapi ide untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, bukanlah solusi yang cerdas, pada saat kondisi negara sarat pengangguran. Penelitian ini dikerjakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang ; faktor-faktor apa yang menyebabkan sebagian TKI sukses di luar negeri, dan mengapa sebagian TKI gagal bekerja di luar negeri. Untuk tujuan itu, telah diwawancarai sebanyak 300 orang TKI yang sedang mudik dengan cara *availability sampling* di tiga kabupaten di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar TKI bekerja secara legal dan sebagian kecil yang bekerja secara illegal di luar negeri. Faktor-faktor yang menyebabkan TKI sukses ; karena, jenis pekerjaan di luar negeri cocok dengan keterampilan sebelumnya yang dimiliki TKI; gaji yang besar, dan pembayaran gaji tepat waktu. Sementara mereka yang gagal disebabkan oleh; gaji yang tidak pernah dibayar oleh majikan ; dan karena dipermainkan oleh *Teikong* dan majikan, akhirnya dideportasi, serta karena, gaji habis untuk ganti rugi kerusakan barang milik Majikan saat bekerja.

Kata-Kata Kunci : Keberhasilan, kegagalan , TKI legal, TKI ilegal, *Teikong*.

**ABSTRACT**

Although there are many sad stories about TKI's in the last decade, but to stop it in broad is not a smart solution, mainly when condition of our country is worse, large unemployment. This research performed to answer the subject matter of what factors that causes part of TKI's succeed and part of the other failure in work abroad. For that reason, we have interviewed 300 return migrants (TKI's) by availability sampling technic in three Districts in East Java Province. The result of research show that part of TKI's working legally and small of them working illegally in abroad. Factors that cause TKI's achieved the successful are the type of work in target country is appropriate with their expertise, big wages, and on time wages payment. While for the failure one, are unpaid wages by employer, and deceived by *Teikong* and employer so that they were deportation, and the last, their wages is empty because to change the loss of their employer's thing that they broke when work.

Key words : Successful, Failure, Legal TKI, Illegal TKI, *Teikong*.

) Dibiayai oleh Ditbinlitabmas Dirjen Dikti Depdiknas

\*) Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa laporan akhir penelitian Dasar berjudul "Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Timur : Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan TKI di Luar Negeri" ini telah dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesungguhnya banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim peneliti di lapangan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Jadwal waktu kegiatan yang terlambat, lokasi penyebaran TKI yang sangat luas dan terpencar-pencar, dan informasi keberadaan TKI yang mudik kurang dikenal; serta musim hujan, semuanya telah turut mempengaruhi upaya tim ini untuk memahami persoalan TKI yang kompleks itu serta hasil penelitian ini.

Meskipun demikian, banyak pihak telah ikut membantu menyelesaikan masalah di lapangan, baik secara langsung maupun tak langsung, dan untuk itu pula atas nama tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada yth:

1. Dirjen Dikti Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dirbitabmas), yang telah memberikan dukungan biaya untuk terlaksananya pekerjaan ini.
2. Prof. DR. H. Sarmanu, MS, serta seluruh staf LPPKM Universitas Airlangga, atas dukungan fasilitas dan administrasi yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
3. Bapak Drs. Soemindyo, MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan; yang telah memberikan ijin dan data TKI di wilayah masing-masing.

## KATA PENGANTAR

Drs. I.B. Wirawan, SU  
NIP. 130 701 136

Ketua,

Atas nama Tim Peneliti

Surabaya, 21 Juli 2005.

4. Seluruh responden di desa Keboireng, Tanggulturus, Tanggul  
Jatmalang dan desa Krajan Wetan, atas kerjasamanya memberikan  
data primer yang dibutuhkan tim peneliti.

5. Seluruh asisten lapangan (Iulusan Sosiologi, angkatan 2000: Erva,  
Tutung, Luluk, Nia, dan Uut) yang telah membantu tim dalam  
pengumpulan data primer dan sekunder di tiga Kabupaten, terima  
kasih atas kerja keras kalian .

Atas segala bantuan dan pengorbanannya dalam membantu Tim selama  
berada di Lapangan, sekali lagi atas nama seluruh peneliti, mengucapkan  
banyak terima kasih.

Semoga laporan yang disajikan seperti bentuknya saat ini, dapat  
memenuhi tujuan dilaksanakannya studi ini.

**DAFTAR ISI**

<b>Judul</b>	<b>halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang Penelitian.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.Perumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.Manfaat Hasil Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.6.Metode Pelaksanaan Penelitian.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II. DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1.Kabupaten Tulungagung.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.Kabupaten Ponorogo.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3.Kabupaten Pacitan.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB III. DESKRIPSI RESPONDEN DI TIGA KABUPATEN.....</b>	<b>51</b>
<b>3.1.Karakteristik Responden.....</b>	<b>51</b>
<b>3.2.Kondisi Keluarga Sebelum Menjadi TKI.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV. FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TKI DI LUAR NEGERI.....</b>	<b>66</b>
<b>4.1.Proses Migrasi TKI ke Luar Negeri.....</b>	<b>66</b>
<b>4.2.Faktor Penentu Keberhasilan atau Kegagalan TKI.....</b>	<b>84</b>
<b>4.3.Dampak Migrasi Bagi Keluarga di Daerah Asal.....</b>	<b>98</b>

<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>109</b>
<b>5.1. Keberhasilan dan Kegagalan TKI.....</b>	<b>109</b>
<b>5.2. Saran-Saran.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN II .....</b>	<b>121</b>

\*\*\*

**DAFTAR TABEL**

**Judul** **halaman**

<b>Tabel 2.1. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2.2. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2.3. Angkatan Kerja yang Disalurkan Menurut Lapangan Pekerjaan 1999-2003 .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 2.4. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2003.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 2.5. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2003.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 2.6. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Ponorogo Akhir Tahun 2003.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 2.7. Komposisi Penduduk Ponorogo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 2.8. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 1999-2003.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 2.9. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 1999 - 2003.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 2.10. Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2003 .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 2.11. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Per Kecamatan.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 2.12. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Per Kecamatan (lanjutan).....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 2.13. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2003.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3.1. Desa Asal Responden (N=300) .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 3.2. Jenis Kelamin Responden (N=300).....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3.3. Usia Responden Saat Ini (N=300).....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3.4. Usia Saat Menjadi TKI (N=300).....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3.5. Status Pernikahan (N=300).....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3.6. Usia Pernikahan (N=300).....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3.7. Jumlah Anak (N=300).....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3.8. Kepemilikan Pekerjaan Sebelum Menjadi TKI.....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 3.9. Jenis Pekerjaan (N=300).....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 3.10. Besar Penghasilan Per Bulan Sebelum Menjadi TKI (N=101).....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3.11. Penghasilan Untuk Biaya Hidup Keluarga (N=101).....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 3.12. Penjamin Biaya Hidup Responden Sebelum Menjadi TKI (N=199) .....</b>	<b>59</b>

Tabel 3.13. Status Responden Dalam Rumah Tangga (N=300).....	59
Tabel 3.14. Penggunaan Penghasilan Responden Bukan Kepala Keluarga (N=200) .....	60
Tabel 3.15. Kepemilikan Rumah Sebelum Menjadi TKI (N=300) .....	61
Tabel 3.16. Kepemilikan Sawah Sebelum Menjadi TKI (N=300).....	61
Tabel 3.17. Tingkat Pendidikan Responden (N=300) .....	62
Tabel 3.18. Bahasa Yang dikuasai Responden (N=300).....	63
Tabel 3.19. Keterampilan Yang Dimiliki Responden Sebelum Menjadi TKI (N=300).....	64
Tabel 4.1. Lama Bekerja Di Luar Negeri (N=300) .....	67
Tabel 4.2. Inisiatif Bekerja Di Luar Negeri (N=300).....	68
Tabel 4.3. Asal Informasi Lowongan Pekerjaan Di Luar Negeri (N=300) .....	69
Tabel 4.4. Prasyarat ke Luar Negeri (N=300) .....	69
Tabel 4.5. Tingkat Kesulitan Pengurusan Persyaratan (N=300) .....	70
Tabel 4.6. Pihak yang Mengurus Persyaratan Kerja Ke Luar Negeri (N=300).....	71
Tabel 4.7. Biaya Untuk Membayar Persyaratan (N=300).....	72
Tabel 4.8. Cara Melunasi Biaya ke Luar negeri (N=228).....	72
Tabel 4.9. Cara Memperoleh Biaya ke Luar Negeri (N=228) .....	73
Tabel 4.10. Cara Berangkat ke Luar Negeri (N=300).....	73
Tabel 4.11. Negara Tujuan TKI Pertama Kali (N=300).....	74
Tabel 4.12. Pekerjaan Utama di Luar Negeri (N=300).....	75
Tabel 4.13. Kepemilikan Surat Kontrak Kerja (N=300).....	76
Tabel 4.14. Menyimpan Surat Kontrak Kerja (N=232).....	76
Tabel 4.15. Perlakuan Majikan di Tempat Kerja (N=300).....	77
Tabel 4.16. Pernah Tidaknya Pindah Pekerjaan (N=300).....	77
Tabel 4.17. Jarak Antara Pekerjaan Pertama ke Pekerjaan Ke Dua (N=57).....	78
Tabel 4.18. Gaji yang Diterima Pertama kali Bekerja di Luar Negeri.....	79
Tabel 4.19. Kesesuaian Gaji dengan Kontrak yang Disepakati.....	80
Tabel 4.20. Jalur yang Ditempuh (N=300).....	81
Tabel 4.21. Diasramakan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri (N=256).....	82
Tabel 4.22. Lama Dipenampungan (N=149).....	82
Tabel 4.23. Biaya yang Dikeluarkan TKI Sampai Memperoleh Pekerjaan (N=300) .....	83
Tabel 4.24. Tujuan Utama Bekerja Sebagai TKI di Luar Negeri.....	84
Tabel 4.25. Faktor Penarik Bekerja di Luar Negeri.....	85
Tabel 4.26. Perlakuan Majikan Saat Bekerja (N=300).....	86
Tabel 4.27. Faktor Utama yang Membuat Responden Bertahan di Luar Negeri (N=300).....	87
Tabel 4.28. Rencana Bekerja Kembali ke Luar Negeri (N=300).....	88
Tabel 4.29. Besar Gaji Terakhir Menjadi TKI (N=300).....	89

Tabel 4.30. Kontinuitas Pembayaran Gaji per Bulan (N=300).....	90
Tabel 4.31. Alasan Memilih Jalur Tidak Resmi (N=48).....	90
Tabel 4.32. Maksud Kepulangan ke Tanah Air (N=300).....	91
Tabel 4.33. Faktor Penarik Kembali ke Luar Negeri (N=111).....	92
Tabel 4.34. Alasan Tidak Kembali ke Luar Negeri (N=189).....	93
Tabel 4.35. Penilaian Responden tentang Keberhasilan (N=300).....	94
Tabel 4.36. Faktor yang Menyebabkan Kurang/Tidak Berhasil (N=48).....	94
Tabel 4.37. Faktor Keberhasilan Bekerja di Luar Negeri (N=252).....	95
Tabel 4.38. Perhatian KBRI,PJTJKI,Depnaker atau APJATI.....	96
Tabel 4.39. Cara TKI Mengatasi Perselisihan Kerja (N=300).....	96
Tabel 4.40. Meminta Surat Perjanjian Kerja Tertulis (N=300).....	97
Tabel 4.41. Cara Pengiriman Uang ke Tanah Air (N=300).....	98
Tabel 4.42. Rata-Rata Penghasilan yang Dikirim Ke Tanah Air (N=300).....	99
Tabel 4.43. Penggunaan Uang yang Dikirim ke Tanah Air (N=288).....	100
Tabel 4.44. Bentuk Hasil Jerih Payah Selama di Luar Negeri (N=300).....	101
Tabel 4.45. Keuntungan atau Kerugian TKI (N=300).....	101
Tabel 4.46.Keuntungan Secara Ekonomi (N=300).....	102
Tabel 4.47. Keuntungan Secara Sosial (N=300) .....	103

\* \* \*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Sensus Penduduk tahun 1971, orang Indonesia yang bertempat tinggal di luar Propinsi kelahirannya hanya 5 % dari seluruh jumlah penduduk. Ini berarti, migrasi antar daerah sebagai fenomena kuantitatif demografis pada saat itu -- relatif kurang penting bagi Indonesia (Titus, M., 1988 : 34) Tetapi sejak Indonesia mencapai perkembangan ekonomi yang relatif maju pada tahun 1994 \*, arus perpindahan penduduk terutama dari desa ke kota dan daerah lainnya, terus meningkat sepanjang tahun (Tjiptoherijanto, P., 1997 : 2) Para peneliti dan ahli kependudukan pada periode 1970-an hingga menjelang 1990-an lebih memusatkan perhatiannya pada migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk antar propinsi atau dalam satu propinsi, khususnya pola migrasi desa-kota yang sedang tumbuh (lihat: Naim, 1979 ; Hugo, 1975 ; Mantra, 1979 ; Titus, 1988 ; dan Goldstein, 1980). Hal ini pula yang diduga menjadi sebab mengapa studi-studi migrasi internasional, terutama yang mengkaji tentang proses pengambilan keputusan di tingkat individu masih belum banyak dikerjakan oleh peneliti Indonesia sendiri (Eki, Ayub. T., 2002)

\* Sebelum Repelita I dicanangkan, situasi perekonomian di Indonesia sangat tidak menggembirakan. Pendapatan perkapita tahun 1961 - 1966, laju inflasi pada periode tersebut mencapai 330 %. Demikian pula pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) tergolong sangat rendah yaitu hanya mencapai 2,1 % pertahun. Tentang penjelasan yang lebih rinci mengenai Perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan demografi di Indonesia pada saat itu, lihat selanjutnya uraian Priyono Tjiptoherijanto (1997 : 2 - 13).



Bahwa, mobilitas penduduk desa-kota seperti apa yang diuraikan di muka itu, sebenarnya sejalan dengan teori peralihan mobilitas penduduk dari Wilbur Zelinsky yang menyatakan bahwa, ada hubungan yang signifikan antara jenis dan tinggi rendahnya mobilitas geografis dengan fase modernisasi suatu masyarakat (Zelinsky, 1971 : 5). Bahkan kemudian muncul kekhawatiran kalangan para ahli ilmu sosial dan demografi pada periode itu, bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota sebagai akibat langsung maupun tak langsung dari proses modernisasi ekonomi dan industrialisasi perkotaan – bahkan menyebabkan beberapa kota di sejumlah negara sedang berkembang, menghadapi tekanan kepadatan penduduk yang luar biasa besar dan membawa permasalahan yang amat kompleks. Tahun 1985, kota Bandung misalnya; diproyeksikan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4,1 juta jiwa; kemudian Sao Paulo (Brazil) diperkirakan akan memiliki jumlah penduduk 6,8 juta jiwa; sementara kota Jakarta diperkirakan akan mendekati jumlah penduduk kota Bombay (India) dengan 12,1 juta jiwa penduduk pada akhir abad 21 (lihat; Todaro, 1978; Titus, 1982 dan Nasikun, 1984 )

Kekhawatiran para ahli tersebut nampaknya memang beralasan, karena dampak dari urbanisasi berlebih seperti yang digambarkan oleh Nasikun (1984) lebih banyak menimbulkan sisi buruknya, dibanding sisi positifnya, baik dilihat dari sisi kehidupan migran sendiri di kota dan daerah asalnya maupun dari sisi kebijakan penataan ruang kehidupan perkotaan dimasa depan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, antara periode 1971 – 2000, distribusi beberapa kota tertentu di Indonesia cenderung bergerak kearah sistem perkotaan yang terpadu. Perkembangan kota-kota di Indonesia

terutama di Jawa dan Sumatra) cenderung mengarah ke daerah-daerah “mega urban”. Beberapa contoh dari pola perkembangan ini adalah munculnya kota Jabotabek” yang meliputi kota-kota Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi; kemudian di Sumatra; Medan – Lumbuk Pakam – Binjai – Stabat – Tebing Tinggi; begitu pula Bandung cenderung bergabung dengan kota Cimahi – Bandung – Banjaran – Majalaya, lalu Semarang – Kendal – Demak – Unggaran – Salatiga, sedangkan di Jawa Timur dengan konsep Gerbangkertosusila meliputi; Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Tjiptoherijanto, 1997 : 59).

Demikian pesat perkembangan kota-kota di Pulau Jawa khususnya, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari migrasi desa – kota, maka sangatlah beralasan jika perhatian para peneliti dan pemerintah saat itu masih terpusat pada masalah-masalah migrasi dalam negeri (internal). Oleh karena itu, alasan mengapa isue ini penting diangkat menjadi bahan kajian dalam usulan ini adalah; Pertama, peneliti-peneliti yang memusatkan pada masalah migrasi internasional masih relatif sedikit, walaupun Pemerintah Indonesia c.q. Departemen Tenaga Kerja, setelah tahun 1975 secara resmi mulai melakukan “pengiriman” Tenaga Kerja Indonesia (yang umum disebut TKI) ke luar negeri (lihat: Mantra, Kasto dan Jeremias T Keban, 1999 : 1). Kedua, beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa, penelitian migrasi internasional di Indonesia, apalagi yang ilegal masih sangat sedikit dikerjakan oleh peneliti Indonesia (lihat : Tjiptoherijanto, Bandiyono dan Alihar dalam Sukamdi, Abdul Haris dan Petrick Brownlee, 1999 : 63 – 117). Ketiga, adanya fakta bahwa; migrasi penduduk dari pedesaan Jawa ke luar negeri ini -- tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja laki-laki, akan tetapi tenaga kerja wanita pun

udah banyak melakukan hal yang sama (Spaan,1999) -- dan hal ini dapat menjadi paradoks bagi hukum migrasi E.G.Ravenstein (1885) yang perlu dibuktikan. Tahun 1885, Ravenstein pernah merumuskan tujuh hukum migrasi dan satu di antaranya menyatakan bahwa; "para wanita cenderung bermigrasi jarak pendek, sedangkan laki-laki cenderung bermigrasi jarak jauh" (Munir, Rozy; dalam Wirosuhardjo, 1981: 122) Keempat, semakin banyak wanita di pedesaan yang teremansipasi dan kemudian keluar dari " tembok tradisi " hegemoni patriarki yang selama ini membatasinya dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Kenyataan ini dapat dilihat dari kecenderungan wanita desa yang mulai meninggalkan peran-peran domestiknya dengan cara bermigrasi ke kota-kota besar (lihat: Wattie,Anna M., ed; 2002 dan Heatler Carol.B., 1981) termasuk bekerja di luar negeri.

Atas dasar kenyataan dan alasan tersebut, permasalahan migrasi internasional yang dilakukan oleh para TKI khususnya penduduk asal pedesaan di Jawa Timur ini diangkat sebagai bahan kajian -- karena tidak hanya menarik untuk dikritisi -- tetapi juga penting dikaji, mengingat berbagai persoalan telah menimpa mereka antara lain; para TKI ini tidak punya posisi tawar yang kuat dalam menghadapi diskriminasi upah, tindakan eksploitasi sampai pada tindak kekerasan, pelecehan seksual, pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum di negara tujuan. Bahwa selama ini baik Pemerintah Indonesia (c.q.Ditjen Binapenta), maupun lembaga Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Asosiasi Pungusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) secara kelembagaan belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan, terhadap berbagai masalah yang menimpa TKI (khususnya TKW) ini di luar negeri (Jawa Pos,1 Februari 2002 : 8) meskipun disisi lain,

imbangan devisa yang diberikan oleh para TKI yang bekerja di Malaysia saja misalnya, untuk Jawa Timur, tidak kurang dari USD 568,000.- pada tahun 2001 (Disnaker-Jawa Timur,2001)

Permasalahan emigran Tenaga Kerja Indonesia tersebut, tidak hanya dialami -- setelah mereka berada di negara tujuan, akan tetapi ketika di dalam kamp Penampungan dan perjalanan menuju negara tujuan pun -- ancaman dapat muncul secara tidak terduga. Contoh mengenai ancaman ini dapat diingat dalam peristiwa tenggelamnya Kapal Tongkang pada Kamis malam tanggal 24 Agustus 2000 di perairan selat Malaka yang menewaskan 70 penumpang dari 104 orang penumpangnya yang seluruhnya akan bekerja sebagai TKI di Malaysia (lihat; Jawa Pos, Sabtu 26 Agustus 2000 : 1). Persoalan tidak berhenti sampai disitu, sebab secara kultural ada pembatas dan bahkan peraturan tertulis bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dinyatakan dalam *Fatwa* Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir Juli 2000 yang lalu. Intinya bahwa, "adalah haram hukumnya (*Fatwa Haram*) mengirim TKW ke luar negeri tanpa didampingi oleh *Mukrimnya*" (Republika ,30 Juli 2000 :2).

Berdasarkan data yang tersedia, TKI yang bekerja di luar negeri, baik legal maupun yang ilegal lebih banyak melibatkan tenaga kerja wanita (TKW). Hal ini juga sudah diakui oleh Khofifah Indar Parawansa (saat itu Menteri Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN) sebab sekitar 70 % dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari wanita (TKW). Dari jumlah tersebut, ada sekitar 60 % di antaranya bekerja di sektor informal yaitu sebagai pembantu rumah tangga atau inang pengasuh (*Baby Sitter*) dan sebagainya. Diakui pula oleh Khofifah, bahwa karena keterbatasan

manajerial, maka jaminan perlindungan terhadap (TKW) hampir tidak ada (Kompas, 11 Juli 2000: 10). Persoalan yang justru lebih ironis lagi adalah, pengiriman tenaga kerja wanita yang berlatar belakang ikatan primordial agama (Islam) ke Arab Saudi secara legal (resmi). Di negara yang dianggap sebagai tumpuan harapan baik dilihat dari sisi "*Keimanan*" (karena menganut keyakinan yang sama) maupun dari sisi ekonomi (baca: *income*), ternyata tidak ada kepastian akan jaminan perlindungan hukum terhadap para TKW ini. Hukum "*pancung*" bagi empat orang TKW di kota Riyadh misalnya; adalah merupakan satu bukti masih lemahnya perlindungan hukum itu. Bahkan Pemerintah Indonesia c.q. KBRI di Riyadh pernah menolak membuat kerjasama perlindungan TKI dengan Pemerintah Arab Saudi (Surabaya Post, 6 Juli 2000: 3). Nampaknya, kenyataan ini pula yang mendorong Din Syamsuddin (mantan Ditjen Binapenta – Depnaker) untuk mengusulkan kepada Pemerintah R.I. agar menghentikan sementara pengiriman TKW/TKI ke Arab Saudi (Surabaya Post, 3 Juli 2000 : 2).

Meskipun demikian, selama Repelita VI, pemerintah Indonesia telah menargetkan 1,2 juta tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Antara tahun 1969 – 1993 yang lalu, pemerintah Indonesia telah berhasil mengirimkan 877.310 TKI ke luar negeri, dengan rincian; 62,9 % ke Arab Saudi; 19,7 % dengan tujuan Malaysia; dan 6 % di kirim ke Singapura. Dalam tahun 1996 tidak kurang dari 220.162 TKI yang telah mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri (Tjiptoherijanto, P., 2000 : 67-8).

Dari data sebagian kecil yang ditunjukkan ini, sekali lagi memperlihatkan, betapa besarnya minat penduduk dari pedesaan untuk mencoba ikut 'mengadu' untung di negari orang, meskipun resiko yang harus

hadapi juga tidak dapat dikatakan ringan. Salah satu daya tarik dari migrasi internasional ini adalah, karena sukses migran "lama" di negara tujuan, yang dapat dilihat dari kriteria ekonomi (*remittance*) yang mereka kirimkan ke daerah asalnya. Besarnya remitan bergantung pada negara tujuan dan cara mereka beremigrasi (legal ataukah ilegal). Herwanti (1996) menemukan bahwa TKI yang beremigrasi ke Malaysia rata-rata hanya mampu mengirim remitan sebesar Rp.231.400,- per bulan atau Rp. 2.776.800,- per tahun, sementara TKI yang bekerja di Arab Saudi mampu mengirim remitan hampir tiga kali lipat. Remitan yang dikirim oleh TKI legal jauh lebih besar dibandingkan dengan TKI ilegal (Mantra, Kasto dan Jeremias T Keban, 1999: 64) Ramli (1996) menunjukkan data remitan dari dua Bank BUMN di Pulau Lombok, yang dikirim oleh TKI (baik legal maupun ilegal) selama Oktober sampai Desember 1995 rata-rata mencapai Rp. 9,25 miliar per bulan. Dengan rata-rata remitan sebesar itu, dalam tahun 1995 saja jumlah remitan yang masuk ke P. Lombok mencapai Rp. 111,106,8 miliar. Data tersebut juga menunjukkan bahwa, hanya TKI yang bekerja secara legal yang mampu mengirim remitan dalam jumlah besar tersebut, sementara TKI ilegal umumnya tidak mampu mengirim remitan dalam jumlah besar. (Mantra, Kasto dan Jeremias T Keban, 1999: 65)

Salah satu faktor penyebab rendahnya remitan yang dikirim oleh para TKI ilegal adalah karena mereka terjebak dalam kekuasaan para *Teikong* (calo Naker) yang mengeksploitasi dan memeras para TKI ilegal ini untuk membayar pungutan di tempat-tempat simpul rawan sepanjang perjalanan, dan perlakuan yang sama juga dialami ketika mereka kembali ke daerah asal (Mantra, Kasto dan Jeremias T Keban, 1999: 65) Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan para TKI baik yang bekerja secara legal maupun yang ilegal

tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian sehingga diperoleh data yang akurat tentang mengapa TKI yang satu sukses tetapi TKI yang lain gagal, dan seberapa besar dampak ekonomi dari migrasi internasional terhadap daerah asalnya.

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang dan realitas sebagaimana diuraikan di atas, kajian ini dikerjakan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian sebagai berikut ;

1. Berapa persen sebenarnya proporsi dari mereka yang berhasil dan mereka yang gagal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; yang berasal dari wilayah pedesaan Jawa Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan TKI dan faktor penyebab kegagalan TKI yang bekerja di luar negeri yang berasal dari Jawa Timur ?
3. Seberapa jauh efek multiplier yang timbul di daerah asal sebagai akibat dari pengiriman TKI ini ke luar negeri ?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Secara umum studi ini bertujuan untuk menemukan data yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, mengenai faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan para TKI yang bekerja di luar negeri, dan bagaimana sesungguhnya perbandingan atau komposisi mereka antara yang gagal dan yang berhasil menjadi TKI di luar negeri.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Menggali informasi tentang karakteristik demografis, sosial-ekonomi , para emigran yang berasal dari kantong-kantong TKI di Jawa Timur, serta proses emigrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh para TKI tersebut.
2. Mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan TKI yang berasal dari Jawa timur yang menyangkut proses migrasi ke luar negeri baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan juga kegagalan para TKI selama mereka bekerja di luar negeri, serta faktor-faktor penyebab kegagalan mereka dan faktor yang mendukung keberhasilan selama mereka bekerja di luar negeri, menurut ukuran ekonomi.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN.**

1. Dengan temuan tersebut di atas, secara lebih spesifik diharapkan akan dapat diketahui berbagai persoalan yang menyangkut proses migrasi (perekrutan, penampungan, pendistribusian, pengawasan serta perlindungan) TKI ke dan setelah mereka berada di negara tujuan migrasi, serta efek multiplier yang ditimbulkan oleh migrasi TKI ke luar negeri .
2. Sementara itu, dalam tataran praktis ; hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan penyusunan sinergi kebijakan antara Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan

terkait; khususnya yang menyangkut perekrutan, pengiriman, pendistribusian, pengawasan dan perlindungan TKI ke luar negeri dimasa yang akan datang.

## 5. TINJAUAN PUSTAKA.

### 5.1. Pendekatan Teoritik Dalam Migrasi Internasional .

Selama ini, gejala migrasi tenaga kerja sangat lazim dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan yang sudah dikenal yaitu: (1) pendekatan teori ekonomi (lihat:De Jong and Todaro, M.P.; dan DaVanzo, J., dalam De Jong and Robert Gardner (eds),1981); (2) pendekatan Psikologi yang menganalisis motif-motif orang untuk berpindah (lihat: De Jong and James F.Fawcett, 1978 dan Wolpert, J.1966) dan(3) teori-teori persepektif demografi dan geografi yang bersumber dari hukum grafitasi E.G. Ravenstein. Teori-teori yang bersumber dari Ravenstein ini sangat menekankan pada faktor pendorong dan penarik migrasi, yang ditulisnya pada tahun1885 dan menjadi dasar bagi pengembangan analisis-analisis migrasi selama beberapa dekade (lihat : Lee, E.S., 1970; Hugo,G., 1975a ; Mantra, 1981 dan Naim, M.,1979)

Demikian pula dengan teori-teori pengambilan keputusan bermigrasi, selama ini masih di dominasi oleh teori-teori yang bersumber dari paradigma ekonomi, psikologi, demografi dan atau geografi.Dalam hal ini dapatlah ditunjukkan beberapa teori yang mengacu pada paradigma ekonomi, misalnya; teori *Neoclassical Economic Macro* yang menjelaskan perpindahan para pekerja dari negara yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal menuju ke negara yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki modal besar (Massey, dkk.,1993;1998 dan Hugo.,1996d)

Selain itu, ada juga teori *Neoclassical Economic Micro*, yang menyarankan kepada para migran potensial agar dalam pengambilan keputusan bermigrasi mempertimbangkan biaya dan keuntungan perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan daerah asalnya (Massey, 1993: 434) Teori lainnya adalah; teori *Segmented Labour Market*, yang menyatakan bahwa, pekerja melakukan migrasi karena ditentukan oleh tingginya permintaan pasar kerja di negara lain (Todaro, 1997; Massey, dkk, 1993; dan Abella, 1995) Dalam teori ini faktor ketertarikan pasar tenaga kerja -- jauh lebih dominan dibandingkan dengan faktor dorongan untuk berpindah oleh sebab lain dari daerah asal. Beberapa ahli telah membuktikan hal ini, bahwa kesempatan kerja yang luas di Sabah - Malaysia menyebabkan tingginya permintaan terhadap pekerja emigran tanpa skill dari berbagai faktor lain (Miller, 1995 ; Hugo, 1995b; dan Chin, 1997) Menurut Chin, di Sabah tingkat upah pekerja sangat rendah dan kondisi pekerja juga sangat memprihatinkan, dibandingkan dengan tingkat upah dan kondisi kerja di negara bagian lain di Malaysia. Akibatnya, tenaga kerja lokal enggan bekerja di Sabah, dan hal ini mendorong permintaan tenaga kerja asing tanpa skill menjadi tinggi. Hasil penelitian Eki, A.T, (2002) menunjukkan bahwa TKI yang bekerja ke Sabah; ternyata bukan disebabkan oleh faktor ketertarikan, akan tetapi lebih oleh faktor keterpaksaan -- sebab kondisi di Flores Timur sangat miskin sumber daya alam.

Dalam konteks pengambilan keputusan bermigrasi ditingkat individu, sebenarnya ada banyak model pendekatan teoritik yang bisa digunakan, misalnya model Michael P. Todaro (1978). Menurut Todaro, dorongan utama migrasi adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap

keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*) baik dalam arti finansial maupun psikologis. Menurut Todaro; ada dua alasan mengapa seseorang melakukan perpindahan. *Pertama*, meskipun pengangguran di kota bertambah, tetapi seseorang masih mempunyai harapan (*expecting*) untuk mendapatkan salah satu dari sekian banyak lapangan kerja yang ada di kota. *Kedua*, seseorang masih berharap untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan dengan daerah asal. Besarnya harapan diukur dari : (1) perbedaan upah riil antara desa dan kota dan (2) kemungkinan seseorang mendapatkan salah satu jenis pekerjaan yang ada di kota (Sukirno,S.,1978:145) Asumsi Todaro adalah bahwa, dalam jangka waktu tertentu, harapan income di kota tetap lebih tinggi di bandingkan dengan di desa, walaupun dengan memperhitungkan biaya migrasi.

Model lain yang juga banyak dipakai adalah pendekatan *Economic Human Capital*. Ini adalah pendekatan mikro ekonomi yang berasumsi bahwa, seseorang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain, adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di tempat tujuan, Tindakan seperti ini dianalogikan sebagai tindakan melakukan "*investasi*" sumber daya manusia. Prinsip dasar model ini menyatakan bahwa, *investasi* sumber daya manusia sama artinya dengan *investasi* di bidang usaha yang lain. Menurut teori ini, seseorang yang memutuskan untuk berpindah tempat, berarti mengorbankan pendapatan yang "seharusnya" ia terima selama hidupnya di tempat asal (sebut saja = $Y_v$ ), merupakan *opportunity cost* untuk memperoleh sejumlah pendapatan yang jumlahnya lebih besar di tempat tujuan migrasi (sebut saja = $Y_w$ ) Selain *Opportunity cost* untuk perpindahan seperti itu, individu yang bersangkutan juga mengeluarkan biaya langsung dalam bentuk ongkos



transportasi, barang-barang, biaya pemondokan, dan biaya hidup lainnya. Semua biaya tersebut (*opportunity cost* dan biaya langsung) itu dianggap sebagai *investasi* yang melekat pada diri migran. Imbalannya adalah, adanya arus pendapatan yang lebih besar di daerah tujuan, yang tadi dinyatakan dengan  $=Y_w$  (Sukirno, S.,1978 :146)

Teori lain yang juga lazim dipakai di dalam analisis pengambilan keputusan beremigrasi adalah teori; *New Household Economic*. Menurut teori ini, arus migrasi akan membentuk strategi perekonomian rumah tangga guna memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko serta menghilangkan tekanan yang berasal dari kegagalan pasar (Massey,dkk.,1993 dan Hugo.,1996d) Teori ini menjelaskan sebuah wawasan utama dalam pendekatan terbaru bahwa, aturan migrasi tidaklah dibuat oleh individu yang terisolasi, tetapi dibuat oleh sekelompok orang yang saling berhubungan -- semacam kerabat atau keluarga dimana orang-orang akan bertindak secara kolektif (Massey,dkk.,1993 : 438)

Semua pendekatan teoritik yang bersumber dari paradigma ekonomi, psikologi dan demografi sebagaimana di paparkan di atas, sangat lazim digunakan dalam analisis-analisis migrasi, yang lebih banyak memusatkan pada motif-motif ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa dimensi migrasi, terutama mengenai kriteria ruang dan waktu (*space and time*) antara migrasi internal (dalam negeri) dengan migrasi internasional, akan tetapi teori-teori tersebut di atas masih tetap relevan dengan permasalahan yang diteliti pada studi ini.

Nampak ada sedikit kesamaan dengan teori ekonomi yang disebutkan terakhir, teori sosiologi Pilihan Rasional juga dapat dipakai untuk menjelaskan

perpindahan penduduk sementara ke luar negeri, khusus TKI yang berasal dari desa yang diasumsikan menganut budaya kemiskinan. Banyak peneliti menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa, mobilitas penduduk geografis atau konkritnya migrasi desa-kota, adalah merupakan salah satu strategi yang penting bagi rumah tangga miskin di pedesaan untuk “keluar” dari kemiskinannya (lihat: Mantra, 1981; Nasikun, 1984; Todaro, 1978; Hefendi, T.N., 1986 dan Titus, M.J., 1988)

Tidak jauh berbeda dengan itu, perpindahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesungguhnya juga merupakan suatu strategi dari golongan miskin pedesaan dari Jawa Timur dalam dua dekade terakhir – untuk keluar dari kondisi kemiskinannya. Sehubungan dengan itu, untuk menjawab pertanyaan, mengapa TKI yang satu lebih sukses dari yang lain dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mereka dan apakah benar tujuan utama mereka bermigrasi ke luar negeri hanya untuk “melawan kemiskinannya”, akan dicoba dijelaskan melalui teori Pilihan Rasional berikut ini:

#### 1.5.2. Teori Pilihan Rasional.

Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) sering pula disebut sebagai teori tindakan rasional (*Rational Action Theory*) Teori ini pada awalnya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, tetapi kemudian diadopsi pula oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun teori pilihan rasional ini awalnya berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi di dalam sosiologi populer sekitar tahun 1990-an, masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal *Rationality*

and Society pada tahun 1989 dan pendirian Seksi Pilihan Rasional (*Rational Choice Section*) pada tahun 1994 di negara tersebut (Adipitoyo,S.,2003 :25)

Dalam penggolongan Poloma (2000) Teori Pilihan Rasional ada pada perspektif sosiologi naturalistik, yaitu bagian penggunaan matematika dalam teori sosiologi; sedangkan di dalam penggolongan Haralambos dan Holborn (2000: 131-179) tidak dimasukkan; baik pada perspektif struktural, tindakan sosial maupun pada penyatuan pendekatan struktural dan tindakan sosial. Sumber lain menyebutkan bahwa, teori pilihan rasional memang masuk ke dalam kelompok teori sosiologi naturalistik. Akan tetapi, teori ini memiliki kesempatan dalam sosiologi evaluatif, karena dapat digunakan untuk pengukuran pengambilan kebijakan (lihat: Friedman dan Hechter dalam Titzer,G., ed.,1990 : 220)

Menurut Melberg (<http://2home.sol.no/~hmelberg/papers/950520.htm>) model pilihan rasional menjadi berharga dalam analisis sosiologi, karena menyediakan aturan berdasarkan pengalaman dan praktek atau petunjuk praktis, "rule of thumb" tentang bagaimana (mekanisme) suatu tindakan itu dipilih. Akan tetapi, karena pilihan rasional memerlukan banyak faktor, seperti pilihan yang diambil, maka untuk penjelasannya harus dibantu dengan model-model yang lain. Model pilihan rasional sangat penting untuk dipakai menjelaskan pertukaran sosial, dalam arti pemilihan tindakan pada situasi interaktif yang sangat dipengaruhi oleh upaya pemaksimalan menurut tujuan. Model pilihan rasional merupakan mekanisme yang membutuhkan fakta-fakta tertentu yang eksternal (seperti tujuan dan makna dari tindakan) Dalam hubungan ini, teori-teori yang lain, diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan pengertian yang mempengaruhi situasi tertentu (Adipitoyo,S.,2003 :26)

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Huber sebagaimana dikutip oleh Beckathorn (dalam Ritzer dan Smart, eds., 2001: 274) menunjukkan bahwa, sosiologi pilihan rasional mencakup sebagian besar penelitian sosiologi di dalam kesamaan analisis mengenai perilaku yang purposif. Jadi perilaku yang purposif dengan demikian, merupakan elemen penting di dalam teori pilihan rasional. Tetapi ciri terpenting dari sosiologi pilihan rasional menurut sumber di atas, adalah komitmennya yang mendalam kepada individualisme metodologis (*methodological individualism*) yang bersumber dari sosiologi Max Weber. Ciri yang kedua adalah bahwa; teori pilihan rasional memandang konsep memilih (*choice*) tersebut sebagai proses **mengoptimalkan tujuan**.

Sementara itu, para teoritis sosiologi pilihan rasional seperti; James S. Coleman, Richard M. Emerson, Karen S. Cook, Peter M. Blau serta Robert von Mises; menyatakan pandangan yang sama, bahwa model pilihan rasional ini berupaya menunjukkan; (1) dasar fenomena sosial itu nyata, (2) para aktor bertujuan untuk mengejar kepentingan secara rasional, (3) kecanggihan individualisme metodologis, (4) fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya daripada sistem secara keseluruhan, dan (5) penggunaan logika deduksi untuk menjelaskan fenomena (Mouzelis, 1995)

Menurut Friedman dan Hechter (Ritzer, G., ed., 1990: 220-23) ada tiga kelebihan yang dimiliki oleh teori pilihan rasional, yaitu; (1) memiliki kontribusi pada area pengukuran, (2) sebagai pendekatan dalam institusi sosial (seperti: dalam hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya) dan (3) memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu. Adanya kesempatan untuk pengukuran, yang dapat dilakukan oleh

ilihan rasional adalah pada proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) individu dan dalam agregasi (*aggregation*)

Tokoh utama teori pilihan rasional yang tetap teguh pada pendiriannya adalah Coleman, sedangkan yang lainnya, bergabung ke dalam model pertukaran sosial (*Social Exchange Model*) yang sebenarnya masih segaris dengan teori pilihan rasional. Posisi Coleman lebih ke arah atomisme sosial, karena ia memasukkan proposisi makro ke tingkat mikro. Meskipun demikian, sedikitnya ada tiga proposisi Coleman yang mampu menggambarkan bentuk ideal penjelasan peristiwa sebagai berikut;

1. Proposisi makro ke mikro, yang mengungkapkan tingkat pengaruh faktor masyarakat terhadap individu
2. Proposisi mikro ke makro, yang menggambarkan proses-proses pada tingkatan mikro
3. Proposisi mikro ke makro, yang menunjukkan bagaimana sejumlah peristiwa pada tingkat individu akan menghasilkan perubahan-perubahan pada tingkat masyarakat (Mouzelis, 1995)

Sosiologi Pilihan Rasional menurut Heckathorn memandang bahwa, memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional. Kendatipun demikian, hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi mikro klasik yang melihat pilihan rasional sekedar untuk memaksimalkan keuntungan atau pendapatan (Ritzer dan Smart, eds., 2001 :274) Dalam pandangan sosiologi pilihan rasional, dorongan untuk bertindak lebih didasarkan pada tujuan-tujuan altruistik (*altruistic*) dan egoistik (*egoistic*) yang kompleks. Selain itu, sosiologi pilihan rasional juga memandang bahwa rasionalitas itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Artinya bahwa, *ada kalanya suatu tindakan yang sudah*

diperhitungkan secara rasional – ternyata memiliki akibat yang tidak diharapkan, bahkan akibat tersebut sama sekali tidak diperhitungkan atau diantisipasi sebelumnya. Menurut Heckathorn, semua itu terjadi karena keterbatasan rasio manusia di dalam memperoleh dan mengolah informasi (Ritzer dan Smart, eds., 2001 : 274) Dengan mengikuti analisis teori Pilihan rasional tersebut di atas, maka TKI yang sukses dan yang gagal di negara tujuan sesungguhnya merupakan resiko dari pilihan rasional yang mereka ambil.

Secara esensial memang tidak ada perbedaan antara teori sosiologi pilihan rasional dengan sosiologi klasik, tetapi satu hal yang membedakannya adalah pada konsepsi tentang “memilih” yang nampak lebih eksplisit pada sosiologi pilihan rasional, dibandingkan pada sosiologi klasik (Ritzer dan Smart, eds., 2001 : 274) Disamping itu, teori pilihan rasional memiliki dua asumsi pokok sebagai berikut:

1. Fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkat kemasyarakatan (*societal*) lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu-individu, atau suatu hubungan kausal penjelasan dan keberadaannya hanya dapat dicari pada tingkatan mikro, dan
2. Tindakan serta Institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional menolak anggapan “*atomisme sosial truistik*” (*truistic social atomism*) yang memandang masyarakat sekedar merupakan gabungan individu-individu dan Institusi yang berisikan penjumlahan orang-orang, aturan-aturan, dan peran-peran sosial (Heckathorn dalam Ritzer dan Smart, eds., 2001 : 275)

Pada bagian lain Heckathorn juga menyatakan bahwa, dilihat dari struktur umum teori pilihan rasional, ternyata ia mencakup beberapa terminologi teoritik sebagai berikut; (1) sekumpulan aktor yang berfungsi sebagai pemain dalam sistem, (2) Alternatif-alternatif yang tersedia bagi masing-masing aktor, (3) Seperangkat hasil yang mungkin diperoleh dari sejumlah alternatif yang tersedia bagi aktor, (4) Pemilihan kemungkinan hasil oleh aktor dan (5) Harapan aktor terhadap akibat dari parameter-parameter sistem (Ritzer dan Smart,eds.,2001:276)

Dapat segera terlihat bahwa teori pilihan rasional sangat sesuai dengan strategi teoritis materialis dan konflik pada tataran makro. Ada bukti yang menunjukkan bahwa, versi tertentu dari teori materialistis dan konflik ternyata secara eksplisit didasarkan pada asumsi-asumsi tingkat mikro pilihan rasional. Tentu saja, teori pilihan rasional bukanlah merupakan strategi yang sempurna (dan satu-satunya) untuk translasi – mikro, karena dapat saja terjadi dimana orang mengikuti motif-motif lain diluar kepentingan dirinya. Tetapi secara umum, strategi teoritis tingkat mikro ini dapat dipandang sebagai strategi yang paling memberikan harapan di dalam menguji dasar-dasar mikro bagi sosiologi makro (Sanderson,1995 : 26).

Setelah melalui perdebatan yang panjang, tentang pendekatan ekonomi antara pendekatan ekonomi moral dengan pendekatan ekonomi politik; Samuel Popkin (1986) berkesimpulan bahwa, kedua strategi teori tersebut ternyata banyak kelemahannya.\* Popkin kemudian mencari strategi pendekatan lain yang lebih menekankan kepada pengambilan keputusan secara individual dan

---

\* Mengenai uraian tentang perdebatan teoritik kedua pendekatan ekonomi, baik pendekatan ekonomi moral yang lebih menekankan pada persoalan "dahulukan selamat" (safety first) maupun pendekatan ekonomi politik yang menekankan pada persoalan "gumblang" dalam melakukan tindakan-tindakan yang beresiko serta tekanan struktur desa, dapat disimak melalui tulisan Samuel L. Popkin (1986) Lembaga Penerbit Yayasan Padamu negeri, Jakarta.

interaksi strategis. Menurut Popkins, secara rasional individu-individu itu, akan menilai hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari pilihan-pilihan mereka yang sesuai dengan cita-cita, harapan atau keinginan-keinginan dan nilai-nilai yang mereka anut.

Dengan cara itu, mereka diskontokan (*discount*) evaluasi dari setiap hasil yang diperoleh menurut estimasi subyektif mereka. Akhirnya, mereka 'menjatuhkan' pilihan yang mereka yakini dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka harapkan itu (Popkin,S., 1986 : 25). Meskipun banyak orang memaknai rasionalitas ini sebagai tindakan yang mementingkan diri sendiri (*self interest*) tetapi Popkin tetap pada keyakinannya bahwa, keputusan individual untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan, guna meraih hasil yang maksimal yang diinginkan, adalah merupakan tindakan rasional.

Sekalipun demikian, Popkin juga mengakui bahwa, petani dalam situasi dan kondisi khusus tertentu, kadang nampak lebih memusatkan perhatiannya kepada dirinya sendiri atau keluarganya, kawan-kawan mereka atau desa mereka. Tetapi Popkin (1986) tetap pada asumsinya, bahwa petani itu bertindak rasional, dalam arti lebih memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan dan keamanan diri dan keluarganya. Bahwa makna rasionalitas dari orang ke orang tentu saja bisa relatif atau berbeda dari waktu ke waktu atau menurut konteks tertentu (Popkin,S.,1986 :25-6).

Adanya kenyataan bahwa, petani-petani dengan segala kemiskinannya seperti didiskripsikan di dalam latar belakang permasalahan di muka, yang tidak lagi punya peluang dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan sosial - ekonominya di daerah asal, dan kemudian memutuskan untuk beremigrasi

meninggalkan keluarga dan kerabatnya itu,; adalah merupakan tindakan yang rasional. Artinya, seseorang memutuskan untuk bermigrasi ke luar negeri adalah merupakan hasil pilih-memilih di antara berbagai alternatif peluang yang tersedia dan tentu saja juga yang paling mungkin ia lakukan di antara tekanan situasi (struktur) dan kondisi (kultur) di daerah asalnya

## **.6. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN**

### **.6.1. Metode dan Prosedure Penelitian.**

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan survey, dengan tipe atau desain penelitian "*expost facto*" yakni meneliti para TKI yang sudah pernah bekerja di luar negeri, baik yang masih aktif bekerja (tetapi sedang mudik ke desa asal) maupun TKI yang sudah kembali ke daerah asal (sebagai *return migrant*) selama kurun waktu dua tahun terakhir. Adapun pemilihan lokasi penelitian, penentuan populasi dan pemilihan sample serta cara analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut;

### **1.6.2. Lokasi Penelitian.**

Semula lokasi penelitian yang dirancang dalam proposal dipilih tiga Kabupaten di Jawa Timur yaitu; kabupaten Malang, Blitar dan Tulungagung. Tetapi berdasarkan pertimbangan praktis; yakni sulitnya memperoleh data migran kembali di Kabupaten Malang dan Blitar, dan dalam presurvey ditemukan bahwa data TKI ke luar negeri sedang dalam penyempurnaan, maka lokasi kabupaten Malang dan Blitar di ganti dengan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan.

Penelitian ini kemudian memutuskan memilih, lokasi atau daerah penelitian di desa Keboireng, Tanggul Turus dan Tanggul Welahan Kecamatan Lesuki Kabupaten Tulungagung, dua desa di Kabupaten Ponorogo yakni desa Sukromenggala Kecamatan Ponorogo; dan desa Polorejo Kecamatan Babadan, sedangkan di Kabupaten Pacitan masing-masing desa Gayuhan, Jatimalang dan desa Krajan Wetan, kecamatan Arjosari. Dasar pemilihan daerah penelitian tersebut di atas, adalah karena di daerah-daerah tersebut banyak TKI yang sedang mudik dalam satu tahun terakhir, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tiap Kabupaten.

### 6.3. Populasi Penelitian.

Untuk mendapatkan populasi TKI dalam penelitian ini, tim peneliti mengalami kesulitan di Kabupaten Ponorogo dan terutama di Kabupaten Pacitan, karena data yang tersedia kurang akurat baik di Kecamatan maupun di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Ada tiga faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan data TKI yang akurat di dua kabupaten ini. Pertama, karena munculnya stigma dikalangan masyarakat, bahwa para istri yang bekerja di luar negeri (sebagai TKW) pastilah menjadi pelacur, karena pendidikan rendah; sehingga dalam waktu setahun atau dua tahun mereka bisa membangun rumah, dan membeli mobil baru. Meskipun mungkin benar bahwa ada satu atau dua TKW yang melakukan hal itu, tetapi tuduhan seperti ini nampaknya sangat "memukul dan menyakitkan" bagi sebagian TKW. Kedua, akibat dari stigma semacam itu, kebanyakan TKI (terutama wanita) tidak mau mengaku (pernah) bekerja di luar negeri, tetapi umumnya mereka hanya menyebutkan pernah bekerja di Riau (Sumatra). Ketiga, para TKW ini juga

tidak pernah tercatat berangkat ke luar negeri dari Ponorogo dan Pacitan, tetapi dari Madiun atau Solo (Jawa Tengah).

Setelah melalui pendekatan personal dengan melibatkan perangkat desa (Kelurahan) setempat, satu demi satu responden penelitian ini dapat diwawancarai. Dengan demikian, responden dalam penelitian ini adalah semua TKI yang pernah bekerja di luar negeri dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu tahun terakhir yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, baik TKI yang legal, ilegal maupun TKI yang dideportasi oleh Pemerintah negara tujuan migrasi.

#### **6.4. Sampel Penelitian.**

Sebelum sampel penelitian di ambil, terlebih dahulu dibuat kerangka sampel TKI dengan cara mendata seluruh TKI yang pernah bekerja di luar negeri selama kurun waktu dua tahun terakhir di masing-masing desa dalam lingkup wilayah tiga Kabupaten yang sedang mudik. Tetapi karena ada stigma seperti dipaparkan di atas itu, maka kerangka sampling tidak mungkin dibuat. Sebagai gantinya digunakan cara "*Availability-sampling*" dan dengan cara tersebut di Kabupaten Tulungagung diperoleh 142 responden sedang di Kabupaten Ponorogo sebanyak 96 orang responden, dan di Kabupaten Pacitan sebanyak 62 orang responden. Selanjutnya, untuk memudahkan pengumpulan data primer dari para responden, maka cara yang ditempuh adalah dengan pendekatan pada perangkat desa setempat (kepala Dusun), untuk memastikan bahwa, responden yang diwawancarai adalah benar-benar TKI yang pernah bekerja di luar negeri. Secara keseluruhan, jumlah responden yang berhasil diwawancarai dalam studi ini adalah sebesar 300 orang TKI.

### **6.5. Cara Pengumpulan Data.**

Data primer tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan TKI, yang bersumber dari tiga Kabupaten sebagaimana disebutkan di atas, telah dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner semi terstruktur yang sudah diuji coba terlebih dahulu validitas dan keterandalannya. Disamping data primer, data sekunder juga telah dikumpulkan dari berbagai lembaga atau institusi yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini, antara lain dari Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten masing-masing, PJTKI setempat, BPS tiap Kabupaten serta BPS Propinsi Jawa Timur.

### **6.6. Cara Analisis Data.**

Data yang sudah dikumpulkan dengan perangkat kuesioner sebanyak 300 eksemplar itu, terlebih dulu di proses (diolah) dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) untuk menghasilkan tabel-tabel frekuensi untuk digunakan sebagai alat bantu analisis. Selanjutnya, data dalam tabel-tabel dengan perhitungan statistik hasil pengolahan menggunakan program SPSS tersebut dianalisis dan diinterpretasi sebagai dasar penarikan kesimpulan serta untuk menemukan implikasi (secara teoritik) sebagai dasar penyusunan saran-saran.

\*\*\*

## **BAB 2**

### **DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN**

Dalam Bab ini secara berturut-turut akan dipaparkan kondisi umum daerah penelitian yang relevan dengan tema studi ini, meliputi Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Ketiga daerah ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik geografis -- yakni sebagai kawasan selatan dari Propinsi Jawa Timur; yang sebagian wilayahnya terdiri dari pegunungan kapur selatan.

#### **2.1. KABUPATEN TULUNGAGUNG .**

##### **2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah.**

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112° 07' bujur timur, dan 7° 51 ' sampai dengan 8° 18' lintang selatan. Sebagai kawasan di bagian selatan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 km dengan topografi bukit kapur di bagian selatan yang sebagian besar relatif tandus, berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan perbukitan di bagian utara yang relatif lebih subur. Daerah-daerah yang subur dengan pengairan yang baik terdapat di sebagian kawasan utara, tengah dan di bagian timur (Kecamatan Gondang, Sumbergempol, Ngantru, Ngunut, Kauman dan Kedungwaru) sedangkan daerah-daerah bagian selatan meliputi Kecamatan Kalidawir, Campur darat, Besuki, Tanggunggunung, Pakel dan Bandung sebagian besar merupakan daerah pegunungan kapur selatan yang relatif kurang subur.

Curah hujan, menurut data tahun 2003, tertinggi pada bulan Maret dan Oktober mencapai 598 mm untuk Kecamatan-kecamatan Ngantru, Sendang, Pagerwojo dan Karangrejo, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan-bulan Juli, Agustus dan September yaitu hanya mencapai 5 - 115 mm; bahkan untuk wilayah selatan hanya 1 hari hujan atau sama sekali tidak ada hujan pada bulan-bulan tersebut (BPS ; Tulungagung Dalam Angka, 2003: xxi)

Kabupaten Tulungagung terbagi ke dalam 19 Kecamatan, 257 desa dan 4 kelurahan; dengan 1.830 RW dan 6.239 RT. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1996 tentang Juklak Kepmendagri 25 Tahun 1996, klasifikasi desa/kelurahan di Kabupaten ini sudah berada pada tingkat swadaya sebanyak 144 desa/kelurahan dan tingkat swakarsa sebanyak 127 desa / kelurahan Secara administratif Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar disebelah timur, disebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri, disebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Trenggalek dan disebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

### **2.1.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan.**

Berdasarkan data hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 972.187 jiwa; terdiri dari 482.615 penduduk laki-laki, dan 489.572 penduduk perempuan, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 921 orang per km. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,45 persen pada tahun 2000 - 2001, sedang pada tahun 2002- 2003, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,83 persen rata-rata setiap tahunnya (BPS; Tulungagung Dalam Angka, 2003: xxvii)

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, maka jelas kecamatan Tulungagung (kota) dan kecamatan Kedungwaru yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Tulungagung merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yakni masing-masing mencapai 4.854,28 orang per km<sup>2</sup> dan 2.583,69 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan Panggunung yakni sebesar 202,91 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km; terdapat di kecamatan-kecamatan ; Pucanglaban dengan 284,49 orang per km ; kecamatan Pagerwojo dengan 333,60 orang per km; kemudian kecamatan Besuki dengan 413,67 orang per km; dan kecamatan Sendang dengan 447,54 orang per km. (Tabel 2.1.)

Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km, sebagian besar merupakan daerah pegunungan (bukit) tandus di bagian utara seperti di kecamatan Sendang dan Pagerwojo yang menghadapi dilema air untuk irigasi. Di sebagian besar wilayah kecamatan ini, pada musim penghujan menghadapi ancaman tanah longsor karena curah hujan yang tinggi, tetapi sebaliknya pada saat musim kemarau tiba, wilayah kecamatan ini mengalami kekeringan yang parah, karena sebagian besar bukitnya sudah gundul. Di bagian selatan yang merupakan pegunungan kapur selatan, juga mengalami dilema serupa. Jika musim penghujan tiba, sebagian daerah ini banjir, tetapi ketika musim kemarau tiba, daerah ini menjadi sangat gersang dan berdebu.

Gambaran mengenai distribusi penduduk Kabupaten Tulungagung per kecamatan dan tingkat kepadatannya , dapat dilihat dari data sebagaimana disajikan di dalam Tabel 2.1. berikut ini :

**TABEL 2.1.**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Besuki	82,16	33.987	413, 67
2. Bandung	41,96	46.604	1.110, 68
3. Pakel	36,06	48.861	1.354, 99
4. Campurdarat	39,56	50.205	1.269, 08
5. Tanggunggunung	111,73	23.889	202, 91
6. Pucanglaban	82,94	23.596	284, 49
7. Kalidawir	97,81	66.667	681, 60
8. Rejotangan	66,49	69.734	1.048, 79
9. Ngunut	37,70	71.036	1.884, 24
10. Sumbergempol	39,28	61.285	1.560, 21
11. Boyolangu	38,44	69.700	1.813, 22
12. Gondang	44,02	54.477	1.237, 55
13. Kauman	30,84	49.528	1.605, 97
14. Tulungagung	13,67	66.358	4.854, 28
15. Kedungwaru	29,74	76.839	2.583, 69
16. Ngantru	37,03	48.601	1.312, 48
17. Karangrejo	35,54	38.220	1.075, 41
18. S e n d a n g	96,46	43.170	447, 54
19. Pagerwojo	88,22	29.430	333, 60
Jumlah : th. 2001	1.055.65	972.187	920, 94

Sumber : BPS ; Tulungagung Dalam Angka, 2003 :45.

### **2.1.3. Agama dan Mata Pencaharian Penduduk**

Seperti kebanyakan daerah pesisir di Jawa Timur, penduduk di Kabupaten Tulungagung ini juga mayoritas menganut Agama Islam yakni sekitar 98,32 persen. Penduduk yang menganut agama Kristen tercatat 1.02 persen; Katholik 0,42 persen, Budha 0,17 persen dan penganut Hindu tercatat

sebanyak 0,07 persen saja. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tulungagung, masih sebagian besar menekuni bidang pertanian, disusul kemudian oleh bidang perkebunan, industri, dan jasa perdagangan. Data yang rinci mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di setiap sektor kegiatan ekonomi tidak tersedia; tetapi secara garis besar, dapat digambarkan bahwa, sektor pertanian (mulai dari tanaman pangan, perikanan, dan peternakan) masih merupakan sektor yang dominan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten ini justru tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan sumbangan sektor perdagangan, dan industri pengolahan. Pada tahun 2002 tercatat kenaikan PDRB sebesar 12,96 persen dibandingkan tahun 2001; dan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor perdagangan (25,36 %), disusul kemudian oleh sektor industri pengolahan (20,32 %), dan sektor pertanian sebesar 20,50 % (BPS: Tulungagung Dalam Angka, 2003 : xxix)

#### **2.1.4. Angkatan Kerja.**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2003, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah angkatan kerja selama periode tahun 1999 - 2002, menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut;

- 1). Angkatan kerja yang berpendidikan SD mengalami penurunan jumlah secara absolut dari 5.935 orang pada tahun 1999 menjadi 2.930 pada tahun 2002, atau terjadi penurunan sebesar 11,40 %.

- 2). Angkatan kerja yang berpendidikan SMTP, juga mengalami penurunan secara absolut dari 2.960 orang pada tahun 1999; menjadi 2.395 orang pada tahun 2002, atau terjadi penurunan sebesar 6,29 %.
- 3). Angkatan kerja yang berpendidikan SMTA, semula berjumlah 2.764 orang pada tahun 1999, juga mengalami penurunan menjadi 1.897 orang pada tahun 2002, atau menurun sekitar 33,33 %.
- 4). Angkatan kerja yang berpendidikan Diploma 3 yang semula pada tahun 1999 berjumlah 149 orang juga mengalami penurunan menjadi 89 orang saja pada tahun 2002, atau turun sebesar 23,81 %.
- 5). Angkatan kerja yang berpendidikan sarjana (S-1) yang semula berjumlah 814 pada tahun 1999, mengalami penurunan menjadi 101 orang saja atau telah turun sekitar 21,01 % pada tahun 2002 (Tabel 2.2.)

**TABEL 2.2.**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	1999	2000	2001	2002	Penurunan rata2
1. Sekolah Dasar	5.935	2.520	5.407	2.930	11,40 %
2. SMTP	2.960	1.991	3.283	2.359	6,29 %
3. SMTA	2.764	2.581	2.027	1.897	33,33 %
4. Diploma 3	149	161	96	89	23,81 %
5. Sarjana (S-1)	814	1.023	548	101	21,01 %
<b>Jumlah</b>	<b>12.622</b>	<b>8.276</b>	<b>11.361</b>	<b>7.376</b>	<b>15,16%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2003.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang sudah disalurkan, menurut lapangan pekerjaan dari tahun 1999 hingga tahun 2003, yang tertinggi adalah lapangan kerja di sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan, yakni sebanyak 7.001 orang pada tahun 1999. Tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan drastis menjadi 2.663 pada tahun 2000 ; pada tahun 2001 turun menjadi 1.327, tahun 2002 naik menjadi 2.708, dan turun lagi menjadi 2.427 orang saja pada tahun 2003. Urutan berikutnya adalah lapangan kerja di sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 1999; telah disalurkan sebanyak 4.675 orang tenaga kerja di sektor ini, kemudian pasca krisis pada tahun 2000 naik menjadi 5.776 orang, tetapi tahun berikutnya turun lagi menjadi 4.138 orang, dan naik lagi pada tahun 2002 menjadi 5.803 orang kemudian turun lagi menjadi 3.228 orang saja pada tahun 2003 (Tabel 2.3.)

TABEL 2.3

**Angkatan Kerja yang Disalurkan  
Menurut Lapangan Pekerjaan 1999 - 2003**

Lapangan Pekerjaan	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan	7.001	2.663	1.327	2.708	2.427
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	1.352	458	771	654	158
4. Listrik, Gas dan Air	-	36	26	-	142
5. Bangunan/Konstruksi	56	24	33	7	-
6. Perdagangan, Hotel, Rm makan	349	202	203	296	-
7. Transportasi/Pergudangan	152	127	54	111	-
8. Jasa Kemasyarakatan	4.675	5.776	4.138	5.803	3.228
<b>Jumlah</b>	<b>13.585</b>	<b>9.286</b>	<b>6.552</b>	<b>9.598</b>	<b>5.955</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2003.

Sementara itu, angkatan kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan sejak tahun 1999 hingga 2003 adalah sebagai berikut. Angkatan

kerja yang berpendidikan SD menempati jumlah terbesar yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan. Tahun 1999 ada 9.585 orang lulusan SD yang disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Tahun 2000 jumlah tersebut menurun menjadi 5.577 orang; tahun 2001 turun lagi menjadi 2.879 orang, tetapi tahun 2002 naik lagi menjadi 5.248 orang sebelum turun lagi pada 2003 menjadi 2.958 orang saja. Lulusan SLTP yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan menempati urutan kedua sebesar 12.350 orang selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 1999 - 2003. Lulusan SLTA, yang telah disalurkan selama kurun waktu tersebut mencapai 6.171 orang; sedangkan lulusan Diploma dan Sarjana S-1; yang telah disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan, masing-masing sebesar 40 orang dan 198 orang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2003 : 62)

Disamping penyaluran tenaga kerja ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak 1999 yang lalu, juga telah menyalurkan sejumlah tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL); Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Secara rinci jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui AKL, AKAD dan AKA tersebut sebagai berikut.

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 mencapai 3.986 orang; jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 ada sebanyak 17.633 orang; sedangkan jumlah tenaga

kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Negara sejak periode tahun tersebut ada sebanyak 29.317 orang.

Dibandingkan dengan penyaluran tenaga kerja melalui AKL dan AKAD, tampak jelas bahwa, penyaluran tenaga kerja melalui AKAN (ke luar negeri) khususnya sebagai TKI justru paling besar jumlahnya selama kurun waktu lima tahun terakhir.

## **2.2. KABUPATEN PONOROGO**

### **2.2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.**

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km persegi, terletak antara 111° 17' dan 111°52' Bujur Timur dan 7° 49' sampai 8° 20' lintang selatan, berada pada ketinggian antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan air laut. Dari kondisi topografis, Kabupaten Ponorogo dapat dibedakan menjadi dua sub area, yakni area dataran tinggi meliputi kecamatan-kecamatan Ngrayun, Sooko , Pulung dan kecamatan Ngebel; sedangkan kawasan lainnya merupakan daerah dataran rendah dan daerah aliran sungai. Seluruhnya ada 14 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan panjang bervariasi mulai dari 4 hingga 58 km, yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian ; mulai padi hingga hortikultura. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo sebenarnya merupakan kawasan hutan dan lahan persawahan sehingga berhawa sejuk terutama pada malam, pagi dan sore hari. Sisanya merupakan lahan pemukiman dan tegalan atau pekarangan.

Secara administratif, Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun , Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk di sebelah

tara; di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek; di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)

Kabupaten Ponorogo memiliki curah hujan tertinggi mencapai 375 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 , pada bulan Oktober; merupakan curah hujan terendah dan musim kemarau paling kering terjadi pada bulan Juni, Juli dan puncaknya September. Wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 Kecamatan dengan 26 kelurahan dan 277 desa, serta didukung oleh 11.050 sumber daya manusia, yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **2.2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan.**

Menurut data hasil registrasi penduduk akhir tahun 2003, Kabupaten Ponorogo mempunyai jumlah penduduk sebesar 902.735 jiwa, terdiri dari 443.205 penduduk laki-laki dan 459.530 penduduk perempuan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,44% pertahun (BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 21) Sex ratio penduduk di Kabupaten Ponorogo ini tercatat mengalami kenaikan dari 96,38 pada tahun 2002 menjadi 96,45 pada akhir tahun 2003. Ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Kondisi ini hampir merata di setiap Kecamatan, kecuali di kecamatan Mlarak.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo ternyata juga mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 1999 tingkat kepadatan

penduduk berada pada angka 645 orang per km persegi. Angka ini meningkat menjadi 648 pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2001 tingkat kepadatan penduduk meningkat lagi menjadi 652, demikian pula pada tahun 2002 tingkat kepadatan naik menjadi 655 dan pada akhir tahun 2003 angka tersebut telah mencapai 658 jiwa per km persegi (BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 22) Gambaran tentang distribusi penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan berdasarkan data registrasi penduduk Kabupaten Ponorogo akhir tahun 2003 adalah sebagai berikut: (Tabel 2.4.)

**TABEL 2.4.**  
**Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Per Kecamatan Tahun 2003**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Sex Ratio
1. Ngrayun	28.185	28.319	56.504	99,53
2. Slahung	25.871	27.356	53.227	94,57
3. Bungkal	17.846	19.086	36.932	93,50
4. Sambit	18.997	19.882	38.879	95,55
5. Sawoo	30.094	31.256	61.350	96,28
6. Scoko	11.635	12.190	23.835	95,45
7. Pulung	24.408	25.445	49.853	95,92
8. Mlarak	19.035	17.299	36.334	110,04
9. Siman.	19.329	20.024	39.353	96,53
10. Jetis	15.776	16.047	31.823	98,31
11. Balong.	22.278	23.513	45.791	94,75
12. Kauman.	21.593	21.892	43.485	98,63
13. Jambon.	19.758	20.950	40.708	94,31
14. Badegan	14.900	15.577	30.477	95,65
15. Sampung.	18.863	21.134	39.997	89,25
16. Sukorejo.	25.631	26.872	52.503	95,38
17. Ponorogo.	36.840	39.042	75.882	94,36
18. Babadan.	31.158	31.490	62.648	98,95
19. Jenangan.	26.641	27.141	53.782	98,16
20. Ngebel.	10.217	10.641	20.858	96,02
21. Puduk	4.150	4.374	8.524	94,88
<b>Jumlah</b>	<b>443.205</b>	<b>459.530</b>	<b>902.735</b>	<b>96,45</b>

Sumber : BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003: 21)

Dilihat dari penyebaran penduduk per kecamatan seperti di atas, maka sangat mudah dimengerti mengapa kecamatan kota Ponorogo memiliki jumlah penduduk terbesar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ini terutama disebabkan oleh terpusatnya aktifitas pemerintahan dan perekonomian di kecamatan kota Ponorogo ini.

Gambaran tentang tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo di masing-masing Kecamatan, menunjukkan tingkat kepadatan yang sangat bervariasi seperti dapat dilihat dalam Tabel 2.5. berikut ini.

**TABEL 2.5.**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk**  
**Per Kecamatan Tahun 2003.**

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per-km <sup>2</sup>	Rata-rata anggota rumah tangga
1. Ngrayun	184,76	56.504	306	4
2. Slahung	90,34	53.227	589	4
3. Bungkal	54,01	36.932	684	4
4. Sambit	59,83	38.879	650	4
5. Sawoo	124,71	61.350	492	4
6. Sooko	55,33	23.825	431	4
7. Pulung	127,55	49.853	391	4
8. Mlarak	37,20	36.334	977	4
9. Siman	37,95	39.353	1.037	4
10. Jetis	22,41	31.823	1.420	4
11. Balong	56,96	45.791	804	4
12. Kauman	36,61	43.485	1.188	4
13. Jambon	57,48	40.708	708	4
14. Badegan	52,35	30.477	582	4
15. Sampung	80,61	39.997	496	4
16. Sukorejo	59,58	52.503	881	4
17. Ponorogo	22,31	75.882	3.401	4
18. Babadan	43,93	62.648	1.426	4
19. Jenangan	59,44	53.782	905	4
20. Ngebel	59,51	20.858	350	4
21. Pudak	48,91	8.524	174	4
Jumlah	1.371,78	223.754	902.735	4

Sumber : BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 22.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, maka Kabupaten Ponorogo sebenarnya dapat diklasifikasi kedalam struktur umur penduduk muda, karena sebagian terbesar penduduk Kabupaten ini berada pada kelompok umur 0-14 ; 15-64 dan 65 ke atas masing-masing 24 % ; 65 % dan 11,2 % (BPS : Ponorogo Dalam Angka,2003 ; dengan pengolahan)

### **2.2.3. Agama dan Mata Pencarian Penduduk**

Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo (99,55 %) adalah agama Islam, sedangkan agama lainnya yang dianut oleh sebagian kecil penduduk (0,55 %) di Kabupaten ini antara lain, Protestan, Katholik , Hindu dan Budha. Sebagai daerah yang mayoritas Islam, Ponorogo juga dikenal dengan Pondok Pesantrennya. Sampai dengan akhir tahun 2003, tercatat 54 Pondok Pesantren di seluruh Kabupaten Ponorogo. Mata pencarian penduduknya juga sebagian terbesar di sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun hortikultura. Menurut data yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten Ponorogo, tahun 2003; luas tanah sawah di Kabupaten ini tercatat sekitar 350,00 Ha, terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 30.713 Ha, sawah setengah teknis seluas 421 ha, dan sawah non teknis seluas 2.257 Ha serta sawah tadah hujan sekitar 1.609 Ha. Luas lahan kering di Kabupaten ini tercatat seluas 101.377 Ha dimanfaatkan untuk pekarangan dan bangunan 21.642 Ha; Tegal dan ladang 29.280 Ha, sedangkan hutan negara luasnya sekitar 46.941 Ha, kemudian hutan rakyat seluas 108 Ha. Hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta industri pengolahan yang penting yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo dalam empat tahun terakhir antara lain; Padi , durian, cengkeh, tembakau, tepung tapioka,

aging kambing, serta industri mebel. Produksi buah durian sejak tahun 2000 tercatat sebesar 23.407 kuintal; tahun 2001 meningkat menjadi 43.497 kuintal, tetapi tahun 2002 turun drastis menjadi 13.729 kuintal saja. Pada akhir tahun 2003, produksi buah durian ini kembali meningkat dan mencapai jumlah 67.040 kuintal. Produksi tembakau juga mengalami pasang surut. Tahun 2000 total produksi mencapai 29.072,50 kuintal; naik menjadi 44.515,00 kuintal pada tahun 2001. Tahun berikutnya, produksi tembakau ini kembali membaik dan mencapai 44.922,50 kuintal meskipun pada tahun berikutnya turun lagi menjadi 26.873,23 kuintal saja (BPS : Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 3-5) Gambaran mengenai mata pencaharian penduduk di Kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut ini

**TABEL 2.6.**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Ponorogo**  
**Akhir Tahun 2003.**

Kecamatan	Pegawai negeri	Pegawai swasta	ABRI	Pensiunan	Petani Pemilik	Buruh	Pedagang Tani	lainnya
1. Ngrayun	454	48	5	99	33.900	293	145	638
2. Slahung	668	193	16	389	1.326	7.474	791	11
3. Bungkal	731	65	53	103	15.665	6.597	585	2.041
4. Sambit	619	679	42	170	9.888	8.196	1.149	3.024
5. Sawoo	375	29	19	127	17.719	7.436	880	2.990
6. Sopko	367	144	20	86	7.789	6.140	536	1.894
7. Pudung	1.273	192	27	252	10.792	9.931	1.552	17.353
8. Mlarak	541	1.454	47	149	6.113	6.815	1.224	8.921
9. Siman	764	801	104	228	4.290	6.716	700	25.749
10. Jetis	704	501	127	200	5.745	4.812	865	12.130
11. Balong	759	286	78	203	11.231	5.649	559	1.080
12. Kauman	985	257	140	212	8.447	11.109	717	1.276
13. Jambon	305	94	26	77	6.083	4.590	322	1.675
14. Badegan	347	73	32	65	3.962	3.418	270	698
15. Sampung	519	722	24	166	14.268	9.230	544	869
16. Sukorejo	498	133	54	171	12.444	9.133	1.618	10.919
17. Ponorogo	2.957	11.158	306	1.605	3.570	3.331	14.867	22.922
18. Babadan	1.503	546	100	252	14.858	16.936	524	13.228
19. Jenangan	950	694	42	230	13.626	12.110	1.100	1.616
20. Ngebel	242	241	12	66	11.871	1.636	235	2.154
21. Pudak	19	21	-	10	5.554	259	132	97
<b>Jumlah</b>	<b>15.580</b>	<b>18.331</b>	<b>1.274</b>	<b>4.860</b>	<b>229.141</b>	<b>141.811</b>	<b>29.315</b>	<b>131.285</b>

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2003

Data dalam Tabel 2.6. di atas, sekali lagi menunjukkan bahwa, masih mayoritas penduduk di Ponorogo hidup dari sektor pertanian baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani. Mata pencaharian lainnya menduduki urutan ketiga, dan keempat mata pencaharian sebagai pedagang. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri nampaknya cukup besar di daerah ini.

#### **2.2.4. Angkatan Kerja.**

Sebagai Kabupaten dengan struktur umur penduduk muda, maka mudah dipahami bahwa, jumlah tenaga kerjanya juga tentu akan sangat besar. Tenaga kerja disini dikonsepsikan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun hingga 64 tahun. Jika diasumsikan bahwa, semua penduduk usia 15 tahun di Kabupaten ini masuk ke dalam kategori “ *economically active population*” dan besarnya angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo diukur menggunakan standard ILO (*International Labour Organization*) yaitu penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun, maka untuk Kabupaten Ponorogo, jumlah angkatan kerjanya berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2003, akan mencapai angka 65 % dari total penduduknya. (Tabel 2.7.)

Disisi lain, meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten Ponorogo selama empat tahun terakhir (2000 - 2003) terus mengalami kenaikan, namun kenaikannya sangat kecil. Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ini hanya 1,18 %; kemudian naik menjadi 2,05 % pada tahun 2001, 2,77 % tahun berikutnya dan 3,54 % pada akhir 2003. Jumlah angkatan kerja yang besar ini, akan memberikan implikasi persoalan penyediaan lapangan pekerjaan yang

mat berat bagi Kabupaten Ponorogo, apalagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (akhir tahun 2003) hanya sebesar 3, 54 % saja.

TABEL 2.7.

Komposisi Penduduk Ponorogo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	36.751	36.734	73.494
5 - 9	35.914	37.364	73.278
10 - 14	36.499	37.074	73.573
15 - 19	37.219	38.094	75.313
20 - 24	34.859	35.650	70.509
25 - 29	34.584	34.837	69.421
30 - 34	31.776	32.612	64.388
35 - 39	29.658	30.600	60.258
40 - 44	28.165	29.380	57.545
45 - 49	26.343	27.755	54.098
50 - 54	24.328	25.661	49.989
55 - 59	21.527	22.463	43.990
60 - 64	19.256	20.720	39.976
65 - 69	16.577	17.809	34.386
70 - 74	14.860	15.701	30.561
75 +	14.889	17.067	31.956
Jumlah	443.205	459.530	902.735

Sumber : BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 24

Gambaran mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) baik laki-laki maupun wanita di wilayah ini (tenaga kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan ) sulit diperoleh, karena tidak tersedianya data tentang jumlah orang bekerja dan di sektor mana saja angkatan kerja tersebut terserap. Tetapi dari data tentang jumlah tenaga kerja yang terdaftar mencari pekerjaan menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo ini kiranya cukup dipakai

bagai gambaran, bahwa selama lima tahun terakhir cukup banyak pencari kerja dari berbagai tingkat pendidikan dari daerah ini yang belum memperoleh pekerjaan atau menganggur.

TABEL 2. 8.

Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 - 2003

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Sekolah dasar	138	2.367	2.505
2. Sekolah lanjutan Tk.Pertama			
2.1. SLTP Umum	242	2.135	2.377
2.2. SLTP Kejuruan	242	2.135	2.377
2.3. Kursus-Kursus setingkat SMTP	—	—	—
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3.658	4.505	8.163
3.1. SLTA Umum	989	2.297	3.286
3.2. SLTA Kejuruan	2.669	2.208	4.877
3.3. Kursus-Kursus setingkat SLTA	—	—	—
4. Sarjana Muda atau Sederajat	338	409	747
5. Sarjana (S-1)	1.680	1.081	2.761
Jumlah Keseluruhan th 2003	6.056	10.497	16.553
Jumlah keseluruhan th 2002	1.322	14.502	15.824
Jumlah keseluruhan th 2001	4.781	12.023	16.804
Jumlah keseluruhan th 2000	3.343	8.408	11.751
Jumlah keseluruhan th 1999	3.414	11.828	15.242

Sumber : BPS: Ponorogo Dalam Angka, 2003 : 34

Jika diasumsikan; seluruh angkatan kerja yang tercatat sedang mencari pekerjaan (tersebut di atas), sudah memperoleh pekerjaan -- maka data dalam Tabel 2.8. ini, akan menunjukkan bahwa -- dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki, maka TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) perempuan, selalu nampak lebih tinggi dari tahun ke tahun. Persoalannya, apakah TPAK perempuan tersebut ada hubungannya dengan kian banyaknya kaum Ibu

umah tangga di daerah ini yang bekerja sebagai TKW ke luar negeri, masih membutuhkan dukungan bukti lebih lanjut.

### **.3. KABUPATEN PACITAN.**

Kabupaten Pacitan merupakan lokasi penelitian yang ketiga, dengan jarak tempuh hampir 3, 5 jam perjalanan dengan kendaraan umum dari pusat kota Tulungagung.

#### **2.3.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.**

Kabupaten ini terletak di sebelah barat daya di peta wilayah Propinsi Jawa Timur, yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Menurut data geografis, Kabupaten Pacitan terletak di antara 110° 55' hingga 111° 25' Bujur Timur, dan 07° 55' sampai 08° 17' Lintang Selatan, dengan ketinggian bervariasi mulai dari 7 meter hingga 964 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Pacitan berbatasan wilayah dengan Kabupaten Ponorogo , dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) disebelah utara; disebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Trenggalek ; disebelah selatan dengan Samudra Indonesia; dan disebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Kabupaten Pacitan tercatat memiliki luas wilayah sekitar 1.389.871 km persegi dengan topografi sebagian besar berbukit dan gunung terjal yang juga merupakan bagian dari Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa. Sebagian lagi merupakan dataran rendah terutama di pusat kota dan sekitarnya, sedangkan sisanya merupakan lereng bukit dengan tingkat kemiringan bervariasi mulai dari paling landai hingga paling terjal. Ada dua

gunung yang tercatat di Kabupaten Pacitan, yaitu; gunung Limo yang tertinggi terletak di Kecamatan Kebonagung, dan kedua gunung Gembes yang terletak di Kecamatan Bandar dimana sumber mata air dari sungai besar Grindulu berasal.

Wilayah bagian selatan Kabupaten Pacitan, pada umumnya terdiri dari batuan kapur selatan, sedangkan belahan utara kebanyakan berupa tanah. Dari kandungan tanahnya dapat diketahui berbagai material berharga, antara lain; *asosiasiitiosal, mediteran merah litosol, campuran tuf* dan bahan *vulkano kompleks litosol kemerahan dan alufial kelabu*. Juga terdapat endapan tanah liat yang diketahui mengandung bahan-bahan galian mineral untuk bahan ambang, antara lain; berupa *feldspar, ball clay* (bahan baku keramik) *benionit, chlorophilit, batu bintang* (batu kapur kalsid) *batu gips, phospat, batu ciliac, biji besi* juga terdapat batu bara, dolomit, batu hias dan kaolin.

Dari data tentang tataguna lahan dapat diketahui bahwa, di Kabupaten Pacitan, terdapat lahan sawah basah seluas 130,15 km<sup>2</sup>, dan luas lahan kering sekitar 1.259,72 km<sup>2</sup>. Sawah irigasi teknis tercatat sekitar 864 Ha, sawah irigasi setengah teknis sekitar 2.130 Ha; sawah irigasi non teknis 3.314 Ha, dan sawah tadah hujan ada sekitar 6.707 Ha. Penggunaan lahan kering di wilayah Pacitan antara lain untuk; bangunan, tegalan, hutan rakyat dan hutan negara, jalan dan fasilitas lainnya.

Termasuk ke dalam kategori daerah beriklim sedang, Kabupaten Pacitan memiliki curah hujan paling banyak pada bulan Januari dan Maret rata-rata 476,75 mm; dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari dan 23 hari. Sebaliknya, pada musim kemarau, bulan yang paling kering terjadi pada bulan

uli, Agustus dan September, dimana jumlah hari hujan pada bulan tersebut hanya satu hari saja. (BPS : Pacitan Dalam Angka, 2003 :xxv)

### 2.3.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan.

Kabupaten Pacitan secara administratif (Pemerintahan) terbagi menjadi 12 kecamatan; 159 buah desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2003 tercatat sebesar 545.409 jiwa, terdiri dari 266.452 penduduk laki-laki dan 278.867 penduduk perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,95 % pertahun. Hampir sama dengan Kabupaten Ponorogo, Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) penduduk di Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2003 adalah sebesar 95,58. Dengan kata lain, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah; 96 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. (Tabel 2.9.)

TABEL 2. 9.  
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
dan Sex Ratio 1999 -2003

	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Donorejo	19.578	20.814	40.392	94,06
2.	Punung	15.210	17.018	32.228	89,38
3.	Pringkuku	18.608	18.404	37.012	101,11
4.	Pacitan	29.997	32.285	62.282	92,91
5.	Kebonagung	22.083	22.820	44.903	96,77
6.	Arjosari	19.188	20.002	39.190	95,93
7.	Nawangan	23.870	24.127	47.997	98,93
8.	Bandar	20.866	21.380	42.246	97,60
9.	Tegalombo	23.957	24.816	48.773	96,54
10.	Tulakan	38.041	38.856	76.897	97,90
11.	Ngadirejo	21.063	22.903	43.966	91,97
12.	Sudimoro	14.081	15.442	29.523	91,19
Jumlah/rata-rata		266.452	278.867	545.409	95,58

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2003

Sebagaimana umumnya pola pemukiman penduduk antar wilayah, maka penduduk di Kabupaten Pacitan juga menunjukkan kecenderungan yang

ama bahwa, sebagian besar penduduk di Kabupaten ini bermukim di pedesaan (470.096 jiwa) sedangkan sisanya bermukim di wilayah kota (55.662 jiwa) Angka kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 392 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan sangat bervariasi mulai dari yang paling rendah (278 orang per km<sup>2</sup>) sampai tertinggi (807 orang per km<sup>2</sup>)

**TABEL 2. 10.**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**  
**Tahun 2003**

Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1. Donorejo	109, 09	40. 392	370, 26
2. Punung	108, 81	32. 228	296, 20
3. Pringkuku	132, 93	37. 012	278, 44 *
4. Pacitan	77, 11	62. 282	807, 72 *
5. Kebonagung	124, 85	44. 903	359, 67
6. Arjosari	117, 06	39. 190	334, 78
7. Nawangan	124, 06	47. 997	386, 90
8. Bandar	117, 34	42. 246	360, 03
9. Tegalombo	149, 26	48. 773	326, 77
10. Tulakan	161, 61	76. 897	475, 80
11. Ngadirejo	95, 91	43.966	458, 43
12. Sudimoro	71, 86	29. 523	410, 87
<b>Jumlah</b>	<b>1.389,87</b>	<b>545.409</b>	<b>392,42</b>

\*Tingkat Kepadatan Tertinggi dan Terendah Sumber : BPS: Pacitan Dlm Angka,2003

### **2.3.3. Agama dan Mata Pencaharian Penduduk.**

Meskipun tidak ada data yang rinci mengenai jumlah pemeluk Agama di Kabupaten Pacitan ini, tetapi dapat dipastikan bahwa, mayoritas penduduk di

Sebagai wilayah yang berbasis pedesaan (rural), sebagian terbesar penduduk di Kabupaten Pacitan ini masih bergantung mata pencahariannya dari sektor pertanian baik itu tanaman pangan, lalu perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Hanya sebagian kecil dari penduduk di Kabupaten ini yang memusatkan pada mata pencaharian di sektor industri pengolahan (Tabel 2.11 dan Tabel 2.12) Dari sekitar 303.278 penduduk yang memiliki mata pencaharian di Kabupaten Pacitan, bagian terbesar (229.742 orang) tercatat bekerja di sektor pertanian, meliputi; pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan serta pertanian lainnya; atau sekitar 76 % dari total angkatan kerja yang ada (Penduduk yang sesungguhnya bekerja) di Kabupaten ini. Sisanya, yakni sekitar 15.897 orang penduduk (5 %) tercatat bekerja di sektor industri pengolahan, 15.878 orang (5%) di sektor perdagangan, 24.827 atau 8%, di sektor jasa, dan kegiatan lainnya termasuk Transportasi sebanyak 6 % (16.902 orang). Sayang, kategori "pertanian lainnya" ini tidak ada penjabarannya, sehingga sulit memprediksi secara tepat, jenis kegiatan macam apa saja yang dikelompokkan ke dalam jenis "kegiatan lainnya" (BPS : Pacitan Dalam Angka, 2003 : 67)

Nasrani, Budha dan Hindu. Pondok Pesantren di Kabupaten ini. Sedang yang lainnya memeluk agama Madrasah Tsanawiyah (26 unit) dan Madrasah Aliyah (8 unit) serta Pondok-ekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti; Madrasah Ibtidaiyah (106 unit) Kabupaten ini memeluk Agama Islam. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya

Gambaran yang lebih jelas tentang distribusi pekerjaan penduduk Kabupaten Pacitan disetiap Kecamatan, dapat dilihat dalam Tabel 2.11 dibawah ini.

**TABEL 2. 11**  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Per Kecamatan \*

	Kecamatan	Lapangan Pekerjaan Utama					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Donorejo	13.097	35	7	544	31	5.806
2.	Punung	18.680	32	10	115	103	104
3.	Pringkuku	13.594	21	221	961	49	266
4.	Pacitan	10.500	66	611	368	652	779
5.	Kebonagung	18.682	36	210	113	159	5.287
6.	Arjosari	16.185	45	16	507	119	173
7.	Nawangan	14.181	1.066	39	5.721	2.012	202
8.	Bandar	17.893	68	21	738	474	105
9.	Tegalombo	21.296	99	91	544	758	187
10.	Tulakan	27.782	1.249	102	1.323	1.147	2.604
11.	Ngadirojo	18.639	458	276	1.818	623	350
12.	Sudimoro	13.469	492	53	1.373	168	34
<b>Jumlah</b>		<b>203.998</b>	<b>3.667</b>	<b>1.657</b>	<b>14.125</b>	<b>6.295</b>	<b>15.897</b>

\* Berdasarkan data Sensus Penduduk 2000

Sumber : BPS : Pacitan Dalam Angka, 2003 : 67.

Keterangan : (1) Pertanian tanaman pangan (2) Perkebunan (3) Perikanan (4) Peternakan (5) Pertanian lain (6) Industri pengolahan.

Berdasarkan data dalam Tabel. 2. 11 dan 2. 12,( berikutnya) nampak jelas bahwa, sektor pertanian memang masih dominan sebagai sumber mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pacitan. Kenyataan ini juga didukung oleh sumber daya alam yang tersedia , meskipun sektor industri olahan yang bahan bakunya berasal dari SDA setempat seperti; bahan galian (kerajinan batu onix, batu hias ,dll) sangat besar potensinya di daerah ini .

TABEL 2.12.

**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut  
Lapangan Pekerjaan Utama Per Kecamatan \***  
*(lanjutan)*

Kecamatan	<u>Lapangan Pekerjaan Utama</u>				TT	Jumlah
	(7)	(8)	(9)	(0)		
1. Donorejo	1.077	912	170	631	-	22.310
2. Punung	516	947	153	909	-	21.569
3. Pringkuku	788	1.062	81	365	-	17.408
4. Pacitan	5.170	9.956	930	5.006	-	34.038
5. Kebonagung	790	1.255	159	331	-	27.022
6. Arjosari	1.342	1.321	237	747	6	20.698
7. Nawangan	1.037	2.645	66	570	2	27.541
8. Bandar	631	661	72	1.475	-	22.138
9. Tegalombo	998	908	140	1.293	9	26.323
10. Tulakan	1.911	2.756	246	2.271	-	41.391
11. Ngadirojo	1.311	1.910	206	534	15	26.140
12. Sudimoro	307	494	35	275	-	16.700
<b>Jumlah keseluruhan:</b>	<b>15.878</b>	<b>24.827</b>	<b>2.495</b>	<b>14.407</b>	<b>32</b>	<b>303.278</b>

\*Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2000.

Sumber : BPS; Pacitan Dalam Angka.2003

Keterangan : (7) Perdagangan (8) Jasa (9) Transportasi (0) Lainnya.

Dominasi sektor pertanian di Kabupaten Pacitan tidak hanya dalam konteks penyerapan tenaga kerja, akan tetapi juga nampak dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten ini. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2002 saja, mencapai 43,46 % ; kemudian tahun 2003, naik menjadi 44,12 % ; disusul kemudian oleh sektor Jasa masing-masing 16,42 % untuk 2002 dan 16,99 % untuk tahun 2003; dan sektor perdagangan, masing-masing sebesar 10,15 % untuk tahun 2002, dan 10,21 % untuk tahun 2003 , baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS : Pacitan Dalam Angka, 2003 : xxxi)

### 2.3.4. Angkatan Kerja.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, maka struktur penduduk di Kabupaten Pacitan ini sebenarnya termasuk ke dalam kategori penduduk tua, karena 24 % berada pada kelompok umur 0 - 14 tahun, dan 66 % berada pada kelompok umur 15- 64 tahun sedangkan sisanya, 10 % berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Gambaran tentang struktur penduduk di Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel 2.13 berikut ini :

**TABEL 2. 13.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2003.**

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	22. 017	19. 938	40. 955
5 - 9	23. 019	21. 161	44. 180
10 - 14	24. 259	22. 392	46. 651
15 - 19	24. 011	20. 695	44. 706
20 - 24	15. 410	16. 984	32. 394
25 - 29	18. 986	22. 085	41. 071
30 - 34	20. 315	23. 212	43. 528
35 - 39	21. 657	22.739	44. 397
40 - 44	19. 308	20. 076	39. 384
45 - 49	17. 455	16. 649	34. 103
50 - 54	13. 343	14. 527	27. 870
55 - 59	12. 140	13. 175	25. 315
60 - 64	11. 350	13. 768	25. 117
65 - 69	9. 086	11. 350	20. 436
70 - 74	7. 360	8. 842	16. 202
75 +	7.827	11. 273	19. 100
<b>Jumlah</b>	<b>255. 542</b>	<b>278.867</b>	<b>545. 409</b>

Sumber : BPS : Pacitan Dalam Angka, 2003 : 60

Sementara itu, jika kriteria tenaga kerja yang digunakan adalah penduduk usia 10 - 64 tahun maka, jumlah seluruh penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja (*Man Power*) hingga akhir tahun 2003, ada sebesar

04.536 orang -- atau 74 % dari total penduduk Kabupaten Pacitan. Tetapi jika kriteria yang digunakan adalah penduduk usia 15 - 64 (sesuai dengan kriteria ILO) maka jumlah tenaga kerja di Kabupaten ini pada akhir tahun 2003 adalah sebesar 66 % dari total penduduk Pacitan (Tabel 2. 13)

Tingkat pendidikan penduduk (lama sekolah atau disebut juga tahun sukses) merupakan salah satu indikator IPM (Index Pembangunan Manusia) yang selama ini banyak digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Gambaran tentang tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pacitan sampai akhir tahun 2003, adalah sebagai berikut.

Dari 486. 279 orang yang tercatat sedang menempuh pendidikan dari berbagai jenjang di Kabupaten Pacitan, mayoritas di antaranya (80 % atau 391.277 orang) berpendidikan rendah (SD atau yang sederajat). Selebihnya, 18 % atau 88.093 orang tercatat berpendidikan menengah dan sekitar 10 % atau 6.856 orang lainnya tercatat berpendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana S-1) Sementara itu, ada sekitar 2 % penduduk di Kabupaten ini yang tidak jelas benar status pendidikannya, karena tidak menjawab pertanyaan yang diajukan saat Sensus Penduduk berlangsung.

\*\*\*

## **BAB 3**

### **DESKRIPSI RESPONDEN DI TIGA KABUPATEN**

#### **3.1. KARAKTERISTIK RESPONDEN**

##### **a. Daerah Asal**

Jumlah sampel yang terambil di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Babadan dan Ponorogo, berjumlah sembilan puluh enam orang. Dari kedua Kecamatan tersebut, wilayah yang relatif cukup banyak penduduknya yang bekerja sebagai TKI adalah desa Cokromenggala dan Polorejo. Oleh karena itu, dari Desa Cokromenggala (masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ponorogo) tersedia sebanyak 37 orang (12 persen) yang dijadikan sebagai responden, sedangkan dari Desa Polorejo (masuk wilayah Kecamatan Babadan) tersedia sebanyak 59 responden (20 persen).

Jumlah responden yang diambil dari Kabupaten Tulungagung sebanyak 142 responden. Lokasi yang dipilih untuk penelitian di Kabupaten Tulungagung yaitu tiga desa di Kecamatan Besuki, yaitu Desa Keboireng, Desa Tanggulturus dan Desa Tanggul Welahan. Di tiga desa ini, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sangat besar, hampir di setiap rumah ada salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai TKI. Dari Desa Keboireng responden yang diambil sebanyak 4 orang (1 persen), dari Desa Tanggul Welahan 9 orang (3 persen) dan yang terbanyak dari desa Tanggul Turus sebanyak 123 responden (41 persen). Tanggul Turus merupakan desa yang paling banyak mengirimkan TKI di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian mengenai TKI di Kabupaten Pacitan mengambil sampel di 3 desa dalam satu kecamatan, yaitu Desa Gayuhan, Desa Jatimalang, Desa Krajan Wetan, Kecamatan

Arjosari. Alasan diambilnya wilayah tersebut karena di Kecamatan Arjosari, 3 desa tersebut mempunyai penduduk yang relatif banyak bekerja sebagai TKI daripada wilayah lainnya di Kabupaten Pacitan. Responden di masing-masing desa tersedia sebanyak 8 orang (3 persen) di Desa Gayuhan. 52 orang (17 persen) di Desa Jatimalang, 8 orang (3 persen) di Desa Krajan Wetan. Paling banyak responden diambil di Desa Jatimalang karena di desa ini penduduk yang menjadi TKI sudah banyak yang pulang karena kontrak kerjanya sudah berakhir.

**Tabel 3.1**  
**Desa Asal Responden (N=300)**

<b>Desa Asal Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Cokromenggalan (Kec. Ponorogo)	37	12
Polorejo (Kecamatan Babadan)	59	20
Keboireng, Besuki	4	1
Tanggul Turus, Besuki	123	41
Tanggul Welahan, Besuki	9	3
Gayuhan	8	3
Jatimalang	52	17
Krajan Wetan	8	3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **b. Jenis Kelamin dan Agama**

Para TKI yang berasal dari kedua desa tersebut kebanyakan adalah perempuan, dan sangat jarang atau sedikit TKI yang berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 199 orang (66,3 persen) dan sisanya, 101 orang (33,7 persen) adalah TKI berjenis kelamin laki-laki. Seluruh responden yang terambil di wilayah Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung beragama Islam.

**Tabel 3.2**  
**Jenis Kelamin Responden (N=300)**

<b>Jenis Kelamin Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Perempuan	199	66,3
laki-laki	101	33,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**c.Usia Responden Saat Ini (Setelah menjadi TKI)**

Mereka yang pernah bekerja sebagai TKI (dan saat penelitian ini dilakukan, mereka sedang di Indonesia) pada umumnya memang ada pada usia produktif atau penduduk usia kerja, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Namun demikian, usia responden dalam penelitian ini kebanyakan berada pada kisaran 21 hingga 40 tahun. Adapun komposisinya adalah: berusia 21 hingga 30 tahun sebanyak 110 orang (36,6 persen), berusia 31 hingga 40 tahun sebanyak 116 orang juga (38,6 persen) dan yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 74 orang (24,6 persen).

**Tabel 3.3**  
**Usia Responden Saat Ini (N=300)**

<b>Usia Responden Saat Ini</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
21 – 30 tahun	110	36,6
31 - 40 tahun	116	38,6
> 40 tahun	74	24,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**d.Usia Responden Saat Pertama Kali Menjadi TKI**

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, dengan menanyakan pada usia berapa mereka pertama kali menjadi TKI, nampak bahwa kepergian mereka itu sebagian besar berada pada kisaran usia di bawah 20 hingga 30 tahun (83,7 persen). Dengan memperhatikan kecenderungan data tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa kepergian para TKI itu kebanyakan pada usia yang belum matang dan mungkin pengalaman kerjanya pun juga belum banyak.

**Tabel 3.4**  
**Usia Saat Menjadi TKI (N=300)**

Usia Saat Menjadi TKI	Frekuensi	Persentase
< 20 tahun	106	35,3
21 – 30 tahun	145	48,3
31 – 40 tahun	44	14,6
> 40 tahun	5	1,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### e. Status dan Usia Pernikahan

Status pernikahan responden saat diwawancarai sebagian besar sudah menikah dan pernikahan mereka itu adalah untuk yang pertama kalinya (86,3 persen). Sedangkan sisanya, sebanyak 9 orang masih belum menikah dan 7 orang (11,4 persen) sudah pernah menikah namun kemudian bercerai dan menikah kembali untuk yang kedua kalinya.

**Tabel 3.5**  
**Status Pernikahan (N=300)**

Status Pernikahan	Frekuensi	Persentase
Sudah, pernikahan pertama	259	86,3
Sudah, pernikahan kedua	7	2,3
Belum (masih bujang/gadis)	34	11,4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Usia pernikahan responden cukup bervariasi dan kebanyakan telah menjalani pernikahan selama lebih dari 10 tahun (48,1 persen). Jika memperhatikan usia responden saat penelitian ini dilakukan dan kemudian dikaitkan dengan usia pernikahan mereka, nampak adanya kecenderungan pernikahan mereka dilakukan pada usia yang masih tergolong muda.

**Tabel 3.6**  
**Usia Pernikahan (N=300)**

<b>Usia Pernikahan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
0 – 5 tahun	121	40,3
6 – 10 tahun	70	23,3
11 – 15 tahun	57	18,9
> 15 tahun	18	5,9
Belum menikah	34	11,4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### **f. Jumlah Anak**

Bagi responden yang sudah menikah anak yang mereka miliki kebanyakan berjumlah satu hingga dua orang (69 persen). Responden yang memiliki anak dengan jumlah lebih dari tiga orang atau lebih sebanyak 15,3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jarang sekali responden yang memiliki anak banyak.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Anak (N=300)**

<b>Jumlah Kepemilikan Anak</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Belum punya	47	15,6
Satu	123	40,9
Dua	84	27,9
Tiga	41	13,6
Empat	3	0,9
Tujuh	2	0,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### **Simpulan Sementara**

Berdasarkan karakteristik demografis responden di Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden terdiri dari perempuan. Agama yang dianut oleh seluruh responden adalah Islam. Usia mereka saat penelitian ini dilakukan sebagian besar berkisar antara 21 hingga 40 tahun, dan usia saat pertama kali menjadi TKI sebagian besar antara

urang dari 20 hingga 30 tahun. Status pernikahan mereka saat ini sebagian besar juga sudah menikah dan memiliki anak antara satu hingga tiga orang.

## 3.2. KONDISI KELUARGA SEBELUM MENJADI TKI

### a. Kepemilikan dan Jenis Pekerjaan Sebelum Menjadi TKI

Nampaknya menjadi TKI di luar negeri menurut kebanyakan responden adalah suatu peluang yang paling memungkinkan dibandingkan mencari atau menunggu pekerjaan di tanah air. Hal itu nampak dari sebaran data di bawah ini yang menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan di tempat asalnya (66,3 persen). Sedangkan responden yang sudah memiliki pekerjaan tetap sebelum berangkat menjadi TKI berjumlah 30 orang (33,7 persen).

**Tabel 3.8**  
**Kepemilikan Pekerjaan Sebelum Menjadi TKI (N=300)**

<b>Kepemilikan Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya	101	33,7
Tidak	199	66,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Bagi responden yang sudah pernah bekerja sebelum mereka menjadi TKI, pekerjaan yang mereka tekuni kebanyakan adalah menjadi petani atau buruh tani (53 persen). Sedangkan sisanya bervariasi, yakni: menjadi sopir (1,9 persen), bekerja di perusahaan marmer (1,9 persen), nelayan 1,9 persen, pedagang (7,9 persen), tukang batu (8,9 persen), berwiraswasta (17,8 persen), sales (0,9 persen) dan yang pernah menjadi karyawan swasta berjumlah 3 orang (2,9 persen)

**Tabel 3.9**  
**Jenis Pekerjaan (N=101)**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Perusahaan marmer	2	1,9
Petani	53	52,4
Supir	2	1,9
Wiraswasta	18	17,8
Relayan	2	1,9
Pagang	8	7,9
Pukang batu	9	8,9
Penjual	1	0,9
Karyawan swasta	3	2,9
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>

#### **b. Penghasilan dari Pekerjaan Sebelum Menjadi TKI**

Apabila memperhatikan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh responden sebelum mereka menjadi TKI maka besar penghasilan yang mereka peroleh pun nampaknya berkorelasi. Artinya, dengan jenis mata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang atau "bakul" kecil-kecilan di desanya, maka penghasilan yang mereka terima pun dapat dikatakan pas-pasan atau bahkan kurang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Buktinya adalah bahwa mereka yang berpenghasilan rendah (100 ribu hingga 200 ribu rupiah) jumlahnya paling banyak, yaitu 58,4 persen. Sedangkan responden yang berpenghasilan 201 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah sebanyak 20 orang atau 19,8 persen, yang berpenghasilan antara 301 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah sebanyak 2 orang atau 1,9 persen, dan yang berpenghasilan di atas 400 ribu rupiah sebanyak 20 orang atau 19,8 persen.

**Tabel 3.10**  
**Besar Penghasilan per Bulan Sebelum Menjadi TKI (N=101)**

<b>Besar Penghasilan (dalam rupiah)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
100 ribu - 200 ribu	59	58,4
201 ribu - 300 ribu	20	19,8
301 ribu - 400 ribu	2	1,9
401 ribu - 500 ribu	18	17,8
> 500 ribu	2	1,9
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>

Penghasilan yang relatif rendah tersebut apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk menanggung seluruh anggota keluarga nampaknya tidak mencukupi. Sebanyak 57 responden (56,4 persen) mengatakan "tidak cukup" apabila penghasilannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga; sebanyak 25 responden (24,7 persen) menjawab "kadang-kadang cukup" bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sisanya, 18,8 persen (19 responden) mengatakan "cukup" untuk memenuhi kebutuhan keluarga sepanjang tahun.

**Tabel 3.11**  
**Penghasilan Untuk Biaya Hidup Keluarga(N=101)**

<b>Cukup Tidaknya Penghasilan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, cukup	19	18,8
Kadang-kadang cukup	25	24,7
Tidak cukup	57	56,4
<b>Jumlah</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>

### **c. Biaya Hidup Responden Sebelum Menjadi TKI**

Seratus sembilan puluh sembilan responden yang belum pernah bekerja sebelum menjadi TKI mengatakan bahwa, biaya hidup mereka ditanggung oleh kepala keluarga. Kepala keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah: orang tua (52,2 persen) dan suami (47,8 persen).

**Tabel 3. 12**  
**Penjamin Biaya Hidup Responden Sebelum Menjadi TKI**  
**(N=199)**

<b>Penanggung Biaya Hidup</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Orangtua	104	52,2
Suami/istri	95	47,8
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>100,0</b>

**d. Responden Kepala Keluarga dan Jumlah Tanggungannya**

Oleh karena hampir sebagian besar responden yang menjadi TKI adalah perempuan, dan di antara mereka juga banyak yang sudah menikah maka mereka menyebut dirinya bukan sebagai kepala keluarga. Hal itu karena mereka menganggap yang menjadi kepala keluarga adalah suaminya, meskipun sebenarnya mereka juga menjadi penyumbang utama nafkah keluarga. Hanya ada 33,3 persen (100 responden) yang mengatakan bahwa dirinya adalah kepala keluarga, dan dari keseluruhan responden yang menjadi kepala keluarga itu, jumlah tanggungan yang dimilikinya relatif sedikit, yaitu dua orang yang terdiri dari istri atau suami dan orangtua serta anak.

**Tabel 3. 13**  
**Status Responden dalam Rumah Tangga (N=300)**

<b>Status Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Kepala Keluarga	100	33,3
Bukan kepala keluarga	200	66,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**e. Penggunaan Penghasilan Jika Bukan Kepala Keluarga**

Dua ratus orang responden yang menganggap diri mereka bukan kepala keluarga (yang notabene memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menghidupi seluruh anggota keluarga) ternyata dari hasil kerjanya menjadi

KI, sebagian besar penghasilannya tetap saja juga digunakan untuk membantu menanggung hidup anggota keluarga yang lain. Sebanyak 61 persen responden malah mengatakan bahwa penghasilan yang mereka terima digunakan untuk membantu suami meringankan beban pengeluaran keluarga luasnya, dan sebanyak 33,5 persen responden lainnya, menyebut bahwa penghasilan yang diterima digunakan untuk membantu orang tua. Hanya sebelas orang yang merasa bahwa penghasilan yang diterimanya untuk membiayai hidupnya sendiri.

**Tabel 3. 14**  
**Penggunaan Penghasilan (N=200)**  
**Jika Responden Bukan Kepala Keluarga**

<b>Penggunaan Penghasilan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Untuk membiayai diri sendiri	11	5,5
Membantu orangtua meringankan beban keluarga	67	33,5
Membantu suami, meringankan beban keluarga luas ( <i>extended family</i> )	122	61
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>

#### **f. Kepemilikan Rumah Sebelum Menjadi TKI**

Rumah adalah salah satu harta benda yang berharga bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu berhasil-tidaknya kehidupan ekonomi suatu keluarga dapat pula diukur dari (sudah) dimiliki atau tidaknya sebuah rumah bagi keluarga tersebut. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa responden yang telah memiliki rumah sendiri sebelum mereka bekerja sebagai TKI ada sebanyak 71 orang (23,6 persen), sedangkan sebagian besar sisanya (76,3 persen atau 229 orang) belum memiliki rumah sendiri. Dari 71 responden yang mengaku telah memiliki rumah, sebanyak 46 orang mengatakan bahwa luas

rumahnya kurang dari 100 meter persegi, dan hanya 14 orang mengatakan bahwa luas rumahnya lebih dari 100 meter persegi.

Bagi 229 responden yang mengatakan bahwa mereka belum memiliki rumah dari hasil keringat sendiri, menyebutkan bahwa mereka masih ikut orang tua (190 orang) dan 39 responden mengakui bahwa mereka masih ikut mertua atau mendapatkan warisan dari orang tuanya.

**Tabel 3. 15**  
**Kepemilikan Rumah Sebelum Menjadi TKI (N=300)**

<b>Kepemilikan Rumah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, milik sendiri	71	23,6
Tidak	229	76,4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **g. Kepemilikan Sawah Sebelum Menjadi TKI**

Selain rumah, sawah atau lahan pertanian juga dapat digunakan sebagai lambang status sosial-ekonomi bagi orang desa. Apabila seseorang memiliki lahan atau sawah yang diusahakan maka dapat dianggap bahwa tabungannya atau simpanan mereka sudah cukup memadai.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 16 orang (5,3 persen) yang memiliki sawah, sedangkan sebagian besar sisanya (284 responden atau 94,6 persen) mengaku tidak memiliki sawah sedikitpun dari hasil keringat mereka.

**Tabel 3. 16**  
**Kepemilikan Sawah Sebelum Menjadi TKI (N=300)**

<b>Kepemilikan Sawah Sebelum Menjadi TKI</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, punya	16	5,3
Tidak punya	284	94,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Namun demikian, ketika mereka ditanya, apakah ada warisan tanah yang mereka miliki, hanya ada 34 responden (11,3 persen) mengatakan bahwa mereka memilikinya. Adapun luas tanah warisan yang mereka miliki ada yang kurang dari 100 meter persegi (sebanyak 13 responden) dan 21 responden menyebut di atas 100 meter persegi untuk luas tanah warisannya.

#### **h. Tingkat Pendidikan Responden**

Berdasarkan sebaran data yang ada pada tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa masih ada responden yang tidak lulus SD/Madrasah sebanyak 7 orang (2,3 persen). Sedangkan responden yang lulus SD atau Madrasah sebanyak 89 orang atau 29,6 persen, responden yang pernah mengenyam SMP namun tak lulus (23,3 persen). Sedangkan responden yang telah menamatkan pendidikan SMP sebanyak 13,9 persen, dan yang lulus SMA sebanyak 89 orang (29,6 persen). Hal yang cukup menarik, ada 3 responden atau 1,4 persen yang lulus Perguruan Tinggi/Akademi. Dengan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa para TKI yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung tingkat pendidikan mereka sebagian besar (55,2 %) masih rendah (SLP tidak tamat dan SD)

**Tabel 3. 17**  
**Tingkat Pendidikan Responden (N=300)**

<b>Tingkat Pendidikan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SD/Madrasah tidak lulus	7	2,3
SD/Madrasah lulus	89	29,6
SMP/ sederajat, tidak lulus	70	23,3
SMP/ sederajat lulus	42	13,9
SMA/ sederajat lulus	89	29,6
Akademi/ perguruan tinggi	3	0,9
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### i. Bahasa Asing yang Dikuasai Responden

Penguasaan berbahasa asing mereka dapat diacungi jempol. Terbukti, hanya 41 orang (13,6 persen) yang memang tidak menguasai bahasa asing ataupun. Kebanyakan responden mengaku bahwa bahasa asing yang dikuasainya adalah Bahasa Arab sebanyak 113 orang atau 37,6 persen. 14,9 persen menguasai Bahasa Inggris, 13,3 persen menguasai Bahasa Mandarin, 16,3 persen bisa berbahasa Melayu, dan 3,9 persen menguasai Bahasa Kantonis.

**Tabel 3. 18**  
**Bahasa yang Dikuasai Responden (N=300)**

Bahasa yang Dikuasai Responden	Frekuensi	Persentase
Tidak memiliki	41	13,6
Arab	113	37,6
Inggris	45	14,9
Mandarin	40	13,3
Melayu	49	16,3
Kantonis	12	3,9
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### j. Penguasaan Keterampilan Sebelum Menjadi TKI

Syarat yang seharusnya dimiliki oleh setiap TKI sebagai bekal bekerja di negeri orang adalah dimiliki atau dikuasainya suatu keterampilan. Namun sayangnya, bagi responden di wilayah Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung, tidak semua memiliki keterampilan saat pertama kali ke luar negeri. Tetapi mayoritas (68 %) di antaranya mengaku memiliki keterampilan. Adapun keterampilan yang pernah mereka pelajari adalah menjahit, bordir, konveksi), merias pengantin, menyulam jaring, tukang batu, konstruksi dan supir kendaraan. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 persen responden (95

ang) tidak pernah mengikuti kursus keterampilan alias tidak memiliki keterampilan spesifik yang dapat meningkatkan nilai jual (*selling point*) mereka sebagai TKI.

**Tabel 3.19**  
**Ketrampilan yang Dimiliki Sebelum Menjadi TKI**  
**(N=300)**

Ketrampilan yang Dimiliki Sebelum Menjadi TKI	Frekuensi	Persentase
Ya, memiliki	205	68
Tidak memiliki	95	32
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Seharusnya suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dapat membantunya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya itu. Dari dua ratus lima orang yang telah memiliki bekal keterampilan, sebanyak lima puluh dua, atau 25 persen mengaku bahwa apa yang mereka miliki itu sangat membantu pekerjaan yang mereka dapatkan selama menjadi TKI. Sedangkan sebanyak 153 orang atau 75 persen mengatakan bahwa keterampilan yang mereka miliki di daerah asal (pekerjaan pertanian, konveksi) tidak membantu pekerjaan mereka, karena pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan konstruksi (buruh bangunan).

### **Simpulan Sementara**

Memperhatikan kondisi sosial-ekonomi responden sebelum menjadi TKI, maka beberapa faktor yang menarik untuk dicermati adalah: (a) sebagian besar responden yang diteliti ini, menjadi TKI di luar negeri untuk pertama kalinya; (b) bagi mereka yang pernah bekerja sebelum berangkat ke luar negeri pada umumnya menekuni pekerjaan sebagai petani atau buruh tani, sisanya

dalah sebagai buruh konveksi, buruh di perusahaan marmer, sopir, nelayan, ukang batu, sales, wiraswasta dan karyawan swasta; (c) oleh karena jenis pekerjaan yang ditekuni oleh para responden sebelum menjadi TKI boleh dikatakan adalah pekerjaan tradisional (seperti petani atau nelayan) maka besarnya penghasilan yang mereka terima relatif kecil (Rp. 200 ribu ke bawah), sehingga mereka merasa penghasilannya itu tidak mencukupi biaya hidup keluarganya; (d) bagi responden yang belum pernah bekerja sebelum menjadi TKI, yang menanggung biaya hidup mereka adalah orang tuanya atau suami/istrinya, sedangkan responden yang menjadi kepala keluarga jumlahnya relatif sedikit (hanya sekitar 10 persen); (f) penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri oleh sebagian besar responden digunakan untuk membantu orang tua atau suami untuk meringankan beban keluarga luas; (g) kebanyakan TKI juga tidak memiliki rumah atau sawah sendiri sebelum mereka bekerja di luar negeri; (h) tingkat pendidikan responden sangat bervariasi, mulai dari yang tidak lulus SD sampai yang lulus Perguruan Tinggi/Akademi; (i) bahasa asing yang mereka kuasai kebanyakan adalah bahasa Arab, tetapi ada sebagian yang menguasai Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu dan Kantonis; (j) dan sebagian besar responden mengaku mempunyai bekal keterampilan atau keahlian sebelum mereka berangkat ke luar negeri, sedangkan yang telah memiliki bekal keterampilan sebelum menjadi TKI, sebagian mengaku (52 orang) bahwa keterampilan yang dimilikinya itu sangat membantu atau sesuai dengan pekerjaan yang mereka dapatkan selama menjadi TKI. Namun demikian, ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa ketrampilan yang dimilikinya itu tidak menunjang pekerjaannya selama di luar negeri. \* \* \*

## **BAB 4**

### **FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TKI DI LUAR NEGERI**

#### **1. PROSES MIGRASI TKI KE LUAR NEGERI .**

Kepergian seseorang untuk bekerja mungkin tidak akan menjadi beban karena apa yang akan dilakukannya itu bermanfaat bagi kesejahteraan keluarganya. Persoalannya menjadi lain apabila tempat bekerja itu di luar negeri, di mana segala persyaratan administratif ke-imigrasian hingga legalitas kerja dan berbagai kemungkinan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan demikian bekerja, apalagi bekerja di luar negeri, meskipun secara ekonomi akan mendatangkan keuntungan, tetapi semua harus dipersiapkan dengan saksama. Persiapan itu meliputi berbagai aspek, apakah kesiapan finansial untuk membayar biaya migrasi, berbagai keperluan yang mungkin dibutuhkan dalam pengurusan keberangkatan ke luar negeri, ataupun kesiapan keterampilan, sikap, dan pengetahuan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian yang mungkin juga akan mereka temui ketika tiba di negara tujuan.

Paparan berikut ini mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan proses keberangkatan TKI hingga kesuksesan ataupun kegagalan yang dialami oleh para responden di tiga kabupaten di Jawa Timur ini.

### a. Lama Bekerja di Luar Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, cukup banyak responden yang hanya bekerja di luar negeri selama 2 hingga 3 tahun (55,3 persen). Namun demikian tidak sedikit pula yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun (25,4 persen). Singkatnya waktu bekerja, di luar negeri itu menurut pengakuan responden karena mereka bekerja berdasarkan kontrak dengan periode waktu yang relatif singkat. Jika kontrak telah habis, di antara mereka ada yang kembali ke Indonesia dan tidak lagi berminat menjadi TKI. Namun ada pula yang memperpanjang kontrak atau pindah pekerjaan dengan menggunakan kontrak yang baru, sehingga kesempatan untuk bekerja di luar negeri itu menjadi lebih lama.

**Tabel 4.1:**  
**Lama Bekerja di Luar Negeri**  
**(N=300)**

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
≤1 tahun	4	1,3
2 - 3 tahun	166	55,3
4 - 5 tahun	60	20
6-7 tahun	18	6
8-9 tahun	23	7,7
≥ 10 tahun	29	9,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### b. Asal Informasi, Faktor Pendorong Bekerja di Luar Negeri

Keinginan untuk bekerja di luar negeri memang harus didorong oleh niat yang kuat dan inisiatif untuk mewujudkannya. Inisiatif itu pertama-tama memang harus berasal dari diri sendiri, namun dengan dorongan atau dukungan orang lain, misalnya teman, kerabat atau anggota keluarga terdekat, juga dapat menjadi faktor yang memperkuat tekad seseorang untuk segera

newujudkan keingannya itu. Responden dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung ini sebagian besar mengaku bahwa kepergian mereka ke luar negeri adalah atas inisiatif sendiri (91,3 persen). Hanya ada 7 orang yang mengatakan bahwa kepergian mereka adalah karena ajakan teman (migran lama) yang sudah lebih dulu menjadi TKI.

**Tabel 4.2.**  
**Inisiatif Bekerja di Luar Negeri (N=300)**

<b>Inisiatif Bekerja di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Inisiatif sendiri tanpa dorongan orang lain	274	91,3
Dorongan suami/orangtua/kerabat	19	6,3
Ajakan teman yang sudah lebih dulu jadi TKI (migran lama)	7	2,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Meskipun kebanyakan responden mengatakan bahwa kepergiannya ke luar negeri itu atas inisiatif sendiri, namun informasi yang mereka dapatkan tentang ada-tidaknya lowongan pekerjaan di luar negeri kebanyakan berasal dari orang lain. Orang-orang yang memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan di luar negeri antara lain adalah: saudara atau kerabat, teman, pencari atau perantara kerja (Teikong), tetangga dan ada pula yang mendapatkannya dari Dinas Tenaga Kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Dari sekian pihak pemberi informasi itu, kebanyakan responden menyebut orang-orang terdekat, seperti saudara dan teman-teman mereka ( 77,3 persen), yang lebih banyak mengabarkan berbagai informasi pekerjaan yang ada di luar negeri.

**Tabel 4.3.**  
**Asal Informasi Lowongan Pekerjaan di Luar Negeri**  
**(N=300)**

Asal Informasi	Frekuensi	Persentase
Saudara	53	17,6
teman	179	59,7
Terkong	28	9,3
Tetangga	20	6,7
Depnaker/PJTKI	20	6,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### c. Jenis Persyaratan Untuk Menjadi TKI.

Menjadi TKI tidak semudah seperti bekerja di dalam negeri yang tidak memerlukan syarat-syarat rumit. Pergi ke luar negeri memerlukan persyaratan khusus seperti: tersedianya paspor, visa, kartu kesehatan, exit permit, akta kelahiran, surat nikah bagi yang sudah menikah, dan kontrak kerja serta kelengkapan administratif lainnya.

Berdasarkan pengakuan responden, mayoritas dari mereka (80,7 persen) memang menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut. Namun ada pula responden (14 persen) yang mengaku bahwa mereka tidak memakai persyaratan administratif. Tetapi yang cukup memprihatinkan, ada sekitar 5,3 persen responden justru tidak tahu bahwa untuk sampai di luar negeri mereka harus membekali diri dengan berbagai kelengkapan administratif dan keimigrasian. Kemungkinan mereka itu adalah TKI generasi pertama yang berangkat pada pertengahan tahun 1980-an.

**Tabel 4.4.**  
**Persyaratan ke Luar Negeri (N=300)**

Persyaratan ke Luar Negeri	Frekuensi	Persentase
Pakai persyaratan	242	80,7
Tidak tahu	16	5,3
Tidak pakai persyaratan	42	14
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Yang tidak tahu tentang tingkat kesulitan dalam mengurus persyaratan, Seperti yang telah diungkapkan pada uraian di atas, di antara mereka

**e. Pihak yang Mengurus Persyaratan Kerja ke Luar Negeri**

Tingkat Kesulitan Pengurusan Persyaratan	Frekuensi	Persentase
Kumulatif, waktunya lama sekali	10	3,3
Cukup mudah	146	48,7
Tidak tahu	144	48
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**Tabel 4.5.**  
**Tingkat Kesulitan Pengurusan Persyaratan**  
**(N=300)**

Oleh karena terdapat berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan ke luar negeri, maka jelas sekali di antara mereka merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah administratif tersebut. Ada 10 responden (3,3 persen) yang mengakui hal tersebut, di mana mereka merasakan keruwetan ketika harus mengurus syarat-syarat keberangkatannya. Tetapi yang cukup mengherankan, ada sekitar 144 responden (48 persen) justru mengatakan tidak tahu-menahu tentang tingkat kesulitan dalam mengurus persyaratan menjadi TKI. Kemungkinan mereka yang tidak tahu itu telah dirusakan segala persyaratannya oleh orang atau pihak lain, apakah itu calo atau perantara kerja (Telkong) atau pihak P/TKI yang akan memberangkatkan mereka. Sedangkan sisanya, 48,7 persen mengaku mendapatkan kemudahan dalam mengurus segala persyaratan untuk menjadi TKI.

**d. Tingkat Kesulitan : Mengurus Persyaratan TKI**

nemang seluruhnya diurus oleh Teikong (28,3 persen) dan PJTKI (21 persen). Namun ada pula responden yang mengatakan bahwa sebagian persyaratan diurus oleh mereka sendiri dan sebagian lagi dibantu oleh Teikong atau perantara kerja (33,3 persen). Dengan demikian peran para perantara pencari kerja (Teikong atau PJTKI) relatif besar dalam memperlancar keberangkatan para calon TKI ini.

**Tabel 4.6.**

**Pihak yang Mengurusi Persyaratan Kerja Ke Luar Negeri (N=300)**

<b>Pihak yang Mengurusi Persyaratan Kerja Ke LN</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak pakai	42	14
Diurus tekong seluruhnya	85	28,3
Sebagian diurus sendiri	100	33,3
Semuanya diurus sendiri	10	3,3
Diurus PJTKI seluruhnya	63	21
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **f. Biaya dan Cara Pembayaran Menjadi TKI**

Bekerja di luar negeri nampaknya membutuhkan modal awal untuk membiayai berbagai persyaratan dan perlengkapan keberangkatannya. Biaya yang dikeluarkan para responden itu cukup bervariasi. Responden yang mengaku bahwa dirinya hanya membayar kurang dari satu juta rupiah, ada 38,7 persen. Sedangkan yang membayar antara satu hingga lima juta rupiah, dialami oleh 101 responden (33,7 persen). Bahkan 10 responden (3,6 persen) mengaku telah mengeluarkan uang hingga sepuluh juta atau lebih. Namun, ada pula responden (24 persen) yang mengatakan tidak tahu karena biaya-biaya itu nanti akan di ambil atau dipotong dari gaji yang kelak mereka terima.

**Tabel 4.7.**  
**Biaya Untuk Membayar Persyaratan (N=300)**

<b>Biaya Untuk Membayar Persyaratan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
tidak tahu	72	24
< 1 juta rupiah	116	38,7
1 - 5 juta rupiah	101	33,7
5,1 juta - 10 juta rupiah	9	3
> 10 juta rupiah	2	0,6
<b>Jumlah</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Bagi responden yang lebih dulu membayar biaya pengurusan persyaratan ke luar negeri sebelum mereka diterima bekerja, kebanyakan (80,7 persen) melunasi lebih dulu biaya-biaya itu. Namun ada pula yang membayar dengan cara mengangsur, yaitu dibayar sebelum mereka berangkat, dan sisanya dipotong dari gaji apabila mereka sudah diterima bekerja (19,3 persen).

**Tabel 4.8.**  
**Cara Melunasi Biaya Ke Luar Negeri (N=228)**

<b>Cara Melunasi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Dilunasi langsung	184	80,7
Diangsur/potong gaji	44	19,3
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>100,0</b>

Bagi responden yang membayar lebih dulu biaya pengurusan kelengkapan administrasi, dana yang mereka gunakan untuk itu pada umumnya berasal dari uang mereka sendiri (52,2 persen) dan dari orang tua mereka (19,3 persen). Namun, ada pula yang meminjam dari kerabatnya (17,5 persen).

**Tabel 4.9.****Cara Memperoleh Biaya Ke Luar Negeri (N=228)**

<b>Cara Memperoleh Biaya</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Pinjam kerabat	40	17,5
Dipinjami teikong atau PJTKI	25	11
Orangtua	44	19,3
Uang sendiri	119	52,2
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>100,0</b>

**g.Cara Berangkat ke Luar Negeri.**

Ada dua sarana transportasi yang lazim digunakan para TKI untuk membawa mereka sampai di negara tempat bekerja, yaitu pesawat udara atau kapal laut. Di era yang serba cepat ini pesawat udaralah yang lebih banyak dipilih responden. Hal itu diakui oleh 217 responden (72 persen) yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih menggunakan pesawat udara. Hanya 28 persen menggunakan kapal laut ketika pertama kali mereka berangkat bekerja ke luar negeri.

**Tabel 4.10  
Cara Berangkat Ke Luar Negeri (N=300)**

<b>Cara Berangkat Ke Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Naik Pesawat udara	217	72
Dengan (kapal laut)	83	28
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**h.Negara Tujuan dan Pekerjaan di Luar Negeri**

Negara yang menjadi tempat tujuan bekerja dari kebanyakan responden di tiga kabupaten ini terkonsentrasi di dua tempat, yaitu Malaysia (37 persen) dan Timur Tengah (41 persen). Negara lain yang nampaknya juga menarik untuk menjadi tempat tujuan bekerja menurut beberapa responden adalah:

Adapun pekerjaan utama yang mereka dapatkan cukup bervariasi, namun konsentrasi terbanyak adalah sebagai pembantu rumah tangga (36 persen). Jenis pekerjaan lain yang peluangnya cukup terbuka atau mudah dimasuki para TKI dari Indonesia nampaknya adalah sebagai pekerja di perkebunan (12,3 persen), buruh bangunan (12 persen), dan pekerja di pabrik (6,3 persen). Hanya ada 2 responden yang nampaknya mendapatkan pekerjaan menarik, yaitu sebagai karyawan di perusahaan kontraktor. Pekerjaan tersebut memang membutuhkan keahlian atau keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain yang dimasuki oleh kebanyakan tenaga kerja dari Indonesia.

Negara Tujuan TKI	Frekuensi	Persentase
Malaysia	110	37
Brunei Darussalam	7	2,3
Timur Tengah	123	41
Korea	10	3,3
Taiwan	16	5,3
Hongkong	16	5,3
Taipei	8	2,7
Singapura	10	3,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Tabel 4.11  
Negara Tujuan TKI Pertama Kali (N=300)

Malaysia (5,3 persen), Hongkong (5,3 persen), Korea (3,3 persen), Singapura (3,3 persen), Taipei (2,7 persen) dan Brunei Darussalam (2,3 persen).

**Tabel 4.12.**  
**Pekerjaan Utama di Luar Negeri (N=300)**

<b>Pekerjaan Utama di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Pembantu Rumah Tangga	180	36
Buruh bangunan	36	12
Pramuniaga	11	3,7
Pekerja di Perkebunan	37	12,3
Pekerja di Pabrik	19	6,3
Bekerja di perusahaan kontraktor	2	0,6
Sopir	4	1,3
Sebagai Nelayan / usaha perikanan	6	1,9
Baby sitter	5	1,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan data yang terkumpul tersebut maka, dapat dikatakan bahwa lapangan kerja yang dimasuki oleh sebagian besar TKI, khususnya dari ketiga kabupaten tersebut, sampai saat ini masih berada di sektor-sektor domestik yakni 36 % (sebagai PRT atau Inang Pengasuh) yang tidak membutuhkan keahlian khusus atau keterampilan tinggi, apalagi tingkat pendidikan yang tinggi.

#### **1. Masalah Surat Kontrak Kerja**

Surat kontrak kerja sangat penting bagi para TKI. Surat itu dapat digunakan sebagai pegangan bila mereka mengalami suatu persoalan selama bekerja di luar negeri. Melalui surat kontrak kerja seorang TKI dapat menuntut hak-haknya dan mendapat perlindungan bila mengalami ketidakadilan atau perselisihan. Untuk mengetahui apakah para TKI yang berasal dari Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung itu mempunyai surat kontrak kerja, maka datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.13.**  
**Kepemilikan Surat Kontrak Kerja (N=300)**

Kepemilikan Surat Kontrak Kerja	Frekuensi	Persentase
Ya, memiliki	232	77,3
Tidak tahu	12	4
Tidak pakai kontrak	56	18,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (77,3 persen) mengatakan memiliki surat kontrak kerja. Meskipun demikian, masih ada saja responden yang cukup berani untuk tidak mengantongi surat kontrak kerja (18,7 persen) atau tidak mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukannya itu sudah berdasarkan kontrak kerja atau belum (4 persen).

Meskipun sebagian besar responden mengatakan bahwa pekerjaan mereka itu didasarkan atas kontrak kerja, namun ketika ditanya apakah mereka masih menyimpan surat kontrak itu, ternyata cukup banyak responden (56 persen) yang mengatakan tidak menyimpan sendiri atau tidak punya salinan copy suratnya. Sedangkan yang menyimpan surat kontrak kerja selama mereka menjadi TKI jumlahnya lebih sedikit, yaitu sekitar 44 persen.

**Tabel 4.14.**  
**Menyimpan Surat Kontrak Kerja (N=232)**

TKI yang Menyimpan Surat Kontrak Kerja	Frekuensi	Persentase
Ya, menyimpan	102	44
Tidak menyimpan	130	56
<b>Total</b>	<b>232</b>	<b>100,0</b>

#### **J. Perlakuan Majikan Terhadap TKI.**

Oleh karena hampir seluruh responden dalam penelitian ini bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai yang berada langsung di bawah

pengawasan majikannya, maka ada kemungkinan mereka mendapat perlakuan buruk dari majikannya. Dari 300 responden itu, yang pernah mendapat perlakuan buruk hanya dialami oleh 10 responden (3,4 persen). Perlakuan buruk itu di antaranya adalah: majikannya kasar (2,7 persen) atau sering terlambat membayar gaji (0,7 persen). Sebagian besar responden (96,6 persen) mengatakan bahwa mereka mendapat perlakuan baik dari para majikannya.

**Tabel 4.15.**  
**Perlakuan Majikan di Tempat Kerja (N=300)**

Perlakuan Majikan di Tempat Kerja	Frekuensi	Persentase
Majikan baik	252	84
Majikan kasar	37	12
Majikan sering tidak membayar gaji	11	4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**k. Pindah Pekerjaan Selama Di Luar Negeri.**

Pekerjaan yang dijanjikan pada para pencari kerja ketika mereka masih di Indonesia, oleh sebagian besar responden diakui sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima di luar negeri. Namun, ada pula responden yang tampaknya tidak cocok dengan pekerjaan yang dijanjikan itu. Bagi yang merasa tidak cocok dengan pekerjaan awal mereka, maka ada kesempatan pula untuk mencari atau pindah pekerjaan. Sebanyak 57 responden (19 persen) pernah melakukan hal itu.

**Tabel 4. 16.**  
**Pernah Tidaknya Pindah Pekerjaan (N=300)**

Pernah Tidaknya Pindah Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Ya, pernah	57	19
Tidak pernah	243	81
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Bagi mereka yang pernah berpindah pekerjaan, kebanyakan (63,2 persen) jangka waktu kepindahan mereka dari pekerjaan pertama ke pekerjaan kedua antara 1 hingga 6 bulan. Sedangkan yang pindah pekerjaan setelah mereka bekerja di tempat pertama selama lebih dari 7 bulan dan bahkan ada yang lebih dari 3 tahun, keseluruhannya berjumlah 21 responden (36,8 persen).

**Tabel 4.17.**  
**Jarak Antara Pekerjaan Pertama ke Pekerjaan Kedua (N=57)**

Jarak Antara Pekerjaan Pertama ke Pekerjaan Kedua	Frekuensi	Persentase
1 - 6 bulan	36	63,2
7 - 12 bulan	7	12,3
1,1 - 1,6 tahun	5	8,7
1,7 - 2 tahun	3	5,3
2,1 - 2,6 tahun	0	0
2,7 - 3 tahun	1	1,8
> 3 tahun	5	8,7
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>

### **1. Gaji Pertama Kali Ketika Bekerja di Luar Negeri.**

Oleh karena para responden bekerja tersebar di berbagai negara, maka mata uang yang digunakan untuk membayar gaji mereka juga berlainan. Ada beberapa mata uang berbeda yang disebut oleh para responden, yaitu: *Ringgit Malaysia, Real Arab Saudi, Ente*, yaitu mata uang baru di Taiwan dan Taipei, *Dollar Hongkong dan Dollar Singapura*. Meskipun mata uang yang diterima berbeda, namun bila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, maka gaji yang diterima oleh kebanyakan responden (44,3 persen) pada waktu pertama kali bekerja sebagai TKI berkisar antara Rp. 1 juta hingga 2 juta rupiah. Responden yang bergaji di atas 2 juta hingga 3 juta rupiah sebanyak 29,3 persen. Gaji tertinggi yang diterima responden dalam penelitian ini adalah

antara Rp.5 juta hingga 6 juta rupiah per bulannya (10 responden atau 3,3 persen).

**Tabel 4.18.**

**Gaji yang Diterima Pertama Kali Bekerja di Luar Negeri (N=300)**

<b>Gaji yang Diterima Pertama Kali Bekerja di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
< 1 juta rupiah	41	13,7
1 - 2 juta rupiah	133	44,3
2,1 - 3 juta rupiah	88	29,3
3,1 - 4 juta rupiah	8	2,7
4,1 - 5 juta rupiah	2	0,7
5,1 - 6 juta rupiah	10	3,3
Lupa/tidak ingat lagi	18	6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan interval perolehan gaji di atas, dapat diketahui bahwa para TKI dari tiga kabupaten ini sebagian besar memperoleh gaji pertamanya sebanyak 3 juta rupiah ke bawah. Untuk standar penggajian karyawan atau buruh di Indonesia, angka tersebut memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pekerja kasar (*unskillable*) di Indonesia pada umumnya.

**m. Kesesuaian antara Gaji dan Kontrak Kerja.**

Apabila seorang pekerja sudah menandatangani kontrak kerja maka persoalan gaji atau upah biasanya juga telah disepakati di antara pemberi dan penerima kerja. Begitu pula dengan para responden dalam studi ini. Pada umumnya (84 persen) mereka mengatakan bahwa gaji yang diterimanya sudah sesuai dengan kontrak kerja yang telah mereka sepakati. Responden yang tidak ingat lagi berapa gaji yang pertama kali ia terima, ada sebagian kecil yang mengatakan lupa (3 persen) kemudian sebanyak 9 persen menyatakan tidak sesuai antara gaji yang diterima dan kontrak yang telah disepakati. Sementara responden yang memang tidak dibekali dengan surat kontrak kerja

nengatakan "tidak tahu" mengenai ada-tidaknya kesesuaian antara gaji yang didapat dengan gaji yang seharusnya mereka terima ( 4 persen).

**Tabel 4.19.**  
**Kesesuaian Gaji dengan Kontrak yang Disepakati**

<b>Sesuai/tidaknya</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Lupa/tidak ingat lagi	8	3
Sesuai Kontrak	252	84
Tidak Sesuai	26	9
Tidak tahu	14	4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **n. Cara Mendapatkan Pekerjaan dan Peran PJTKI**

Mencari atau mendapatkan pekerjaan di luar negeri, sangat sulit ditempuh seorang diri tanpa perantara orang lain atau agen pengerah tenaga kerja, apalagi bila orang yang mencari kerja itu belum berpengalaman dan belum pernah bekerja di luar negeri. Menyadari banyaknya warga negara Indonesia yang ingin mencari kerja di luar negeri, maka Pemerintah Indonesia c.q. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) melalui Dirjen PPTKLN; mengatur keberangkatan para TKI itu melalui agen-agen resmi yang telah terdaftar dan direkomendasi oleh Depnakertrans.

Berdasarkan pengakuan responden, sebagian besar di antara mereka (69 persen) memang telah melalui jalur resmi ketika pertama kali pergi menjadi TKI. Hanya ada 49 orang (16,3 persen) yang mengatakan bahwa dirinya menggunakan pengerah tenaga kerja tetapi tidak resmi alias tidak terdaftar di Depnakertrans, dan sebanyak 14,7 persen mengatakan bahwa dirinya berusaha berangkat ikut tetangga yang mudik ketika pergi menjadi TKI di luar negeri, karena menyusul saudara atau suami, yang sudah lebih dulu menjadi TKI.

**Tabel 4.20.**  
**Jalur yang Ditempuh (N=300)**

Jalur yang Ditempuh	Frekuensi	Persentase
Jalur resmi (legal)	207	69
Jalur tidak resmi (illegal)	49	16,3
Ikut teman yang mudik	44	14,7
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Bagi mereka yang menempuh keberangkatannya melalui jalur tidak resmi atau atas usaha sendiri, kepergian mereka itu ada sebagian yang diajak dan dijamin oleh migran lama (teman atau kerabatnya) yang sudah berada di luar negeri lebih dulu. Cara beremigrasi seperti itu mereka sebut *calling visa*. Artinya, ketika majikan membutuhkan tambahan tenaga kerja baru, TKI yang mudik ini kemudian merekrut kerabatnya sendiri untuk dibawa serta saat ia kembali ke luar negeri. Di Bandara calon TKI baru tersebut dijemput oleh calon majikan, agar tidak melalui pemeriksaan polisi Imigrasi.

Nama agen atau lembaga penerah tenaga kerja resmi menurut pengakuan 207 responden dapat dilihat pada lampiran yang disertakan di bagian akhir laporan ini.

#### **o. Penampungan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri.**

Oleh karena para agen penerah tenaga kerja tidak bisa langsung menyalurkan para TKI ke luar negeri dalam waktu yang cepat, maka mereka menampung atau mengasramakan lebih dulu para calon TKI itu. Tujuan penampungan itu adalah selain untuk mencari peluang bekerja yang tepat bagi para calon TKI, juga sebagai salah satu sarana untuk memberi pelatihan singkat untuk mereka. Bentuk pelatihan itu bermacam-macam, bisa berupa kursus bahasa asing atau latihan keterampilan yang dibutuhkan sebagai bekal bekerja di luar negeri.

Sebanyak 149 responden (64,3 persen) dari 256 responden yang berangkat kel luar negeri, baik melalui jalur resmi atau tak resmi, sebelum sampai di negara tujuan, mereka memang diasramakan lebih dulu. Sedangkan yang langsung berangkat, jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar 35,7 persen.

**Tabel 4.21.**  
**Diasramakan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri**  
**(N=256)**

<b>Pernah Tidaknya Diasramakan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, diasramakan	149	64,3
Sehari Langsung berangkat	107	35,7
<b>Total</b>	<b>256</b>	<b>100,0</b>

Jangka waktu bagi para responden yang pernah tinggal lebih dulu di penampungan cukup bervariasi, yakni mulai dari hitungan hari (minimal 15 hari) hingga lebih dari 4 bulan. Namun, hampir separoh responden tinggal di penampungan antara satu hingga dua bulan (53 persen). Sedangkan responden yang tinggal di asrama cukup lama, yaitu antara 3 bulan hingga lebih dari 4 bulan jumlahnya relatif sedikit, yaitu 8,1 persen. Data dalam tabel berikut di halaman 91 ini menunjukkan keadaan tersebut.

**Tabel 4.22.**  
**Lama di Penampungan (N=149)**

<b>Lama di Penampungan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Antara (15 - 20 hari)	20	13,4
1 - 2 bulan	79	53
2,1 - 3 bulan	38	25,5
3,1 - 4 bulan	5	3,4
Lebih dari 4 bulan	7	4,7
<b>Total</b>	<b>149</b>	<b>100,0</b>

**p. Total Biaya yang Dikeluarkan.**

Pada sub-bab terdahulu, memang telah disebutkan bahwa, biaya yang telah dikeluarkan oleh para TKI dalam mengurus kelengkapan administratif kebanyakan berkisar antara kurang dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Tabel berikut ini menggambarkan total biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh para TKI hingga mereka mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

**Tabel 4.23.**  
**Biaya yang Dikeluarkan TKI Sampai Memperoleh Pekerjaan**  
**(N=300)**

<b>Biaya yang Telah Dikeluarkan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak tahu (karena dipotong gaji)	21	6,9
Ditanggung migrant lama	4	1,3
Kurang dari Rp. 100.000,-	11	3,6
Rp.100.000 – Rp. 500.000,-	93	31
Rp. 501.000 – Rp. 1.000.000,-	68	22,6
Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000,-	29	9,6
Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000,-	21	7
Rp. 2.000.001 – Rp. 2.500.000,-	2	0,6
Rp. 2.500.001 – Rp. 3.000.000,-	11	3,6
Rp. 3,5 juta - 4 juta rupiah	21	7
> 4 juta rupiah	9	3
Tidak menjawab (lupa)	10	3,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan data dalam tabel 4.23 di atas, nampak bahwa biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh para TKI sebelum mereka sampai di negara tujuan, paling tinggi di atas 4 juta rupiah, tetapi itu hanya dialami oleh 9 responden (3 persen). Pengeluaran yang cukup banyak dialami oleh responden (53,6 persen) adalah berkisar antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun yang cukup menarik adalah bahwa, ada 11 orang (3,6 persen) yang mengeluarkan biaya keseluruhan untuk berangkat ke luar negeri tidak lebih dari 100 ribu rupiah dan sebanyak 8,2 persen tidak mengeluarkan biaya lebih dulu, karena selain telah ada teman atau saudara yang menanggung karena

Dengan memperhatikan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 62,3 persen responden pergi ke luar negeri menjadi TKI disebabkan oleh keinginannya untuk meningkatkan kondisi ekonomi untuk keluarga mereka,

Tujuan Utama Bekerja di Luar Negeri	Frekuensi	Persentase
Meningkatkan ekonomi keluarga (penhasilan)	187	62,3
Ingin menui TKI yang sudah sukses (lebih baik taraf hidupnya setelah jadi TKI)	88	29,3
Kesulitan mencari/mendapatkan pekerjaan di Indonesia	23	7,6
Ikut suami	2	0,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Tujuan Utama Bekerja Sebagai TKI di Luar Negeri (N=300)

Tabel 4.24.

Kapupaten bekerja sebagai TKI, dapat diamati pada tabel berikut ini. mengetahui lebih jelas alasan atau tujuan utama para responden di tiga pekerjaan yang sama relatif tinggi antara di luar negeri dan di tanah air. Untuk yang layak di Indonesia, dan *ketiga*, disparitas pendapatan untuk jenis kerja ke luar negeri juga disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan yang telah lebih dulu menjadi TKI. *Kedua*, keinginan untuk bermigrasi mencari migran lama (contoh keberhasilan sebagian migran) asal Indonesia lainnya TKI tentu sedikit-banyak dipengaruhi oleh tiga faktor; yakni *pertama*, sukses Keinginan yang kuat dari sebagian penduduk Indonesia untuk menjadi

a. Tujuan Utama Bekerja di Luar Negeri

4.2. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN TKI

yang akan dipotong gaji setelah mendapat pekerjaan. cerabahnya itu sudah ada di sana lebih dulu, juga ada sebagian responden

Jampaknya para responden enggan mencari kerja di dalam negeri karena standar gajinya untuk jenis pekerjaan yang sama; relatif lebih rendah dibandingkan di luar negeri. Alasan lain yang juga cukup banyak disebut responden adalah, keinginan untuk mencoba pengalaman sukses TKI yang sudah lebih dahulu bekerja di luar negeri (29,3 persen).

#### **b. Faktor Penarik TKI Bekerja di Luar Negeri**

Apabila dikaitkan dengan tujuan utama dari kebanyakan responden menjadi TKI adalah karena ingin meningkatkan kondisi perekonomian keluarga, maka bisa dipastikan juga faktor yang menarik mereka untuk bekerja di luar negeri adalah gaji yang relatif lebih tinggi. Hal itu sesuai dengan jawaban dari 199 responden (66,3 persen) yang mengatakan demikian. Selain gaji yang tinggi, hal lain yang juga cukup banyak dikemukakan oleh responden adalah karena lapangan pekerjaan di luar negeri cukup banyak (14,6 persen) serta tidak dibutuhkannya keahlian, keterampilan atau pendidikan tertentu untuk dapat bekerja di luar negeri (11 persen). Khusus bagi beberapa responden yang bekerja di Arab Saudi (5 persen), salah satu faktor penarik mereka bekerja di sana, adalah adanya keinginan untuk dapat menjalankan ibadah haji dengan baik.

**Tabel 4.25.**  
**Faktor Penarik Bekerja di Luar Negeri (N=300)**

<b>Faktor Penarik dari Pekerjaan yang Ditekuni di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Gaji yang ditawarkan cukup besar	153	51
Lapangan pekerjaan cocok dengan keterampilan yg dimiliki	52	17
Pembayaran gaji tepat waktu	47	16
Pekerjaan tersebut tidak menuntut keahlian tinggi	15	5

<i>Lanjutan 4.25</i>		
Mendapat pekerjaan yang dijanjikan oleh teman	18	6
Dapat menjalankan ibadah agama/berhaji dengan baik	15	5
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

### c. Perlakuan Buruk Majikan Terhadap TKI

Keengganan para TKI untuk kembali bekerja di luar negeri menurut berita di banyak media massa pada umumnya karena; mereka pernah mendapat perlakuan buruk, terutama dari majikan mereka. Namun, berdasarkan pengakuan sebagian besar responden (95 persen), mereka tidak pernah mendapat perlakuan buruk dari majikannya. Hanya 15 responden (5 persen) yang pernah disiksa atau dimarahi oleh majikan mereka, akibat salah dalam pekerjaan (barang majikan rusak karena tidak terampil ) atau kurang mengerti bahkan tidak memahami perintah (bahasa) majikannya.

**Tabel 4.26.**  
**Perlakuan Majikan Pada Responden Saat Bekerja**  
**(N=300)**

Perlakuan Majikan thd TKI	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah dimarahi	285	95
Pernah dimarahi berkali-kali	15	5
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan pengalaman dari sebagian kecil responden yang pernah mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya, maka mereka itu memang pada akhirnya merasa trauma dan tidak betah bekerja di luar negeri dan ingin segera kembali ke Indonesia. Tetapi oleh media massa kasus yang kecil ini justru menjadi besar dan luas gaungnya, karena adanya berbagai kepentingan, terutama kepentingan bisnis dari sebagian media tersebut.

#### d. Alasan Utama TKI Bertahan Kerja di Luar Negeri

Banyak faktor yang dapat menyebabkan TKI bertahan lama bekerja di luar negeri. Alasan yang cukup banyak dilontarkan responden tentang hal-hal yang membuat mereka betah antara lain: (1) pekerjaan yang mereka dapatkan telah sesuai dengan keterampilan dan kontrak kerja (33 persen); (2) gaji yang diterima dianggap cukup besar (30 persen); dan (3) ada kerabat atau teman yang telah lebih dulu jadi TKI sehingga dapat menolong responden jika mereka menemui kesulitan (19) persen.

**Tabel 4.27.**  
**Faktor Utama yang Membuat Responden Bisa Bertahan di Luar Negeri (N=300)**

<b>Faktor Utama yang Membuat Responden Bisa Bertahan di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak betah	15	5
Ada kerabat/teman yang lebih dulu jadi TKI dan menolong responden	57	19
Pekerjaan yang didapat sesuai dengan kontrak kerja	98	33
Gaji besar	90	30
Majikan baik	35	12
Pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan ketrampilan selama magang	5	2
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### e. Keinginan Kembali ke Luar Negeri Setelah Mudik.

Meskipun cukup banyak responden (95 persen) yang mengatakan betah atau bertahan lama tinggal di luar negeri, namun ketika mereka ditanya apakah ada rencana kembali bekerja di luar negeri setelah mereka tiba di Indonesia, maka cukup banyak responden (62,9 persen) yang memiliki rencana untuk menetap saja di Indonesia atau tidak berkeinginan untuk bekerja

Apabila dibandingkan dengan gaji ketika pertama kali mereka bekerja sebagai TKI (lihat kembali sub-bab 4.1.) nampak bahwa tidak ada peningkatan jumlah yang berarti bila dibandingkan dengan gaji yang diterima setelah sekian lama mereka bekerja. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya responden yang mendapat gaji antara 1 juta hingga 2 juta rupiah

**f. Besar Gaji Terakhir Menjadi TKI**

Rencana Bekerja Kembali ke Luar Negeri	Frekuensi	Persentase
Masih terdaftar dan akan berangkat lagi ke LN	22	7,3
Tidak terdaftar lagi dan akan mendaftar lagi melalui jalur resmi	82	27,3
Tidak terdaftar lagi dan tidak akan kembali ke LN	184	61,3
Tidak terdaftar lagi dan akan berangkat melalui jalur tidak resmi	2	0,6
Masih terdaftar tapi tidak akan kembali ke luar negeri	5	1,6
Ingin berangkat lewat <i>calling visa</i>	5	1,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**Tabel 4.28.**  
**Rencana Bekerja Kembali ke Luar Negeri (N=300)**

menjadi TKI, meskipun ada di antaranya yang masih terdaftar menjadi TKI. Sedangkan yang ingin kembali bekerja ada sekitar 37 persen. Mereka itu ada yang masih terdaftar sebagai TKI di negara tempat mereka bekerja dan setelah masa liburnya di Indonesia mereka akan berangkat lagi ke luar negeri (7,3 persen); ada pula yang sudah tidak terdaftar tetapi mereka akan mendaftar lagi melalui jalur resmi (27,3 persen); dan ada yang tidak terdaftar lagi namun akan berangkat melalui jalur tidak resmi (0,6 persen) serta ingin berangkat lagi melalui *calling visa* (1,6 persen).

erbulannya (46 persen), dan yang mendapat gaji antara 2,1 juta hingga 3 juta rupiah per bulan sebanyak 34,3 persen.

**Tabel 4.29.**  
**Besar Gaji Terakhir Menjadi TKI**  
**(N=300)**

<b>Gaji Pekerjaan Terakhir di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
< 1 juta rupiah	19	6,3
1 - 2 juta rupiah	138	46
2,1 - 3 juta rupiah	103	34,3
3,1 - 4 juta rupiah	14	4,6
4,1 - 5 juta rupiah	12	4
> 5 juta rupiah	14	4,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **g.Kontinuitas Pembayaran Gaji oleh Majikan**

Hal yang cukup rawan bagi para buruh atau tenaga kerja yang tidak mempunyai posisi tawar kuat terhadap para majikan adalah, pada soal pembayaran upah atau gaji. Mungkin saja dalam kontrak kerja tertulis bahwa mereka akan mendapat gaji bulanan secara teratur, namun karena posisi tawar majikan lebih kuat, artinya ia yang mengeluarkan upah untuk para buruhnya, maka jika majikan itu bertindak sewenang-wenang, gaji untuk buruhnya pun dapat pula diberikan sesuka majikan. Dari 300 responden, ternyata masih ada sebagian kecil responden yang mengalami hal seperti itu (16 persen), sementara ada sebagian besar responden (84 persen) menerima gaji secara teratur setiap bulannya.

**Tabel 4.30.**  
**Kontinuitas Pembayaran Gaji Per Bulan**  
**(N=300)**

<b>Gaji Dibayarkan Per Bulan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Dibayar setiap bulan	252	84
Pembayaran tidak pasti	48	16
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

#### **h. Alasan Memilih Jalur Tak Resmi Ke Luar Negeri.**

Seperti telah diungkapkan pada sub- bab sebelumnya, tentang jalur mana yang ditempuh untuk dapat menjadi TKI dan bekerja di luar negeri, dari studi ini, hanya ada 48 orang yang tidak melalui jalur resmi. Para responden tersebut memilih jalur tak resmi karena merasa bahwa melalui cara itu mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak berbelit-belit untuk cepat sampai di luar negeri (63 persen). Ada pula responden yang sudah cukup lama bekerja di luar negeri dan pada saat keberangkatan yang pertama kali, mereka belum melalui jalur resmi atau PJTKI (33 persen).

**Tabel 4.31.**  
**Alasan Memilih Jalur Tidak Resmi**  
**(N=48)**

<b>Alasan Memilih Jalur Tidak Resmi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Lebih cepat dan mudah dan tidak berbelit-belit	30	63
Kalau resmi menunggu lama	2	4
Dulu belum ada PJTKI	16	33
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>

#### **i. Tujuan Mudik dan Keinginan Kembali ke Luar Negeri**

Keseluruhan responden yang ditemui pada saat penelitian ini berlangsung, memang sedang berada di kampung asal mereka. Ketika mereka ditanya tentang maksud kepulangan mereka, sebagian besar responden (89,3 persen) menjawab bahwa kontrak mereka memang telah habis. Namun, ketika

itanya lebih lanjut tentang ada-tidaknya keinginan untuk kembali bekerja di luar negeri seperti yang telah dijelaskan pada subbab 4.2.e, sebanyak 111 responden (37 persen) mengatakan ingin kembali lagi bekerja di luar negeri. Selain karena kontraknya sudah habis, kepulangan para responden ke kampung halamannya juga disebabkan oleh: (a) gaji yang diterimanya tidak tetap dan bahkan ada yang selama 4 bulan tidak di bayar; (b) tidak betah karena terlalu lama meninggalkan keluarga dan ingin berkumpul dengan keluarga lagi; (c) mengambil jatah libur; (d) dideportasi; (e) negara tempatnya bekerja mengalami peperangan dan (f) ada anggota keluarga yang sakit dan bahkan ada salah seorang responden yang suaminya meninggal.

**Tabel 4.32.**  
**Maksud Kepulangan ke Tanah Air (N=300)**

<b>Maksud Kepulangan ke Tanah Air</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Mengambil jatah libur	4	1,3
Ada anggota keluarga yang sakit (istri)	4	1,3
Kontrak habis	268	89,3
Ingin pulang meskipun kontrak belum habis (gaji tidak tetap)	3	1
Ingin kumpul dengan keluarga	13	4,3
Dideportasi	2	0,6
Karena perang	3	1
Suami meninggal	1	0,3
Tidak kerasan lagi	1	0,3
Gaji 4 bulan tidak dibayar	1	0,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

Adapun alasan dari para responden yang ingin kembali menjadi TKI, sebagian besar (27 persen) mengatakan bahwa penghasilan yang mereka terima lebih besar dari pada jika mereka bekerja di Indonesia. Sedangkan sisanya menjawab: bahwa pekerjaan yang ada di luar negeri jauh lebih banyak

ari pada di Indonesia (8 persen); pekerjaan yang tersedia bagi mereka di sana tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan yang tinggi (2,3 persen) dan adapula yang beralasan ingin menjalankan ibadah haji (1,6 persen).

**Tabel 4.33.**  
**Faktor Penarik Kembali ke Luar Negeri (N=111)**

<b>Faktor Ingin Kembali ke Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Penghasilan/gaji yang diterima tetap lebih besar dari Indonesia	81	27
Pekerjaan yang tersedia di LN tetap lebih banyak dari di Indonesia	24	8
Pekerjaan yang ada tidak perlu pendidikan/ketrampilan tinggi	7	2,3
Dapat menjalankan ibadah agama/berhaji dengan lebih baik	5	1,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Sedangkan bagi 189 responden yang tidak ingin kembali lagi bekerja di luar negeri sebagian besar di antara mereka (65,6 persen) merasa bahwa dirinya tidak dapat berpisah lagi dengan keluarganya di Indonesia. Namun ada pula yang mengatakan (15,3 persen) bahwa uang yang telah mereka kumpulkan dari hasil kerjanya selama menjadi TKI sudah cukup terkumpul sehingga dapat digunakan sebagai modal bekerja di kampung halaman; 7,4 persen mengatakan bahwa dirinya sudah cukup tua dan enggan untuk pergi jauh dari keluarga; 4,3 persen mengakui bahwa mereka telah mendapatkan pekerjaan di Indonesia, 2 orang mengatakan bahwa mereka mempunyai penyakit tertentu; ada 2 orang mengaku kepulangannya ke Indonesia karena ada rencana untuk menikah; dan 4 orang adalah para TKW yang sedang hamil dan berkeinginan untuk melahirkan serta membesarkan anaknya di kampung halaman saja. Bagi 6 responden yang tidak ingin kembali karena hal-hal yang

dianggap tidak menyenangkan antara lain adalah karena: pernah mengalami penganiayaan di tempat kerja, gaji yang diterima tidak tetap serta ada yang merasa bahwa kepergiannya ke luar negeri menyebabkan keretakan rumah tangganya.

**Tabel 4.34.**  
**Alasan Tidak Kembali ke Luar Negeri (N=189)**

<b>Alasan Tak Ingin Kembali Bekerja ke Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Uang yang terkumpul sudah cukup	29	15
Merasa tidak dapat berpisah lagi dengan keluarga di Indonesia	115	61
Trauma karena Dideportasi	7	4
Mempunyai penyakit tertentu	3	2
Mengalami penganiayaan di tempat kerja	17	8
Lebih mulya pekerjaan di Indonesia	8	4
Tidak mau lagi mengalami keretakan rumah tangga	1	1
Gaji tidak tetap	3	2
Mau menikah	2	1
Sedang hamil	4	2
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>100,0</b>

#### **j. Hasil yang Diperoleh dari Bekerja sebagai TKI**

Para TKI yang menganggap bahwa dirinya telah dapat meningkatkan perekonomian keluarga dari upah atau hasil kerjanya selama di luar negeri, maka hal itu mereka anggap juga sebagai suatu keberhasilan dari upayanya menjadi TKI. Sebagian besar responden dalam penelitian ini (84 persen) memberi argumentasi yang sama, bahwa dirinya berhasil bekerja dengan baik di luar negeri. Bukti yang mereka tunjukkan antara lain adalah: dapat membangun rumah, mampu membeli sawah, sepeda motor atau bahkan mobil dan memiliki tabungan dalam bentuk deposito di Bank.

**Tabel 4.35.**  
**Penilaian Responden Tentang Keberhasilan(N=300)**

<b>Berhasil Tidaknya Bekerja di Luar Negeri Menurut Penilaian Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, berhasil	252	84
Tidak berhasil	48	16
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Sebaliknya bagi 48 responden (16 persen) yang menganggap kepergian mereka menjadi TKI menemui kegagalan, berdasarkan persentase tertinggi urutannya adalah sebagai berikut: (1) karena majikan kasar atau galak (26,9 persen); (2) majikan stress dan marah-marah terus kepada mereka (23 persen); (3) gaji atau upah tidak pernah dibayar (19,2 persen); (4) gaji mereka sudah habis dan belum mendapatkan keuntungan yang dapat dibawa pulang ke tanah air (15,3 persen); (5) dipermainkan oleh Teikong atau majikan serta dideportasi dan pernah dipenjara karena melanggar persyaratan administratif yang seharusnya dipenuhi sebelum mereka mendapat gaji. Jumlah TKI yang bernasib seperti ini masing-masing sebesar 7,6 persen.

**Tabel 4.36.**  
**Faktor yang Menyebabkan Kurang/Tidak Berhasil (N=48)**

<b>Faktor yang Menyebabkan Tidak Berhasil</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Dipermainkan majikan/tekong	17	35
Gaji tidak pernah dibayarkan	10	21
Dideportasi, sebelum gajian	7	15
Majikan stress, kasar, kejam	3	6
Gaji/upah sudah habis	6	13
Ganti rugi barang majikan	5	10
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>

Bagi responden yang merasa bahwa dirinya berhasil menjadi TKI di luar negeri itu memberikan alasan yang bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa keberhasilan mereka itu juga dipengaruhi oleh faktor: (1) gaji yang mereka anggap cukup besar (62,4persen); (2) kecocokan pekerjaan yang dilakukannya (20,4 persen). upah yang dibayarkan tepat waktu (17,2 persen).

**Tabel 4.37.**  
**Faktor Keberhasilan Bekerja di Luar Negeri**  
**(N=252)**

<b>Faktor Keberhasilan Bekerja di Luar Negeri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Kecocokan pekerjaan	52	21
Gaji/upah yang besar	153	61
Pembayaran upah tepat waktu	47	18
<b>Total</b>	<b>252</b>	<b>100,0</b>

#### **k. Perhatian Pemerintah, KBRI, PJTKI dan APJATI Pasca Migrasi**

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap nasib TKI yang bekerja di luar negeri disinyalir oleh berbagai kalangan masih sangat minim. Minimnya perhatian itu sedikit-banyak juga dapat mempengaruhi kinerja para TKI. Artinya, dengan adanya perhatian, evaluasi, pemeriksaan administratif maupun kesehatan secara berkala di KBRI atau pantauan PJTKI dan APJATI terhadap majikan dari para TKI serta mengevaluasi kualitas kerja mereka, maka hal itu dapat mengurangi berbagai permasalahan, baik yang ditimbulkan oleh para TKI maupun majikan atau aparat yang berwenang di negara tempat TKI itu bekerja.

**Tabel 4.38.**  
**Perhatian KBRI, PJTKI, Depnaker atau APJATI (N=300)**

<b>Pernah Dikunjungi KBRI, PJTKI, Depnaker atau APJATI di LN</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya, pernah	5	1,7
Tidak pernah	295	98,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Berdasarkan pengakuan para responden diketahui bahwa sebagian besar (98,3 persen) selama bekerja di luar negeri tidak pernah dikunjungi oleh pihak KBRI, PJTKI, Depnaker atau APJATI. Namun, meskipun sebagian besar mengakui bahwa perhatian Pemerintah Indonesia masih sangat sedikit terhadap mereka terutama ketika mereka ada di luar negeri, tetapi kehidupan mereka selama di sana cukup tenang. Artinya, selama mereka bekerja tidak pernah ada kejadian perselisihan dengan pihak-pihak lain di negara tempat mereka bekerja (94,6 persen). Sebanyak 5 persen yang pernah mengalami perselisihan, entah itu dengan majikan, antar teman, atau pihak-pihak lain, tetapi mereka tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Hanya satu orang yang pernah melaporkan perselisihan yang mereka alami kepada agen pengirimnya.

**Tabel 4.39.**  
**Cara TKI Mengatasi Perselisihan Kerja (N=300)**

<b>Melaporkan Jika Terjadi Perselisihan Kerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Pernah mengalami tetapi tidak melapor	15	5
Tidak pernah mengalami perselisihan kerja	284	94,6
Melapor ke agen, tapi tidak diselesaikan	1	0,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Dari lima belas orang yang pernah mengalami perselisihan kerja itu, alasan mereka tidak melapor antara lain adalah karena mereka dianggap sebagai TKI ilegal dan jika mereka melapor maka urusannya akan rumit dan

panjang sehingga mereka enggan memperkarakan perselisihannya ke pihak-pihak yang berwenang.

### **I. Inisiatif Meminta Surat Perjanjian Kerja Tertulis**

Mengenai ada-tidaknya surat kontrak kerja sudah dijelaskan dalam uraian pada subbab IV.1..i, di mana berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 77,3 persen responden telah menandatangani surat kontrak kerja. Sedangkan surat perjanjian kerja tertulis diperlukan juga untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja, termasuk juga berapa jumlah gaji yang diterimanya.

Sebanyak 67 persen mengatakan bahwa mereka secara langsung mengantongi surat perjanjian kerja tertulis semenjak mereka diterima bekerja di tempat majikannya. Namun yang cukup memprihatinkan, masih ada saja responden yang tidak pernah meminta surat perjanjian kerja itu walaupun dirinya tahu ada surat seperti itu (17,3 persen), dan bahkan sebanyak 45 responden (15 persen) yang tidak tahu atau tidak mengerti bahwa dirinya harus dilindungi pula oleh surat perjanjian kerja tertulis, selain surat kontrak kerja.

**Tabel 4.40.**

**Meminta Surat Perjanjian Kerja Tertulis (N=300)**

<b>Pernah Tidaknya Meminta Surat Perjanjian Kerja Tertulis</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Sudah memiliki surat perjanjian kerja	201	67
Tidak pernah meminta SPK	52	17,3
Tidak tahu/tidak mengerti	45	15
Ya, pernah tapi tidak diperhatikan	2	0,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

**1.3.DAMPAK MIGRASI BAGI KELUARGA DI DAERAH ASAL****a.Remittances: Jumlah dan Cara Pengirimannya.**

Gaji yang diterima para TKI pada umumnya tidak disimpan semua oleh mereka. Kebanyakan di antara mereka mengirimkan sebagian gajinya kepada sanak saudara di kampung halaman, karena memang tujuan utama mereka bekerja hingga ke luar negeri adalah untuk membantu meringankan beban keluarga. Dari 300 responden yang diwawancarai, hanya ada 12 orang (4 persen) yang mengatakan bahwa gaji mereka tidak pernah dikirim ke sanak saudaranya di Indonesia. Sedangkan 288 responden (96 persen) mengirimkannya kepada bank- bank yang ada di Indonesia, misalnya BNI, BRI atau Bank Bumi Putera dan Bank Bumi Daya (sekarang berganti nama menjadi Bank Mandiri).

**Tabel 4.41.**  
**Cara Pengiriman Uang ke Tanah Air (N=300)**

<b>Cara Pengiriman Uang ke Tanah Air</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak pernah dikirim ke tanah air	12	4
Melalui BNI	205	68,3
Melalui BCA	13	4,3
Melalui Hongkong Bank	5	1,6
Melalui BRI	17	5,6
Melalui Bank Bumi Daya*	47	15,6
Melalui Bank Bumi Putera Surabaya	1	0,3
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

\*) Keterangan: *Bank Bumi Daya, sekarang dikenal dengan nama Bank Mandiri*

Mengenai jumlah penghasilan yang dikirim rata-rata per bulannya bervariasi, tergantung kebutuhan dari keluarga masing-masing responden juga kebutuhan para TKI selama mereka bekerja.

**Tabel 4.42.**  
**Rata-rata Penghasilan yang Dikirim ke Tanah Air (N=300)**

<b>Rata-rata Penghasilan yang Dikirim Ke Tanah Air</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
kurang dari 500 ribu rupiah	48	16
Rp. 500.001 – Rp.1.000.000,-	53	17,6
Rp. 1.000.001 – Rp.1.500.000,-	94	31,3
Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000,-	53	17,6
Rp. 2.000.001 – Rp. 2.500.000,-	20	6,6
Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000,-	8	2,6
Rp. 4.000.001 – Rp. 5.000.000,-	7	2,3
Di atas 5 juta rupiah	3	1
Tidak pasti	2	0,6
Tidak pernah kirim	12	4
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Dengan memperhatikan tabel di atas nampak bahwa, cukup banyak responden yang mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga di tanah air ; antara 500 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah (dilakukan oleh 200 responden atau 66,7 persen). Namun, tidak sedikit pula yang mengirimkan sebagian penghasilannya sebesar 2 juta rupiah ke atas (52 responden atau sekitar 17 persen).

#### **b.Pemanfaatan Uang Kiriman Oleh Keluarga di Tanah Air**

Pemanfaatan uang yang dikirim oleh para responden kepada keluarga mereka di kampung halaman ternyata juga cukup bervariasi. Dari berbagai jawaban yang muncul, cukup banyak responden (43,7 persen) yang mengatakan bahwa uangnya digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah mereka. Jawaban terbanyak setelah itu adalah digunakan untuk membantu menutupi kebutuhan keluarga (32,6 persen). Ada 25 responden (8,6 persen) yang mengalokasikan kiriman uangnya untuk membeli sebidang tanah,

namun ada pula yang digunakan untuk membeli kendaraan pribadi (2,7 persen). Responden yang lebih memilih uangnya ditabung dulu di bank jumlahnya sebanding dengan responden yang mengalokasikan uangnya untuk membeli tanah (8,6 persen). Hanya sedikit responden yang menggunakan uangnya itu untuk membiayai pendidikan untuk anaknya (2 persen).

**Tabel 4.43.**  
**Penggunaan Uang yang Dikirimkan ke Tanah Air (N=288)**

<b>Penggunaan Uang yang Dikirimkan ke Tanah Air</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Membangun/merenovasi rumah	126	43,7
Membantu menutupi kebutuhan keluarga	94	32,6
Membeli sebidang tanah	25	8,6
<i>Danjutan Tabel 4.54</i>		
Membeli kendaraan (mobil/motor)	8	2,7
Dikumpulkan/disimpan dulu di Bank, dan akan dijadikan modal	25	8,6
Membiayai pendidikan anak-anak	6	2,0
Membayar hutang	4	1,3
<b>Total</b>	<b>288</b>	<b>100,0</b>

### **c. Bentuk Hasil Jerih Payah Selama di Luar Negeri**

Sesuai dengan pemanfaatan uang yang dikirim para TKI untuk sanak keluarganya atau uang yang terkumpul selama ia bekerja, maka bentuk atau wujud hasil jerih panyah yang dapat dinikmati sebagian besar responden sekembalinya ke Indonesia antara lain adalah dengan menjadikan uang tersebut dalam bentuk: bangunan rumah, sawah, sepeda motor atau mobil (74,6 persen). Urutan kedua setelah itu adalah untuk menutupi kebutuhan keluarga (16,6 persen). Namun sedikit responden berpikiran ke depan, yaitu membiarkannya mengendap dulu dalam tabungan, baru setelah itu mereka

mengambilnya untuk modal usaha sekembalinya mereka ke Indonesia (0,6 persen).

**Tabel 4.44.**  
**Bentuk Hasil Jerih Payah Selama di Luar Negeri**  
**(N=300)**

Bentuk Hasil Jerih Payah Selama di Luar Negeri	Frekuensi	Persentase
Rumah, sawah, mobil/motor	224	74,6
Menutupi kebutuhan keluarga	50	16,6
Tabungan	19	6,3
Modal dagang	2	0,6
Tidak menjawab*	5	1,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

- Hasil jerih payahnya untuk membayar hutang

#### **d.Keuntungan Menjadi TKI**

Ketika para responden ditanya mengenai keuntungan atau kerugiannya menjadi TKI, sebagian besar di antara mereka (89,3 persen) mengatakan bahwa lebih banyak keuntungan yang mereka dapatkan dibandingkan kerugiannya. Hanya 15 orang (5 persen) yang merasa lebih banyak kerugian daripada keuntungannya menjadi TKI. Kelima belas orang tersebut nampaknya memang mengalami trauma karena pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan selama di negara tempat ia bekerja.

**Tabel 4.45.**  
**Keuntungan atau Kerugian TKI**  
**(N=300)**

Keuntungan atau Kerugian TKI	Frekuensi	Persentase
Merasa lebih banyak mendapat keuntungan	268	89,3
Merasa lebih banyak mendapat kerugian	15	5
Biasa-biasa saja	17	5,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Bagi responden yang merasa bahwa dirinya lebih banyak mendapat keuntungan dari pekerjaannya sebagai TKI, keuntungan secara ekonomi yang ia dapatkan antara lain berupa rumah, mobil atau motor dan sawah (72 persen), serta uang hasil jerih payahnya itu digunakan untuk memperbaiki perekonomian keluarga (16 persen), selain juga ditabung untuk menambah modal jika kelak mereka kembali lagi ke Indonesia (6,3 persen).

**Tabel 4.46.**

**Keuntungan Secara Ekonomi (N=300)**

<b>Keuntungan Secara Ekonomi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Rumah, mobil/motor, sawah	216	72
Bisa memperbaiki perekonomian keluarga	48	16
Menambah modal	19	6,3
Tidak menjawab/merasa rugi atau biasa-biasa saja	17	5,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Namun ketika mereka ditanya tentang ada-tidaknya keuntungan secara sosial yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri, hanya 146 responden yang menjawab "ada". Adapun keuntungan secara sosial menurut mereka antara lain adalah: (1) dapat menambah pengalaman (37,3 responden); (2) meningkatkan status ekonomi (6,6 persen); dan (3) karena suami sudah lebih dulu menjadi TKI sehingga dengan keberangkatannya menjadi TKW akan mempertemukan mereka dengan suaminya (3,6 persen); dan ada pula yang merasakan bahwa kepergiannya itu dapat membantu meringankan beban keluarga (1 persen).

**Tabel 4.47.**  
**Keuntungan Secara Sosial (N=300)**

<b>Keuntungan Secara Sosial</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Hanya keuntungan ekonomi yang didapatkan	154	51,3
Ya, ada: Menambah pengalaman	112	37,3
Ya, ada: Meningkatkan status ekonomi	20	6,6
Ya, ada: meringankan beban keluarga	3	1
Ya, Bisa kumpul dengan suami di LN	11	3,6
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>

Sedangkan kerugian secara ekonomi dan sosial menurut sebagian besar responden (93 persen) hampir tidak ada. Bagi responden yang mengaku bahwa ada kerugian secara ekonomi dan sosial (21 responden atau 7 persen), alasan yang mereka kemukakan antara lain karena: (1) gaji yang diterima tidak tetap dan bahkan ada yang tidak dibayarkan, (2) uang dipinjam orang dan tidak kembali; (3) uang habis untuk berobat selama di luar negeri. Sedangkan kerugian secara sosial yaitu berpisah dengan keluarga.

#### **e. Rintangan Migrasi .**

Seringkali media massa memberitakan nasib buruk satu atau beberapa gelintir TKI, mulai dari perlakuan yang tidak sewajarnya dari para calo tenaga kerja dan majikannya, maupun aparat keimigrasian dan bandara yang 'memeras' mereka saat mereka akan berangkat ke luar negeri maupun kembali ke Indonesia. Ketika hal itu ditanyakan kepada para responden, ternyata semua responden mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengalami gangguan atau masalah, misalnya diperlakukan buruk oleh calo, pihak PJTKI, atau 'diperas' oleh pihak bandara selama proses keberangkatannya hingga ketika mereka pulang ke tanah air untuk berlibur atau habis masa kontraknya.

Begitu pula mengenai masalah ketenangan bekerja selama di luar negeri, hampir seluruh responden mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak merasakan ada masalah yang mengganggu selama bekerja. Hanya ada 15 responden yang memang pernah mengatakan bahwa dirinya mengalami nasib yang tidak baik. Hal-hal yang dianggap mengganggunya selama mereka menjadi TKI antara lain karena: pernah dipermainkan teikong atau calo, pernah dipenjara, dan dideportasi, upah yang dibayarkan tidak tepat waktu dan pernah mendapat perlakuan kasar dari majikan.

#### **f. Efek Berganda Dari Keberadaan TKI di Luar Negeri.**

Kepergian para TKI ke luar negeri, selain secara internal dapat meningkatkan pendapatan mereka dan keluarganya, tetapi secara eksternal ada dampak yang lebih makro yang ditimbulkan dari "bisnis" pengerahan TKI ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh rekaman photo di bagian Lampiran Laporan ini, dampak "*multiplier*" dari pengiriman TKI ke Luar Negeri terutama bagi daerah asal adalah; terbukanya peluang kerja baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Sebagai contoh dapatlah disebutkan disini yakni; pertama, munculnya perusahaan jasa pengiriman TKI yang telah membuka lapangan kerja lokal yang tidak kecil dari keberadaan PJTKI di tiap Kabupaten penelitian. (lihat photo) Kedua, munculnya jasa penukaran uang asing (*Money Changer*) di desa-desa asal TKI ini, yang dulu tidak pernah ada, juga menyerap tenaga kerja secara lokal. Ketiga, meningkatnya pendapatan keluarga TKI, telah meningkatkan pula daya beli keluarga-keluarga ini secara umum, sehingga memberi dampak pada penyerapan tenaga kerja lokal di sektor konstruksi (bangunan); karena hampir semua TKI yang sukses membangun rumahnya

lalam ukuran besar dan mewah lengkap dengan garasi mobilnya. Keempat, umbuhnya usaha jasa “bengkel sepeda motor dan ganti olie” di pedesaan, karena hampir setiap rumah TKI ini memiliki sepeda motor lebih dari satu dari produksi tahun terbaru. Kelima, para TKI yang sukses, disadari atau tidak; telah membawa serta gaya hidup kosmopolitan (perkotaan) ke dalam struktur kehidupan pedesaan, yang dapat dilihat dari berdirinya usaha jasa “*money changer*”, gerai “*Handphone*”, rumah bertingkat berpagar besi *stainlesssteel* dan garasi mobil dengan “*remote control*” dan sebagainya.

Meskipun demikian, dampak negatif dari peningkatan pendapatan TKI di luar negeri bagi keluarga di daerah asal, adalah perubahan pola konsumsi anggota keluarga TKI (yang sukses) Menurut penuturan Kepala Desa Tanggul Turus, dan Tanggul Welahan, perubahan pola konsumsi anggota keluarga TKI yang sukses di luar negeri, dapat dilihat dari pembelian sepeda motor, dan barang elektronik lainnya. (TV, VCD Player, dan Hand Phone). Setiap tahun ada pergantian model (tipe) yang baru keluar dari perakitan, kaum muda di daerah ini, seolah berlomba-lomba mengganti dengan sepeda motor terbaru, meskipun sepeda motor yang lama baru berumur satu tahun.

Namun secara makro, dapat pula membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengiriman para TKI itu. Beberapa pihak yang dapat disebutkan di sini antara lain adalah: PJTKI, calo atau perantara (Teikong), lembaga kursus, bank, biro perjalanan, angkutan umum dan bandara, jasa pertukaran uang maupun jasa pengurusan persyaratan administratif. Untuk mengetahui ada-tidaknya uang dari para TKI itu yang terserap oleh pihak-pihak tersebut, dapat diamati pada tabel berikut ini.

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa uang TKI lebih banyak terserap pada: (1) jasa angkutan umum (54,6 persen); (2) P/TKI (52,3 persen); (3) bank (52,3 persen); (4) jasa penukaran uang atau money changer (50,6 persen), (5) pengurusan KTP, paspor dan surat-surat penting lainnya (48,3 persen); dan (6) telkong (35 persen). Sedangkan pihak-pihak yang tidak terlalu banyak menyerap uang TKI, menurut pengakuan responden adalah: lembaga penyelenggara kursus; biro travel dan, petugas bandara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila para TKI sudah memisahkan segala urusan keberangkatannya kepada P/TKI maka uang yang mereka keluarkan dalam jumlah cukup besar (menurut ukuran pedesaan), tetapi oleh P/TKI dana tersebut disalurkan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan urusan keberangkatan para TKI tersebut.

UANG YANG TERSERAP	YA	TIDAK	PERSENTASE
P/TKI	157 (52,3%)	143 (47,6%)	300 (100%)
Telkong	105 (35%)	195 (65%)	300 (100%)
Lembaga penyelenggara kursus	27 (9%)	273 (91%)	300 (100%)
Bank	157 (52,3%)	143 (47,6%)	300 (100%)
Money changer	152 (50,6%)	148 (40,4%)	300 (100%)
Biro travel	52 (17,3%)	248 (82,6%)	300 (100%)
Jasa angkutan umum	164 (54,6%)	136 (45,3%)	300 (100%)
Petugas Bandara	57 (19%)	243 (81%)	300 (100%)
Pengurusan KTP, paspor dan surat-surat penting lainnya	145 (48,3%)	155 (51,6%)	300 (100%)

Tabel 4.49.  
Penyerapan Uang TKI Oleh Pihak Lain.

### **g. Kesan Responden Selama Bekerja Menjadi TKI**

Komentar-komentar yang dilontarkan para responden ketika mereka diminta menyebutkan kesan-kesannya selama bekerja di luar negeri, terekam sebagaimana berikut ini:

1. Responden dari Ponorogo mengaku bahwa di sana ia harus bekerja berat, yaitu mulai subuh hingga malam hari (jam 11 malam);
2. Responden dari Tulungagung pernah dua kali ke Malaysia. Pertama datang, bekerja selama 3 tahun dan berhasil, sedangkan yang kedua tidak berhasil. Kepergian yang pertama dilengkapi dengan surat-surat dan exit permit, semuanya diurus di Malaysia. Sedangkan kepergian yang kedua tidak dilengkapi surat-surat sehingga ia ditangkap polisi dan dideportasi, dan bahkan pernah selama 3 bulan tidak digaji.
3. Ketika pulang ke tanah air, ada seorang responden yang mengaku pernah disekap oleh sopir taksi dari Bandara Sukarno Hatta dan diminta untuk menyerahkan koper, tapi ditolak responden. Akhirnya setelah diberi uang responden diantar ke stasiun Gambir.
4. Ada juga responden yang mengaku bahwa, dulu dijanjikan PJTKI untuk berangkat ke Malaysia naik pesawat terbang akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan janji. Akhirnya naik bis dari Jakarta ke Dumai, bisnya melebihi kapasitas tempat duduk. Sesampai di Dumai naik perahu boot. Padahal biaya yang dikeluarkan sebanyak 4 juta rupiah pada tahun 1999.
5. Salah satu responden yang bekerja di Malaysia mengaku sulit untuk menjalankan ibadah karena waktu yang diberikan hanya sedikit. Malahan, pada waktu pertama kali bekerja dikeluarkan dari pekerjaan

gara-gara menjalankan ibadah sholat dan diancam akan dipulangkan. Juga mendapatkan ancaman-ancaman buruk jika melanggar aturan kerja.

6. Ada pula responden yang pernah ditahan oleh agen di Hongkong karena hanya bekerja selama 2 bulan. Sedangkan perjanjian untuk menutupi biaya dan keperluan ke Hongkong baru lunas dengan potong gaji 4 bulan. Kepulangannya dan ketidakbetahannya adalah karena majikan kasar dan sering menganiaya. Untuk mengganti biaya pengurusan paspor dan lain-lain, pihak agen di Hongkong dan PJTKI di Jakarta meminta orangtua responden untuk menyerahkan sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan biaya ganti rugi PJTKI, tapi ditolak oleh orangtua responden. Akhirnya dengan berbagai cara dan alasan responden bisa pulang. Jadi, kepergiannya ke Hongkong malah mengeluarkan biaya yang hilang percuma untuk biaya pengurusan paspor dan lain-lain.

\*\*\*

## BAB V

### KESIMPULAN

Memperhatikan paparan data hasil temuan lapangan serta analisis sebagaimana dikemukakan di atas maka, beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan umum -- antara lain adalah sebagai berikut;

#### 5.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TKI.

Keberhasilan maupun kegagalan TKI di Luar Negeri dapat disebabkan oleh banyak faktor . Hasil penelitian ini menyimpulkan ;

Pertama, untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan TKI di luar negeri; temuan studi ini menunjukkan sebagai berikut: Tujuan utama bekerja sebagai TKI di luar negeri, sebagian besar (62,3 %) mengaku karena didorong oleh keinginan responden ataupun keluarganya untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi keluarga di desa asal. Sementara faktor penarik bagi sebagian besar (66,3 %) responden sehingga mereka memutuskan beremigrasi menjadi TKI ke luar negeri, adalah karena gaji yang ditawarkan di negara lain cukup besar ; serta karena sukses migran lama yang lebih dulu menjadi TKI di luar negeri.

Kedua, hampir seluruh dari mereka (84 % TKI) yang diwawancarai dalam studi ini, mengaku tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya, selama bekerja di luar negeri -- tetapi memang ada sebagian

kecil kasus TKI yang mengalami nasib kurang baik selama menjadi TKI. Sebagian besar (81,6%) di antara mereka juga mampu bertahan menjadi TKI di luar negeri karena didukung oleh faktor: (1) jenis pekerjaan yang dilakukannya telah sesuai dengan kontrak kerja (32,6 %); (2) gaji yang besar (30 %), dan ada suami, kerabat atau teman yang lebih dulu bekerja di sana (19 %);

Ketiga, meskipun mereka mampu bertahan menjadi TKI selama itu, namun ketika kontrak kerjanya telah habis, separoh lebih (61,3 %) responden cenderung memilih untuk tidak kembali lagi menjadi TKI di luar negeri, dengan alasan; (1) merasa tidak sanggup berpisah lebih lama lagi dengan suami atau istri dan anak-anak mereka, (2) uang yang terkumpul sudah lebih dari cukup, (3) karena suami meninggal, dan (4) terjadi keretakan dalam rumah tangganya.

Keempat, gaji terakhir yang mereka terima kebanyakan (80,3 %) mengaku antara 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulan di mana gaji tersebut cenderung sama atau tidak berubah jika dibandingkan dengan gaji yang mereka terima ketika pertama kali bekerja; dan sebagian besar responden (93,6 persen) mengakui bahwa gaji yang mereka terima dibayarkan secara teratur setiap bulannya oleh majikan mereka;

Kelima, bagi responden yang memilih jalur tak resmi (49 orang) ketika berangkat ke luar negeri pertama kali, dan dari jumlah tersebut sebagian besar (63,3 %) beralasan bahwa dengan jalur itu mereka dapat berangkat lebih cepat dan urusannya tidak berbelir-belit. Ini berarti, bahwa prosedur pelayanan birokrasi ke-Imigrasian di tanah air masih dianggap tidak memihak kepada kepentingan TKI.

**Keenam**, Untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh tingkat keberhasilan dan kegagalan TKI asal Jawa Timur ini di luar negeri; studi ini menemukan bahwa, sebagian besar responden (84 %) menganggap bahwa mereka telah berhasil bekerja di luar negeri, terbukti dari kemampuan mereka membangun rumah besar dan mewah, membeli mobil (lihat foto terlampir) dan beberapa buah sepeda motor, atau membeli lahan pertanian di desanya, dan ada juga yang membangun usaha PJTKI dan sebagainya;

**Ketujuh**, sebagian besar responden (98,3 persen) mengaku bahwa mereka **tidak pernah** dikunjungi staf KBRI, petugas PJTKI yang mengirim mereka, maupun pihak APJATI. Meskipun demikian, pada umumnya mereka tidak pernah mengalami perselisihan kerja (94,6 %); karena lebih banyak responden (67 %) yang telah mengantongi surat perjanjian kerja tertulis, antara TKI dan majikan.

**Kedelapan**, penghasilan yang diterima para TKI kebanyakan (96 persen) juga dikirim untuk sanak saudaranya dengan cara mentransfer sebagian gaji mereka melalui bank-bank yang ada di Indonesia (terbanyak 66,7 %) melalui BNI dan Bank Bumi Daya, yang sekarang tergabung dalam Bank Mandiri); Adapun rata-rata penghasilan yang dikirim ke tanah air oleh cukup banyak responden antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah;

**Kesembilan**, sebagian besar responden mengatakan bahwa tidak ada masalah yang berarti selama menjadi TKI, bahkan sejak keberangkatannya ke luar negeri hingga pulang kembali ke Indonesia. Hanya ada 16 % responden yang mengalami nasib buruk karena mereka dipermainkan oleh teikong atau calo TKI pada waktu berangkat, diperlakukan kasar oleh

majikan, upah yang dibayarkan tidak tepat waktu, atau gaji habis untuk ganti rugi barang majikan dan bahkan ada yang pernah di penjara.

Kesepuluh, pihak-pihak yang paling banyak menyerap keuntungan dari uang para responden antara lain adalah: jasa angkutan umum, PJTKI, bank, jasa penukaran uang (*money changer*), jasa pengurusan surat-surat kelengkapan administratif (KTP, paspor, visa, dll); dan para teikong atau perantara pencari kerja.

Kesebelas, tentang efek berganda (*multiplier effect*) dari keberadaan TKI di luar negeri, studi ini menemukan bahwa, (1) dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, jelas bahwa di desa-desa responden penelitian, telah “tumbuh” usaha-usaha baru yang sebelumnya tidak pernah ada di *level* pedesaan; yaitu usaha jasa “*money changer*” (foto terlampir) yang membawa serta gaya hidup kosmopolitan di tengah struktur kehidupan pedesaan. (2) munculnya usaha-usaha PJTKI di pedesaan yang mampu memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, (3) terbukanya lapangan kerja baru di sektor konstruksi (bangunan); sebagai dampak berantai dari upaya TKI ini membangun rumah baru yang besar dan mewah (untuk ukuran pedesaan); tidak hanya dalam arti tenaga buruh bangunan, akan tetapi juga sampai kepada usaha toko penjual material bahan bangunan; serta memberikan tambahan penghasilan bagi para pendulang pasir dan pengrajin batu bata (kapur) di wilayah ini. Disamping itu, usaha jasa “*service*” sepeda motor dan jasa “ganti olie” juga bermunculan di sekitar desa penelitian, karena hampir semua keluarga TKI di lokasi penelitian memiliki 2-3 buah sepeda motor Jepang keluaran tahun terbaru. Menurut penuturan salah seorang Pamong desa di Tanggul Welahan; bahwa ada kecenderungan perilaku konsumtif

yang muncul dikalangan anak-anak muda (keluarga TKI). Jika sepeda motor yang baru dibelinya itu ada yang “*menyamai*” dilingkungannya, maka anak itu akan segera menggantinya dengan jenis terbaru yang sama sekali berbeda dengan milik tetangganya.

## 5.2. SARAN - SARAN.

Memperhatikan beberapa temuan pokok dari studi ini, sebagaimana diutarakan di dalam kesimpulan umum di atas, maka beberapa saran untuk tindak lanjut, dapat kiranya dirumuskan sebagai berikut;

Pertama, dalam era otonomi dewasa ini, perlu sinergi yang jelas dan ‘intens’ antara pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan pihak Dinas Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten/Kota di dalam mengawasi kinerja PJTKI , sehingga data (informasi) mengenai segala bentuk perkembangan yang menyangkut persoalan TKI dapat dipantau dan dievaluasi secara dini dan berkesinambungan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, hampir seluruh TKI yang pernah bekerja di luar negeri ini mengaku TIDAK pernah dikunjungi oleh pihak yang kompeten yaitu; agen atau lembaga yang mengirimnya.

Kedua, perlu sosialisasi secara luas dan kontinu dengan melibatkan media massa (TV siaran pedesaan), elemen masyarakat seperti LSM; tentang persiapan (termasuk jenis keterampilan, bahasa, kemampuan lain yang dibutuhkan oleh user ) persyaratan, tata cara, prosedur ke-imigrasian yang harus ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri. Demikian pula dengan hak dan kewajiban TKI

ketika mereka sudah berada di luar negeri, harus dipahami dengan baik melalui sosialisasi semacam ini.

Ketiga, melihat kenyataan bahwa, antara TKI yang bermasalah dengan TKI yang sukses, lebih banyak yang sukses dan banyak pihak turut menikmati keuntungan dari keberadaan TKI diluar negeri, maka anggapan atau "wacana" yang menghendaki agar pengiriman TKI ke luar negeri di hentikan, TIDAK dapat diterima karena, tanpa dasar yang kuat. Ibarat mengatasi masalah hama tikus dalam rumah, maka tidaklah masuk akal jika untuk mengatasi persoalan beberapa orang TKI yang bermasalah, harus ditempuh dengan kebijakan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri -- atau sama seperti menghilangkan beberapa ekor tikus dalam rumah tetapi dengan cara membakar rumah itu sendiri.

\* \* \*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abella, M.I., 1995, "*Asian Migrant and Contract Workers in The Middle East*" in The Cambridge Survey of World Migration, by R.Cohen (ed), Cambridge University Press, P.418-23.
- Adipitoyo, S., 2003., Dilema Pemilihan Bahasa; Studi Kualitatif Pengalihan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa ke Bahasa Mandarin. Surabaya; Usulan Penelitian Tesis, Program Pasca Sarjana - Unair
- Biro Pusat Statistik, 1971., Sensus Penduduk . Seri D, Jakarta; Biro Pusat Statistik.
- Chin, C.B.N., 1997., "*Walls of Silence and Late Twentieth Century Representation Female Domestic Worker: The Case of Filipina and Indonesia Female Servants in Malaysia*" in International Migration Review, Vol.1 (2) 353 - 85.
- Da Vanzo, Julie, 1981, "*Microeconomic Approach to Studying Migration Decisions*" in De Jong and Robert Gardner (eds), Migration Decision Making; New York - Oxford - Frankfurt; Pergamon Press.
- De Jong, F.G., and James T. Fawcett, 1978., "Motivation for Migration; An Assessment and A Value-Expectancy Research Model" in De Jong and Robert W. Gardner, Migration Decision Making , New York; Pergamon Press P.13-57.
- Effendi, T. Noer, dkk., 1988. Pola Mobilitas Pekerjaan; Studi Kasus di Wibobrajan Yogyakarta. Yogyakarta; Pusat penelitian Kependudukan-UGM.
- Eki, Ayub. T., 2002. International Labour Migration From Eastern Flores Indonesia to Sabah Malaysia; A Study of Pattern, Causes and Consequences. Unpublished Ph.D Dissertation, Adelaide; The University of Adelaide.

- Indausy, C.M., 1994. Analisis Sosio-Ekonomi Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Terhadap Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Jakarta; Kerjasama Menristek dan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan - LIPI.**
- Giddens, Anthony and Jonathan H. Turner (eds), 1997. Social Theory Today. Stanford, California; Stanford University Press.**
- Goldstein, Sidney, 1980. Sirkulasi Dalam Konteks Mobilitas Total di Asia Tenggara. Yogyakarta; Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan - UGM.**
- Haralambos, Michael and Martin Holborn, 2000., Sociology: Themes and Perspective, (Fifth Edition), London: Harper Collins Publishers Limited.**
- Heatler, Carol.B., 1981, Female Headed in Circular Migration in Central Java. Unpublish Ph.D Disertation, Canberra; Australian National University.**
- Hugo, Graeme.J., 1975a., Population Mobility in West Java Indonesia, Unpublished Ph.D Disertation, Canberra; Australian National University.**
- \_\_\_\_\_, 1995b., "Illegal International Migration in Asia" in The Cambridge Survey of World Migration, by R.Cohen (ed), Cambridge University Press, P.397-404.**
- \_\_\_\_\_, 1996c., "Environmental Concern and International Migration" in International Migration Review, Vol.30 (105-31).**
- \_\_\_\_\_, 1996d., Economic Impacts of International Labour Emigration on Regional and Local Development; Some Evident from Indonesia, Paper to be Presented; New Orleans.**
- Lee, Everett.S., 1970. A Theory of Migration. Population Geography : A Reader, by Demko, G.J., et al., McGraw-Hill, New York, 299-98.**
- Mantra, Ida Bagoes, 1981. Population Movemant in West Rice Communities; A Case Study of two Dukuh in Yogyakarta Special Region. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.**
- Mantra, Kasto dan Yeremias T keban, 1999. Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Yogyakarta ; Pusat Penelitian Kependudukan - UGM.**

- Lassey, at al.,1993. *"Theories of International Migration; An Integration and Appraisal"* in Population and Development Review, Vol.19 (3) 431-66)
- ...,1990. *"Social Structure,Household Strategies and the Cumulative Caosation of Migration"*in Population Index,Vol.56(1) 3-26
- Hamelberg, Hans,O.,1995." Three Arguments about Rational Choice Theory in Sociology " Paper  
(<http://2home.sol.no./hmelberg/papers/950520.htm>)
- Hiller,M.J.,1995. *" Illegal Migration"* in The Cambridge Survey of World Migration,, by R.Cohen, Cambridge University Press, P.537-40.
- Mouzelis,Nicos.,1995. Sociological Theory ; What Went Wrong?; Diagnosis and Remedies, London: Routledge.
- Masikun,1984."*Urbanisasi Berlebih dan Radikalisme Perkotaan*" dalam PRISMA, No.7 Tahun XI. Jakarta ; LP3ES.
- Maim,Mochtar,1979. Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Moloma, Margaret,M.,2000. Sosiologi Kontemporer. Jakarta; Penerbit Rajawali Press.
- Popkin,Samuel,L.,1986. Petani Rasional (terjemahan; Sjahrir Mawi) Jakarta; Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Ritzer,George (ed),1990. Frontiers of Sociological Theory; The New Syntheses, Nwe York; Columbia University Press.
- Ritzer,G and Barry Smart (eds),2001. Hanbook of Social Theory. London ; SAGE Publication, Ltd.
- Sanderson, Stephen,K.,1995 : Sosiologi Makro; *Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Edisi Kedua) dengan Kata Pengantar Hotman Siahaan. Jakarta : CV Rajawali Press (PT. Raja Grafindo Persada).
- Sukirno,Sadono,1978. Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijakanaksanaan , Yogyakarta; Penerbit Petaling Jaya.

- Siahaan, Hotman, M., 1990. Masyarakat Desa; Suatu Uraian Tentang Struktur Sosial petani yang Sedang Berubah, Surabaya; FISIP – Unair.
- Spaan, Ernst, 1994., "Teikong's and Calo's; The Role of Middleman and Brokers in Javanese International Migration" in International Migration Review, 28 (1), 93-210.
- Sukamdi, Abdul Haris dan Patrick Browslee, 2000. Labour Migration in Indonesia, *Policies and Practice*. Yogyakarta ; Population Studies Centre – Gadjah Mada University.
- Titus, Milan J., 1988. Migrasi Antar Daerah di Indonesia. Seri Penerbitan, Yogyakarta; Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Todaro, Michael P., 1978. Economic Development in The Third World. (Second ed.) London ; Longman Group Limited.
- \_\_\_\_\_, 1976. Internal Migration In Developing Countries; A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities. Geneva, ILO.
- \_\_\_\_\_, 1997. Economic Development, 6th edition, Addison-Wesley, New York; Publishing Company.
- Turner, Jonathan H., 1974, The Structure of Sociological Theory. Homewood, Illinois; The Dorsey Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia. Jakarta ; Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Wattie, Anna, M. (ed), 2002. Belenggu Adat dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta; Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM-dan Ford Foundation.
- Wirosoehardjo, K., 1981. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta; Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

**Wolpert, Julian, 1966. "Migration as an Adjustment to Environmental Stress".  
Journal of Social Issues, 22 : 93.**

**Zelinsky, Wilbur.,1971." The Hypothesis of the Mobility Transition", in Geographical  
Review. No. 2**

### **BAHAN BACAAN PENUNJANG**

**Jawa Pos,1 Februari 2002**

**Kompas, 11 Juli 2000**

**Republika, 30 Juli 2000**

**Surabaya Post, 3 Juli 2000**

**Surabaya Post, 6 Juli 2000**

**Surabaya Post, 26 Agustus 2000**

## Lampiran. I

Nama Agen yang Ditempuh oleh responden dari Kabupaten Ponorogo  
(N=80)

Jalur yang Ditempuh	Frekuensi	Persentase
Depnaker	1	1,2
PT Abul Pratama Jaya Jaktim	4	5
PT Afco Jaya Manunggal	3	3,8
PT Amri	3	3,8
PT Amri Brothers Malang	4	5
PT Amri Jakarta	8	10
PT Amri Margatama	4	5
PT Aula Graha	3	3,8
PT Avco Jaya	4	5
PT Avida Avia Duta	4	5
PT Bijak Ponorogo	3	3,8
PT Binawan Inti Utama	3	3,8
PT Husana Adi Kreasi Madiun	4	5
PT Orienta Sari Mahkota	3	3,8
PT Sapta Saguna	4	5
PT Sekar Tanjung	3	3,8
PT Servindo Jakarta	4	5
PT Suma Perdana	6	7,5
PT Titar Atmangku	3	3,8
PT Triganda Jakarta	3	3,8
PT Triganda Kediri	3	3,8
Teikong	3	3,8
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>100,0</b>

Nama Agen yang Ditempuh oleh responden dari Kabupaten Pacitan (N=48)

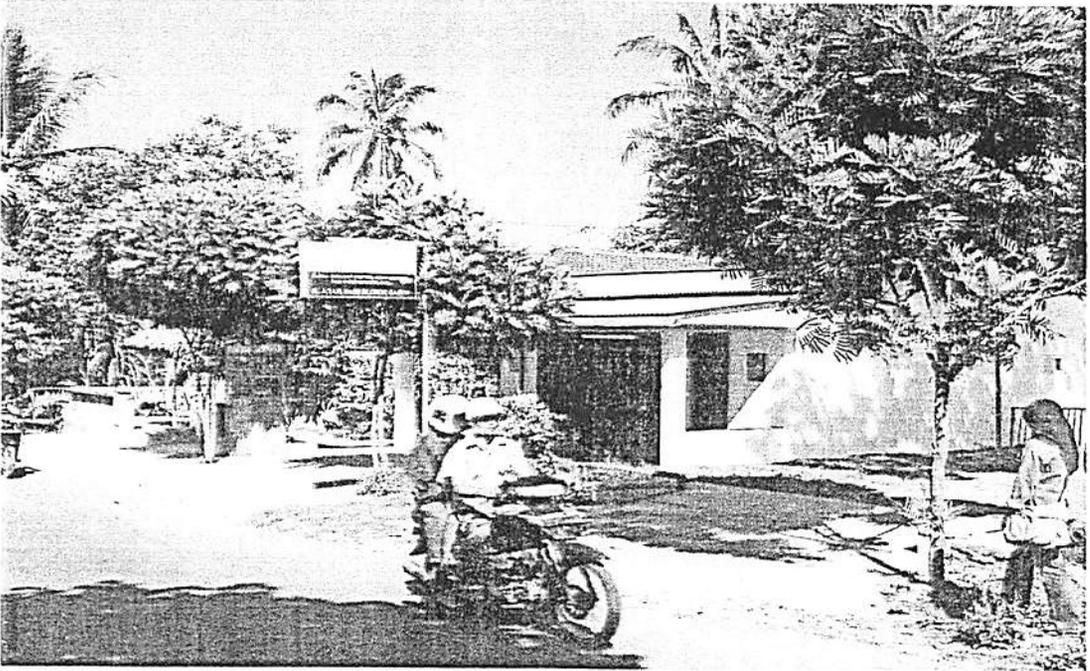
Jalur yang Ditempuh	Frekuensi	Persentase
<i>Calling visa lewat teman</i>	4	5,9
Depnaker	1	1,8
PT Amri	7	10,3
PT Bijak Jakarta	3	4,4
PT Limba Jaya Mitra	5	7,4
PT Tama	4	5,9
PT M. Dumai	5	7,4
PT Total Data Persada Jakarta	3	4,4
Teikong	20	29,4
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100,0</b>

**Nama Agen yang Ditempuh oleh responden dari Kabupaten Tulungagung  
(N=132)**

<b>Jalur yang Ditempuh</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak menyebutkan nama PJTKI	20	14,1
calling visa lewat teman	7	4,9
Teikong	22	15,5
PT Afco Jaya Manunggal	1	,7
PT Alatas Ikhwan	1	,7
PT Almuna Jakarta	1	,7
PT Amco Jaya Manunggal	1	,7
PT Amri Jakarta	4	2,8
PT Amri Margatama	2	1,4
PT Angkarika Jakarta	1	,7
PT Bijak Jakarta	1	,7
PT Bina Mandiri Malang	2	1,4
PT Binawan Inti Utama	13	9,2
PT Damas	2	1,4
PT Damas Dapco Manunggal Sejati	2	1,4
PT Dian Emplaytama	1	,7
PT Dimas Jakarta	1	,7
PT Dwi Manunggal Naya Jakarta	1	,7
PT Dwi Tunggal	1	,7
PT Esdema Mandiri Jakarta	1	,7
PT Fajar Jakarta	1	,7
PT Fortuna	3	2,1
PT Fortuna Jakarta	3	2,1
PT Fortuna Tama Indah	1	,7
PT Hikmah Jaya Surabaya	1	,7
PT Insan Perkasa	1	,7
PT Jasa Bina Abadi Karya Jakarta	2	1,4
PT Kabul Pratama Jaya Jakarta	1	,7
PT KMS Jakarta	4	2,8
PT Limba Jaya Mitra Tama	3	2,1
PT Mega Buana	1	,7
PT Pandu Jakarta	2	1,4
PT Pertona Taman Insani	1	,7
PT Perwata Mustika	1	,7
PT Petala Jaksel	1	,7
PT Pirhada Jaya Jakarta	1	,7
PT Rajasa Jakarta	1	,7
PT Rasfanora Jakbar	1	,7
PT Roda Bogor	1	,7
PT Sarah	2	1,4
PT Sentosa Jakarta	1	,7
PT Setia Mulia Kridatama Jakarta	1	,7
PT Surya Kusuma Tangerang	2	1,4
PT Tri Tunggal Jaya Kediri	1	,7
PT Triganda Kediri	8	5,6
PT Trigandi	1	,7
PT Usaha Tama Jakarta	1	,7
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>100,0</b>

## **LAMPIRAN II**

Gambar. 1. Pemandangan di salah satu sudut desa Sukorejo Kecamatan Garum Jawa Timur , Tutung Nurdiyana (berjilbab sedang cari data) 9/7/2004



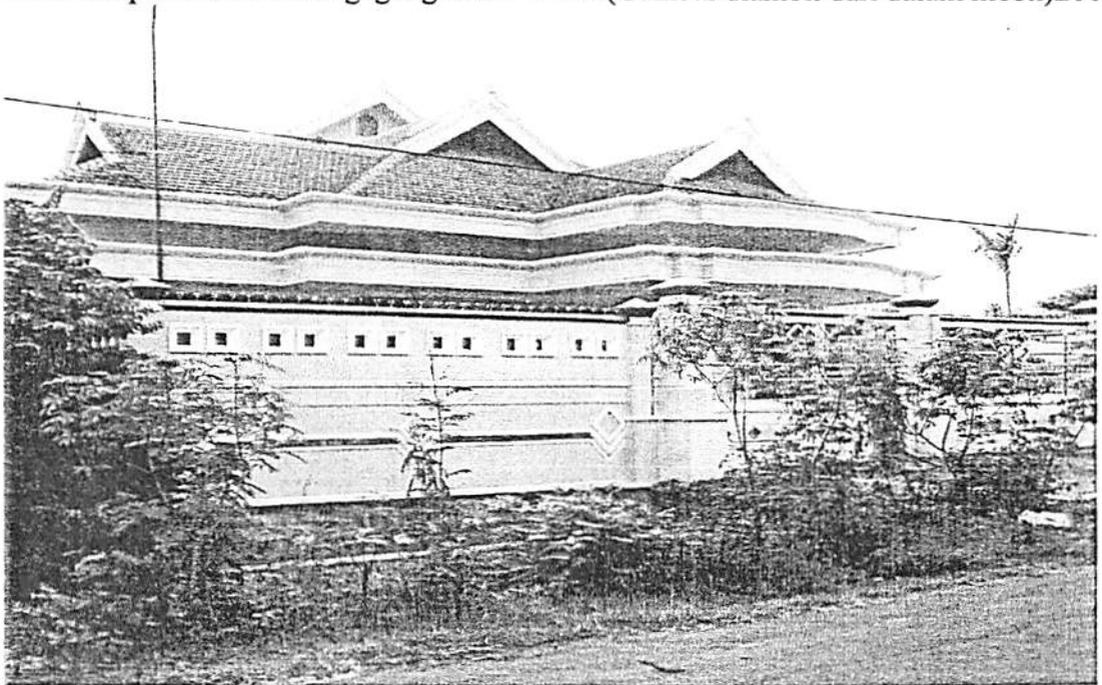
Gambar. 2. Salah satu rumah TKI di desa Tanggul welahan. Pulang Kampung dan menekuni industri mebel. 2004.



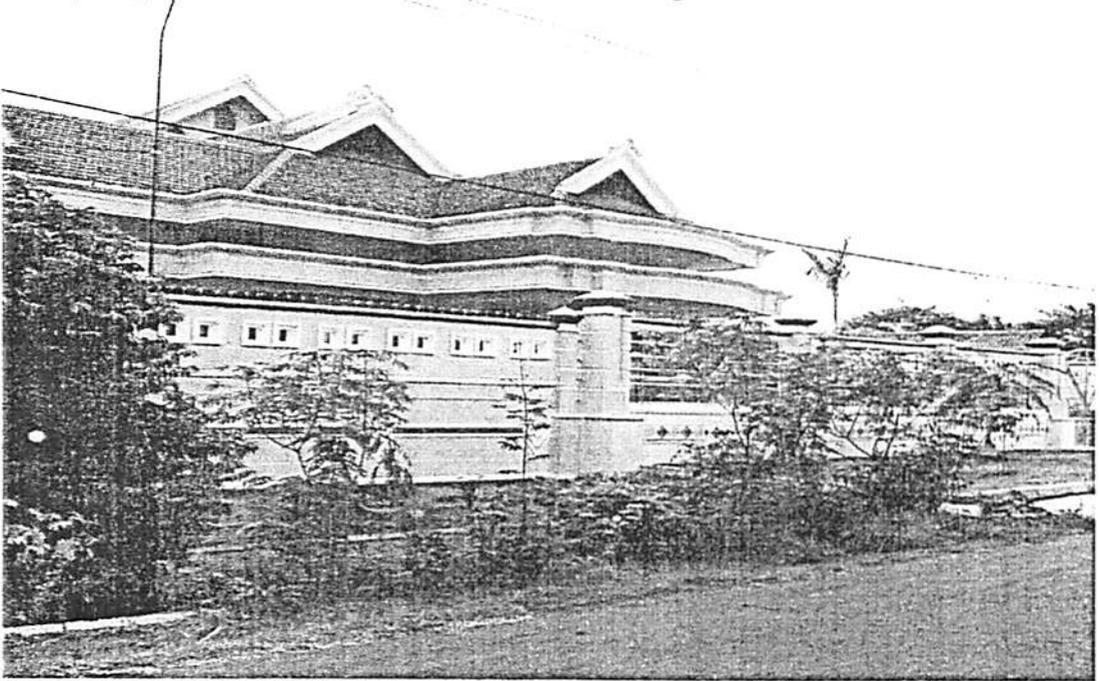
Gambar. 3. Rumah Yuliathi, Garum (lajang 26 tahun,ramah dan cantik) salah satu TKW yang sukses bekerja di salah satu club malam di Kota Kobe- Jepang selama 2,5 tahun.



Gambar. 4. Salah satu rumah TKW yang menikah dengan Laki-laki asal Arab Saudi; di desa Campur Darat- Tulungagung-Jawa Timur.(Gambar diambil dari dalam mobil)2004.



Bambar. 5. Rumah TKW yang sama dengan gambar 4. dari jarak lebih jauh. Belum ditempati, pemilik masih aktif bekerja di Timur Tengah. Doc. 12/7/2004.



Gambar. 6. Iklan PJTKI di jalan Supriyadi 15. Tulungagung – Jawa Timur, 2004.



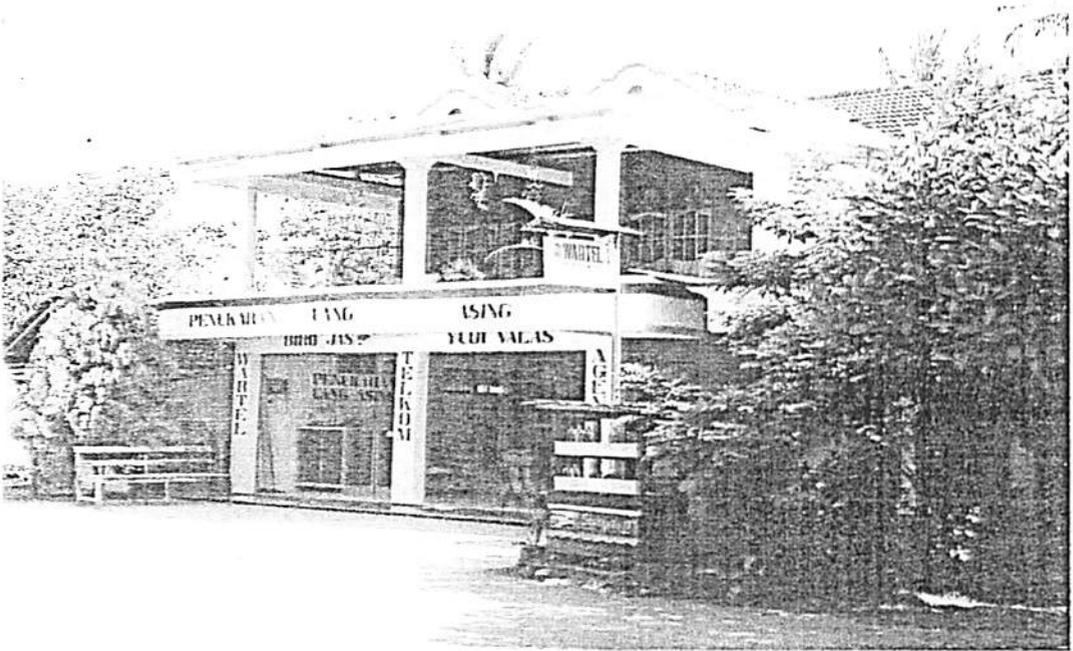
Gambar.7. Diantara persawahan. Salah satu rumah TKI di desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki –Kab. Tulungagung. Garasi mobil, pagar besi , mengusung gaya hidup cosmopolitan di pedesaan. Doc. 12/7/2004



Gambar. 8. Rumah Ibu Hesti, di desa Tanggul welahan, TKW yang sukses bersama suami bekerja di Malaysia selama 4 tahun.doc. 12/7/2004



Gambar. 9. Mantan TKI, yang sukses. Membangun usaha jasa penukaran uang asing di jalan utama masuk desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki- Tulungagung. 11/7/2004



Gambar 10. Suasana Desa Tanggul Welahan, dengan latar belakang bukit kapur yang tandus. Sebagian terbesar bermigrasi ke luar negeri menjadi TKI/TKW.



Gambar 11. Suasana lengang di desa Tanggul Welahan, Kec. Besuki – Tuluangagung . Sebagian besar penduduk bermigrasi ke luar negeri , merubah nasib dan meningkatkan kesejahteraan. Nampak tiga orang tenaga Enumerator sedang mencari responden (migrant kembali) 11 Juli 2004

